

**PENGELOLAAN KURIKULUM
DI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI 1
SUKORAMBI JEMBER DALAM PERSPEKTIF
OTONOMI DAERAH TAHUN PELAJARAN 2003/2004**

SKRIPSI



Oleh :

EL-FITRIYANI
NIM. 084 993 175

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
JURUSAN TARBIYAH
Agustus, 2004**

**PENGELOLAAN KURIKULUM
DI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI 1
SUKORAMBI JEMBER DALAM PERSPEKTIF
OTONOMI DAERAH TAHUN PELAJARAN 2003/2004**

S K R I P S I

Ditujukan Kepada
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Jember
Untuk Diujikan Dalam Rangka Memenuhi
Sebagian Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Pendidikan Islam (S. Pd. I)
Jurusan : Tarbiyah, Program Studi : KI

EL-FITRIYANI

NIM. 084 993 175

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
JURUSAN TARBIYAH**

Agustus, 2004

**PENGELOLAAN KURIKULUM
DI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI 1
SUKORAMBI JEMBER DALAM PERSPEKTIF
OTONOMI DAERAH TAHUN PELAJARAN 2003/2004**

S K R I P S I

Diajukan Kepada
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Jember
Untuk Dajukan Dalam Rangka Memenuhi
Sebagian Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Pendidikan Islam (S. Pd. I)
Jurusan : Tachiyah, Program Studi : KI

Oleh :

Nama : El-Fitriyani
Nomor Induk : 084 993 175
Jurusan : Tachiyah
Program Studi : Kependidikan Islam (KI)

**Disetujui Oleh
Pembimbing**



Dr. Moh. Khusnurridlo, M. Pd.
NIP. 150 252 763

**PENGELOLAAN KURIKULUM
DI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI 1
SUKORAMBI JEMBER DALAM PERSPEKTIF
OTONOMI DAERAH TAHUN PELAJARAN 2003 – 2004**

S K R I P S I

Dipertahankan Dibudapan Tim Penguji Skripsi
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Jember
Dan Diterima Dalam Rangka Memenuhi
Sebagian Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Pendidikan Islam (S. Pd. I)
Jurusan : Tarbiyah, Program Studi : KI

Pada :

Hari : Jum'at

Tanggal : 06 Agustus 2004

Tim Penguji :

Ketua



Dr. H. Atbi Halim Soehalar, MA
NIP. 150 232 937

Sekretaris



Swanton N'Am, M. Ag
NIP. 150 299 508

Anggota :

1. Dra. Hj. Titiek Rohanah H, M. Pd NIP. 150 190 985 ()

2. Dra. Moh. Khusnurridlo, M. Pd NIP. 150 252 763 ()

Mengetahui,

Ketua STAIN Jember




Dra. Moh. Khusnurridlo, M. Pd.
NIP. 150 252 763

MOTTO

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ
كُلٌّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْفُورًا (الاسراء : ٣٦)

*Artinya: "Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mengetahui
tentangnya. Setengahnya adalah penglihatan dan hati,
semuanya itu akan diteliti sepenuhnya".
(QS. Al-Isra' : 36), (Diringkas, 1992 : 429)*

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

1. Ayahanda dan Ibunda tercinta serta saudaraku sekeluarga.
2. Seluruh civitas akademika STAIN Jember, khususnya Bapak Drs. Moh. Khusnurridlo, M.Pd. selaku pembimbing.
3. Segenap teman-teman yang telah banyak membantu dan memberikan motivasi.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Alhamdulillah, syukur penulis panjatkan Kepada Allah SWT yang telah memberikan kemampuan dan kesempatan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini serta sholawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan jalan di dunia ini dari zaman kegelapan hingga zaman yang penuh dengan rahmatan di alamini.

Ucapan terima kasih yang tak terhingga kami sampaikan kepada berbagai pihak yang telah banyak membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini antara lain:

1. Kedua orang tua, Ayahanda dan Ibunda tercinta yang telah banyak membantu baik dari aspek moral maupun material.
2. Bapak Drs. H. Arief Furqan, MA, Ph. D selaku Pj. Ketua STAIN Jember.
3. Dosen Pembimbing Skripsi Bapak Drs. Moh. Khuzemridlo, M. Pd yang telah suka memberikan bimbingan dan pengarahan dalam proses penyelesaian skripsi ini dari awal hingga akhir.
4. Seluruh civitas akademika STAIN Jember (Dosen, Mahasiswa dan Karyawan) yang telah banyak membantu.
5. Bapak Kustanto S. Pd selaku Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Sukorambi Jember dan segenap jajarannya (Waka, Kurikulum dan Para Dewan Guru) yang telah banyak membantu proses pelaksanaan penyusunan skripsi ini.
6. Saudara-saudaraku di rumah dan semua pihak yang telah banyak membantu penyelesaian skripsi ini baik langsung maupun tidak langsung.

Saran dan kritik yang konstruktif kepada penulis, demi kesempurnaan penyusunan skripsi ini sangat diharapkan. Karena penulis sadar bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari sempurna dan terdapat kekurangan-kekurangan serta kesalahan-kesalahan.

Akhir kata semoga skripsi yang sederhana ini dapat memberikan banyak manfaat terutama kepada penulis sendiri serta kepada orang lain yang membacanya baik di dunia dan diakhirat nanti. Amin.

Jember, Juli 2004

Penulis

ABSTRAK

PENGELOLAAN KURIKULUM DI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI 1 SUKORAMBI JEMBER DALAM PERSPEKTIF OTONOMI DAERAH TAHUN PELAJARAN 2003/2004

Oleh :

EI-Fitriyani

NIM. 084.993.175

Proses belajar mengajar merupakan komponen kurikulum yang urgen dalam menentukan *output* dari suatu *input* pendidikan. Proses belajar mengajar adalah kegiatan yang dilakukan oleh guru dan peserta didik dalam situasi edukatif untuk mencapai tujuan yaitu pembelajaran.

Salah satu titik tekan Otonomi daerah adalah prinsip demokrasi, untuk itulah proses belajar dalam kerangka otonomi daerah harus dapat dilaksanakan secara kreatif dan inovatif demi pencapaian efektifitas dan efisiensi tujuan pendidikan Nasional yang tertera dalam pasal 3 UUD No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS).

SMK Negeri 1 Sukorambi Jember merupakan salah satu sekolah menengah kejuruan yang berusaha untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional di atas, yaitu mencetak *output* pendidikan/SDM berkualitas yang memiliki wawasan lokal, nasional dan internasional, sekaligus memiliki keterampilan dan keahlian di bidangnya, juga sikap dan mentalitas tanggung dan bertanggung jawab serta mandiri.

Penelitian tentang *Pengelolaan Kurikulum di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Sukorambi Jember Dalam Perspektif Otonomi Daerah Tahun Pelajaran 2003/2004* akan memfokuskan pada kajian tentang pengelolaan proses belajar mengajar yang meliputi : perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi proses belajar mengajar di SMK Negeri 1 Sukorambi Jember.

Adapun dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif. Hal ini dilakukan karena peneliti lebih mementingkan kerangka proses daripada hasil, agar fenomena-fenomena yang diteliti dapat dengan cermat diteliti. Temuan dan teori dibangun dengan menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu proses pencarian data dari informan yang akan diteliti secara mendalam dan wawancara secara mendalam, observasi partisipasi dan studi dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Berdasarkan analisis data, dapat diketahui :

- (1) Perencanaan Kurikulum di SMK Negeri 1 Sukorambi Jember Dalam Perspektif Otonomi Daerah Tahun Pelajaran 2003/2004 yaitu meliputi : (a)

Analisis SWOT, (b) Perencanaan Program Tahunan, Program Semester, Program Satuan Pelajaran, Program Modul dan Program Perbaikan dan Penyiapan, (c) Perencanaan Pelaksanaan Program Dilat di dua tempat (sekolah dan DK-DI) dalam bentuk *sky release* dan *block release*.

- (2) Pelaksanaan Kurikulum di SMK Negeri 1 Sukorambi Jember Dalam Perspektif Otonomi Daerah Tahun Pelajaran 2003/2004 yaitu meliputi (a) Pembentukan teori dan praktek di sekolah dan praktek kerja industri (prakerin) di DK-DI, (b) Tahap Pelaksanaan belajar mengajar (tahap membuka, melaksanakan dan menutup pelajaran), (c) Pelaksanaan Pembelajaran yang memihakberikan pada kegiatan belajar peserta dilat.
- (3) Evaluasi (Penilaian) Kurikulum di SMK Negeri 1 Sukorambi Jember Dalam Perspektif Otonomi Daerah Tahun Pelajaran 2003/2004 yaitu meliputi : (a) Evaluasi dilaksanakan secara komprehensif, (b) Evaluasi dilaksanakan secara terus menerus (c) Evaluasi dilaksanakan secara obyektif.

Kesimpulannya adalah : (1) Perencanaan Kurikulum di SMK Negeri 1 Sukorambi Jember Tahun Pelajaran 2003/2004 sesuai dengan kehendak otonomi daerah, (2) Pelaksanaan Kurikulum di SMK Negeri 1 Sukorambi Jember Tahun 2003-2004 sesuai dengan kehendak otonomi daerah, (3) Evaluasi (Penilaian) Kurikulum di SMK Negeri 1 Sukorambi Jember Tahun Pelajaran 2003/2004 sesuai dengan kehendak otonomi daerah.

Akhirnya peneliti berharap dari temuan ini dapat memberikan masukan kepada Kepala Dinas Kab. Jember, Kepala Sekolah, Waka. Kurikulum dan para guru SMK Negeri 1 Sukorambi Jember.

DAFTAR TABEL

NO. TABEL	KETERANGAN	HAL
1	2	3
3.1	Sarana dan Prasarana Pendidikan SMK Negeri 1 Sukorambi Jember	79
3.2	Jumlah dan Komposisi Siswa SMK Negeri 1 Sukorambi Jember	82
3.3	Kurikulum Program Keahlian Budidaya Tanaman SMK Negeri 1 Sukorambi Jember	83
3.4	Daftar Nama Perusahaan (DU-DI) Pengguna Tamatan SMK Negeri 1 Sukorambi Jember	86
3.5	Cara Penilaian Komponen Produktif SMK Negeri 1 Sukorambi Jember	116

DAFTAR BAGAN

NO. BAGAN	KETERANGAN	HAL
1	2	3
3.1	Struktur Organisasi SMK Negeri 1 Sukorambi Jember Tahun 2003 – 2004	78
3.2	Prosedur Penyesuaian GBPP SMK Negeri 1 Sukorambi Jember	92
3.3	Alur Penyelenggaraan Diklat SMK Negeri 1 Sukorambi Jember	93
3.4	Prosedur Pengembangan Modul SMK Negeri 1 Sukorambi Jember	97
3.5	Prosedur Penyusunan Program Pembelajaran SMK Negeri 1 Sukorambi Jember	100
3.6	Proses Pelaksanaan Pembelajaran SMK Negeri 1 Sukorambi Jember	101
3.7	Prosedur Penilaian Belajar SMK Negeri 1 Sukorambi Jember	107

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR BAGAN	xii
DAFTAR ISI	xiii

BAB I PENDAHULUAN

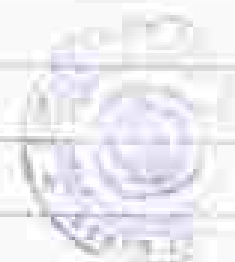
A. Latar Belakang	1
B. Alasan Pemilihan Judul	11
C. Pengasan Judul	13
D. Fokus Penelitian	15
E. Tujuan Penelitian	16
F. Manfaat Penelitian	17
G. Metode dan Prosedur Penelitian	18
H. Sistematika Pembahasan	23

BAB II TINJAUAN TEORITIK

A. Pengelolaan Kurikulum	25
B. Otonomi Daerah	54

BAB III. LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Latar Belakang Objek	72
B. Paparan Data	87
C. Tema Penelitian	120
D. Temuan Penelitian	125
E. Pembahasan Hasil Penelitian	129
F. Mula Penelitian	133



BAB IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	138
B. Saran-saran	138

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN – LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Isu globalisasi dalam memasuki millenium ke-III telah mampu mengubah kehidupan manusia dari orientasi lokal menjadi global. Isu yang muncul dalam era globalisasi tersebut adalah demokrasi, di mana demokrasi ini merupakan wujud dari isu hak asasi manusia yang telah lama diperjuangkan negara-negara di seluruh dunia. Indonesia sebagai bagian dari bangsa di dunia ini tidak bisa melepaskan diri dari masalah demokrasi sebagai ciri khas dari globalisasi.

Demokrasi berarti memberikan kebebasan kepada individu maupun kelompok individu untuk mengembangkan hak asasinya sebagai warga negara. Wujud pelaksanaan demokrasi tampak dari sistem pemerintahan sentralisasi kepada sistem pemerintahan desentralisasi. Untuk mewujudkan sistem desentralisasi ini munculah paradigma baru dalam mengelola pemerintahan dengan apa yang disebut Otonomi Daerah (OTODA) yang tertuang dalam UU No.22 tahun 1999 dan UU No.25 tahun 1999 tentang otonomi daerah dan pengalihan perimbangan kewenangan antara pusat dan daerah. Untuk mengaplikasikan UU No.22 tahun 1999 dan UU No.25 tahun 1999 tersebut, maka diterbitkanlah aturan pelaksanaannya dalam bentuk P.P No. 25 tahun 2000.

Dari peraturan perundangan tentang otonomi daerah tersebut di atas ternyata tidak semua urusan diserahkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah kecuali beberapa hal termasuk bidang pendidikan.

Mencerdaskan kehidupan bangsa adalah tugas negara. Mencerdaskan kehidupan bangsa ini dapat dilakukan melalui sarana pendidikan.

Penyelenggaraan pendidikan tersebut tidak semudah apa yang diucapkan, terlebih lagi Indonesia memiliki jumlah penduduk yang cukup banyak sekitar 200 juta jiwa dan tersebar di seluruh pelosok tanah air. Agar upaya penyelenggaraan pendidikan ini lebih efektif dan dapat dirasakan hasilnya oleh seluruh masyarakat di daerah, maka penyerahan bidang pendidikan ke daerah atau desentralisasi pendidikan dijadikan sebagai strategi untuk mempercepat, mempermudah penyelenggaraan pendidikan tersebut di atas.

Pendidikan yang terdesentralisasi tidak hanya memungkinkan proses pembelajaran menjadi kian lancar, tetapi juga menajamkan inisiatif dan kreativitas sekolah pada khususnya dan pemerintah pada umumnya dalam menggali potensi dan memanfaatkan peluang yang ada di daerahnya. Ini adalah harapan yang didanakan pada realitas selama ini yakni betapa sangat tergantungnya daerah kepada pusat dalam mengelola pembangunan, sehingga melemahkan peran pemerintah dalam mensejahterakan hidup masyarakat secara maksimal. (Irianto, 2001 : 7)

Bagaimanapun besarnya harapan tersebut tentu tidak akan tercapai jika kondisi-kondisi penting bagi suksesnya kebijakan otonomi dan desentralisasi tidak dipersiapkan secara sungguh-sungguh. Persiapan dan kesiapan tersebut sangat erat

kaitannya dengan berbagai persoalan strategis yang berkembang selama ini, yaitu rendahnya kualitas sumber daya manusia yang diindikasikan dengan rendahnya kualitas out put pendidikan yang menyebabkan berbagai permasalahan, salah satunya adalah semakin meningkatnya pengangguran dari tahun ke tahun.

Telah umum diketahui bahwa pemerintahan di banyak negara memberi perhatian yang sangat serius terhadap masalah sumber daya manusia. Hal ini tentu disebabkan oleh adanya kesadaran yang sangat mendalam bahwa kemajuan suatu bangsa sangat dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia. Sekalipun didukung oleh sumber daya alam yang melimpah, suatu negara sulit untuk berkembang jika tidak didukung dengan sumber daya manusia yang berkualitas tinggi. Akibatnya kebijakan pemerintahan harus selalu difokuskan pada upaya pengembangan kualitas sumber daya manusia melalui berbagai cara.

Pengembangan kualitas sumber daya manusia ini diwujudkan dalam bentuk program. Hasil dari program pengembangan sumber daya manusia tersebut secara signifikan akan mempengaruhi kinerja organisasional, jika program tersebut dilakukan melalui proses yang benar secara akademis. Konsep pengembangan sumber daya manusia dalam berbagai bentuknya harus mengarah pada peningkatan *skill*, *knowledge* dan *ability*, sebagai refleksi atas penguasaan kompetensi tertentu melalui program pelatihan. Oleh karena itu dalam lingkup internasional kini sedang berkembang sebuah program yang dikenal dengan *competency-based training* (CBT) yaitu konsep pelatihan berbasis kompetensi yang mengutamakan peserta didik pada penguasaan keahlian tertentu. (Irianto, 2001:8)

Sedangkan realitas di Indonesia banyak Program-program pengembangan sumber daya manusia baik di berbagai organisasi, maupun lembaga-lembaga pendidikan yang diimplementasikan dalam bentuk pelatihan tidak dilaksanakan secara maksimal dan terkesan hanya sekedar menghabiskan anggaran yang tersedia, terbukti dari tahun ke tahun pengangguran di Indonesia semakin meningkat baik dari lulusan dasar, menengah maupun perguruan tinggi.

Sebagaimana dikatakan Kepala Dispendik Jember :

Dengan ditulainya AFTA (*Asian Free Trade Area*) dan AFLA (*Asian Free Labour Area*) Tahun 2003, yang berarti sejak itu persaingan tenaga kerja akan menjadi terbuka. Konsekuensinya sumber daya manusia atau tenaga kerja kita harus mampu bersaing secara terbuka dengan tenaga kerja asing. Jika tidak, maka Indonesia akan dibanjiri oleh tenaga kerja asing dan pengangguran dalam negeri akan semakin bertambah. Dengan hal ini, berarti pendidikan sebagai lembaga pencetak sumber daya manusia perlu untuk berperan aktif dalam membantu mengatasi pengangguran tersebut. (Kepala Dispendik, w : 05-09-2003)

Keinginan Indonesia untuk memperbaiki sistem serta upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui program pengembangan sumber daya manusia berarti belum terlaksana secara rampung dan sempurna. Salah satu indikasi negatif yang dapat dilihat secara langsung adalah semakin banyaknya tamatan sekolah dari jenjang dasar sampai pendidikan tinggi yang tidak dapat diserap oleh dunia kerja. Padahal konsekuensi logis dari persaingan global adalah keberadaan sumber daya manusia yang unggul dan memadai. Dengan adanya sumber daya manusia yang unggul dalam penguasaan berbagai ketrampilan, keahlian profesional, serta ilmu teknologi, maka diharapkan Indonesia ke depan dapat menggerakkan sektor-sektor industri secara lebih efisien dan produktif serta mampu bersaing di pasar dunia. (Sidi, 2001: 78)

Begini kompleks untuk memprediksi secara rinci dan pasti penyebab terjadinya masalah yang dilematis tersebut di atas. Namun salah satu faktor yang diperkirakan sebagai penyebabnya ialah kurikulum yang disajikan oleh suatu lembaga pendidikan kurang atau tidak menumbuhkan kemandirian usaha dan kerja yang diperlukan untuk memasuki sektor informal yang memberi kesempatan lebih luas dibanding dengan sektor formal, serta sumber daya manusia tidak berkualitas yang memiliki *skill, knowledge dan ability* yang dibutuhkan dalam memasuki sektor formal maupun informal.

Untuk itulah di era otonomi daerah dan dengan diberlakukannya sistem pendidikan desentralistis Indonesia berupaya untuk membuat perubahan dalam bidang kurikulum, seperti dengan dimulainya pemberlakuan *Competency-Based Training* atau dikenal dengan pelatihan berbasis kompetensi. Kurikulum seperti ini diharapkan mampu memberi kepada peserta didik bekal hidup atau keterampilan yang dapat mencapai standar global atau regional, sehingga kualitas kurikulum pendidikan setara dengan negara-negara lain yang mempunyai wawasan keunggulan atau wawasan nasional dan dapat disesuaikan dengan kondisi lokal atau daerah.

Jember adalah bagian dari negara Indonesia, yang mana di era otonomi daerah ini juga melaksanakan agenda reformasi di segala bidang salah satunya adalah bidang pendidikan. Sistem pendidikan yang desentralistis diharapkan mampu memberi kontribusi besar dalam pelaksanaan otonomi daerah. Seperti halnya yang dihadapi daerah lain di Indonesia masalah yang dihadapi Jember adalah masalah mutu pendidikan rendah sebagai akibat sumber daya manusia

yang rendah pula. Ini semua berlanjut pada kesenjangan antara pendidikan dan dunia kerja, yang salah satu faktusnya adalah kurikulum yang disajikan oleh lembaga pendidikan kurang mengarah pada penumbuhan dunia kerja dan usaha yang dibutuhkan untuk memasuki dunia kerja. Padahal masalah pengangguran memiliki relevansi erat dengan masalah pendidikan.

Kurikulum yang relevan dengan kehendak demokrasi, globalisasi dan otonomi daerah adalah kurikulum berbasis kompetensi, yang mana kurikulum ini tidak hanya memberikan ilmu pengetahuan saja, akan tetapi juga memberikan *life skill*, agar lulusan pendidikan memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif sesuai standar mutu nasional dan internasional juga dapat hidup secara mandiri. Karena prioritas yang ingin dicapai Jember, khususnya di bidang pendidikan adalah menciptakan para siswa berkualitas yang siap pakai dengan bekal *skill, knowledge dan ability*. Dari situlah SMK dipandang sebagai lembaga pendidikan yang menerapkan sistem pembelajaran berdasarkan kompetensi dengan bentuk program pendidikan dan pelatihan. (Kepala Dispendik, w : 05-09-2003)

Hal ini didukung oleh pendapat Mendiknas Malik Fadjar bahwa dalam implementasinya, arah pendidikan di era desentralisasi atau otonomi daerah diharapkan bisa memberikan pegangan serta keyakinan kepada peserta didik, bahwa pendidikan mampu memberi hidup dan sandaran serta warna baru bagi peserta didik. Karena itu, pendidikan harus lebih bersifat profesional dan kewirausahaan yang mampu memberikan siswa ketrampilan (*Life skill*) di samping ilmu pengetahuan. Bentuknya bisa berupa sekolah kejuruan yang sudah ada, yaitu para lulusannya mendapatkan kompetensi dasar, sehingga setelah mereka lulus bisa menjadi sumber daya manusia yang memiliki skill atau ketrampilan untuk bidang tertentu. (Syaukani, 2002 : 114)

Pembentukan manusia berkualitas yang mempunyai pengetahuan, ketrampilan dan sikap atau nilai-nilai dasar yang direfleksikan dalam kebiasaan

berfikir dan bertindak menjadikan manusia mampu membuat perbaikan-perbaikan di muka bumi ini. Sebagaimana ditekankan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah Ayat 30 yang berbunyi

وَلَا قَوْلَ رَبِّكَ لِلْمَلَأِكَةِ لِيَبْتَلِيَ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً (الْبَقَرَةُ : ٣٠)

Artinya : "Ingallah ketika Tuhanmu berfirman kepada para

Malakut, "Sesungguhnya Aku (Allah) hendak menjadikan seorang

Khalifah di muka bumi ini ... " (Al-Baqarah : 30) (Depag RI, 1992 :

13)

Dengan diberlakukannya otonomi daerah serta desentralisasi

pendidikan, setidaknya menjadikan masyarakat sadar bahwa dalam kenyataannya lembaga-lembaga pendidikan mempunyai status yang sama yaitu sebagai institusi, tetapi ia berada dalam lokasi yang berbeda yang memiliki keunikan dan keunggulan sendiri.

Untuk itu dalam prakteknya, pendidikan profesional harus benar-benar berbasis kepada potensi lokal/daerah, dan sesuai kebutuhan masyarakat umum, sehingga nantinya akan menghasilkan tenaga terampil dan profesional yang mampu membangun daerahnya sendiri dan membangun bangsa secara keseluruhan. Sedangkan pendidikan kewirausahaan juga dilakukan dengan membuka kelas-kelas keahlian khusus untuk menghadapi persoalan-persoalan yang ada, karena hal ini dalam rangka menghadapi otonomi daerah, menghadapi permintaan pasar kerja dan keluhan masyarakat terhadap kualitas pendidikan nasional yang terus merosot permi dan kualitasnya. Jadi jurusan atau program

yang dibuka pada lembaga pendidikan harus berorientasi kepada kebutuhan daerah dan tuntutan masyarakat. (Syakani, 2002: 111)

Begitu juga dengan daerah Jember yang sebagian besar masyarakatnya adalah masyarakat agraris, mempunyai keunggulan yang kita kenal dengan daerah penghasil tembakau. Keunggulan ini belum tentu dimiliki oleh daerah lain. Untuk itu logikanya peserta didik di Jember seharusnya atau paling tidak mengerti kondisi riil yang dihadapi atau berada di masyarakat. Misalnya, peserta didik setidaknya mengetahui bagaimana mengolah tembakau agar siap dipasarkan. Dari sinilah maka perlu adanya kurikulum muatan lokal, yang mana kurikulum ini menyajikan teori-teori berdasarkan kondisi riil di mana mereka tinggal, sehingga peserta didik dapat langsung berhadapan dengan kondisi riil dan tidak sekedar teori-teori saja. Karena salah satu fungsi pendidikan adalah penyampaian budaya masyarakat setempat kepada generasinya. Ini jelas berbeda dengan kurikulum nasional yang hanya menyajikan teori-teori umum yang harus diketahui oleh peserta didik sebagai masyarakat Indonesia. Kurikulum yang ditetapkan secara nasional masih bernilai umum, karena belum mengacu kepada kebutuhan Dunia Usaha atau industri tertentu. Oleh karena itu, baik materi maupun sistem pengorganisasiannya masih perlu dianalisis dan dikembangkan lebih lanjut di Sekolah sehingga dapat lebih terkait dan sepadan dengan kebutuhan dunia kerja yang ada.

Jadi dengan adanya kurikulum muatan lokal ini juga diharapkan hasil pendidikan dapat dirasakan oleh masyarakat lokal atau daerah. Kepala Dikendik Jember mengatakan:

Di era otonomi daerah ini diharapkan hasil pendidikan itu kembalinya pada daerah di mana lembaga pendidikan itu berada, walaupun hasil pendidikan itu tidak langsung dapat dirasakan oleh daerah, tetapi perlu waktu beberapa tahun dan baru dapat dirasakan. Hal ini tergantung pada proses dan kemampuan daerah masing-masing dalam mengelola daerahnya termasuk dalam bidang pendidikan, serta kemampuan dan kesiapan lembaga pendidikan untuk lebih kreatif dan inovatif dalam pengelolaan proses pembelajaran sehingga *input* yang tersedia dapat dioptimalkan menjadi *output* yang siap menjadi *our come*. (Kepala Diapendidik, w : 05-09-2003)

Untuk itulah proses belajar mengajar perlu direncanakan secara intensif dan profesional dengan berfokus pada anak didik, serta dievaluasi sesuai dengan tujuan pembelajaran. Evaluasi ini perlu untuk mengetahui sejauh mana hasil belajar dalam proses belajar mengajar di lembaga pendidikan tersebut sesuai tujuan yang direncanakan. Penilaian tidak hanya difokuskan dari segi intelektual saja, akan tetapi penilaian sikap, watak, kemandirian, ketakwaannya, kemampuan aktualisasi diri pengembangan integritas, dan profesionalisme juga untuk dipertimbangkan. Sedangkan hasil dari penilaian dapat dijadikan *feed back* untuk perencanaan proses belajar mengajar selanjutnya. Karena rendahnya mutu pendidikan selama ini juga disebabkan sistem evaluasi dan penilaian hasil belajar yang dilakukan oleh lembaga sekolah terhadap kurikulum yang ada kurang relevan. Sehingga hasil evaluasi yang tidak melalui proses intensif tersebut tidak dapat dijadikan umpan balik bagi pengembangan pembelajaran selanjutnya. (Bastian, 2002 : 63)

Hal ini juga tidak terlepas dengan diberlakukannya Ebtanas yang merupakan produk sistem sentralisasi yang hanya mengevaluasi kemampuan umum, dan pada aspek pengetahuan peserta didik saja, tanpa memperhatikan aspek sikap, watak, kemandirian dan kreativitas pada diri siswa. Sehingga hasil

pembelajaran dapat direkayasa oleh oknum-oknum tertentu untuk mendapatkan nilai yang tinggi. Untuk itulah penilaian melalui Ebtanas harus didukung dengan penilaian-penilaian yang lain, untuk menghasilkan *out put* pendidikan yang berkualitas.

Merujuk pada pendapat Kepala Dispendik di atas bahwa Jember saat ini membutuhkan *out put* pendidikan atau sumber daya manusia berkualitas, yang memiliki wawasan lokal, nasional dan internasional, sekaligus memiliki ketrampilan dan keahlian di bidangnya, juga sikap dan mentalitas tangguh dan bertanggung jawab serta mandiri. Maka Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) adalah salah satu lembaga pendidikan kejuruan yang berusaha untuk mewujudkan Tujuan Pendidikan Nasional Indonesia yang termuat dalam pasal 3 UUR No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang berbunyi : Pendidikan Nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan ketrampilan, dan kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri, serta tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.

SMK Negeri 1 Sukorambi Jember adalah Sekolah Menengah Kejuruan dalam bidang pertanian, yang menerapkan Pendidikan Sistem Ganda (PSG). Pendidikan Sistem Ganda merupakan bentuk penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan keahlian kejuruan yang memadukan secara sistematis dan sinkron antara program pendidikan di sekolah dan penguasaan keahlian melalui praktik langsung di dunia kerja. Jadi selain pemberian teori pada pembekalan produktif, juga

dengan pelaksanaan Praktek Kerja Industri (prakerin), yang bekerja sama dengan perusahaan/industri yang relevan dengan profil masing-masing bidang keahlian

Meskipun usaha lembaga pendidikan SMK untuk dapat mencapai tujuan pendidikan nasional di atas sudah mulai dapat dirasakan hasilnya, baik oleh lembaga itu sendiri maupun masyarakat daerah, akan tetapi masih perlu diteliti kembali apakah pengelolaan kurikulum di lembaga tersebut benar-benar sesuai dan sejauhmana itu dilakukan sesuai dengan tujuan pendidikan nasional serta keinginan dan tujuan dari otonomi daerah.

Dari latar belakang itulah peneliti tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang pengelolaan kurikulum terutama dalam proses belajar mengajar muatan lokal di lembaga pendidikan kejuruan (SMK), dengan mengambil tema yang sekaligus menjadi judul skripsi yakni : *"Pengelolaan Kurikulum di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Sukorambi Jember Dalam Perspektif Otonomi Daerah Tahun Pelajaran 2003/2004"*

B. Alasan Pemilihan Judul

Dalam skripsi ini peneliti menggunakan dua alasan, *Pertama* alasan obyektif yaitu alasan perlunya pengelolaan kurikulum khususnya dalam proses belajar mengajar muatan lokal di SMK Negeri 1 Sukorambi Jember dalam perspektif otonomi daerah. *Kedua*, alasan subyektif peneliti di mana kemungkinan dari peneliti untuk meneliti permasalahan tersebut.

1. Alasan Obyektif

- a. Desentralisasi pendidikan menuntut kreatifitas pendidik dalam pengelolaan proses belajar mengajar, khususnya pada muatan lokal di

sekolah serta intensitas penilaian hasil pembelajaran dalam rangka peningkatan mutu pendidikan.

- b. Kurikulum muatan lokal dikembangkan dalam rangka menggali dan menyerap potensi lokal, agar para lulusannya mengerti benar tentang masyarakat dan lingkungan di mana mereka tinggal, serta mampu menyalurkan potensi daerahnya agar kehidupan masyarakat lebih sejahtera.
- c. Kesenjangan pendidikan dan dunia kerja sebagai akibat dari diberlakukannya sistem pendidikan sentralistik yang menjadikan kreativitas lembaga dan pendidik statis.
- d. Banyaknya pengangguran sebagai akibat tamatan sekolah dari jenjang dasar sampai pendidikan tinggi yang tidak dapat diserap dalam dunia kerja, karena tidak adanya *skill, knowledge dan ability* yang memadai sebagai bekal hidupnya.

2. Alasan Subyektif

- a. Judul tersebut sesuai dengan disiplin ilmu yang penulis tekuni, yaitu manajemen pendidikan.
- b. Adanya keinginan untuk mengembangkan ilmu yang didapat di STAIN Jember.
- c. Bersedianya dosen pembimbing untuk mengarahkan penelitian sampai skripsi ini selesai.
- d. Keterjangkauan peneliti dalam menggali data yang memungkinkan dapat bekerja sama dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan masalah ini.

C. Penegasan Judul

1. Pengelolaan Kurikulum

George R. Terry (dalam Ticoalu, 2001 : 1) mengatakan:

"Manajemen atau Pengelolaan adalah suatu proses atau kerangka kerja yang melibatkan bimbingan atau pengaruh suatu kelompok orang-orang ke arah tujuan-tujuan organisasional atau maksud-maksud yang nyata".

Jadi pengelolaan merupakan proses atau kegiatan merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi hal-hal tertentu untuk mencapai sesuatu yang menjadi tujuan.

Sedangkan Kurikulum dalam penelitian ini diartikan sebagai serangkaian rencana pelajaran atau serangkaian tujuan yang dirumuskan dalam bentuk kemampuan dan pengetahuan yang harus dikuasai oleh siswa setelah mengikuti program pendidikan dalam satu-satun jenjang pendidikan.

Kurikulum SMK Negeri 1 Sukamahi Jember, mencakup serangkaian tujuan, materi pelajaran, proses belajar mengajar, dan evaluasi hasil belajar mengajar. Kurikulum dilaksanakan baik di lingkungan sekolah maupun di dunia usaha atau industri, dalam bentuk penyelenggaraan *day release* yaitu kesepakatan bersama dari enam hari belajar dalam seminggu, kapan di sekolah dan kapan di perusahaan, maupun *block release* yaitu kesepakatan bersama, berapa bulan peserta didik berada di perusahaan.

Di sini peneliti hanya akan membahas salah satu dari komponen kurikulum di atas, yang urgen dalam menentukan hasil dari suatu bahan yaitu

proses belajar mengajar. Proses belajar mengajar merupakan kegiatan yang dilakukan oleh guru dan peserta didik dalam situasi edukatif.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan, bahwa Pengelolaan Kurikulum SMK Negeri 1 Sukorambi Jember difokuskan pada pengelolaan proses belajar mengajar, yaitu suatu proses atau kegiatan yang dilakukan oleh guru mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan program tindak lanjut bagi pembelajaran peserta didik yang berlangsung dalam situasi edukatif untuk mencapai tujuan yaitu pembelajaran itu sendiri.

2. Otonomi Daerah

Otonomi Daerah dalam penelitian ini secara operasional dapat diartikan sebagai kewenangan yang diberikan oleh pusat kepada daerah untuk mengatur daerahnya sendiri. Artinya bahwa daerah dituntut untuk mandiri dalam mengatur dan mengurus semua keperluan rumah tangga daerah. Jadi daerah diharapkan dapat proaktif, inovatif dan kreatif dalam mengelola daerahnya.

Pasal 11 ayat 2 UU No. 22 Tahun 1999, menyebutkan bahwa kewenangan wajib yang harus dilaksanakan kabupaten atau kota, khususnya Kabupaten Jember antara lain, bidang pekerjaan umum, bidang kesehatan, bidang pendidikan dan kebudayaan, bidang pertanian, bidang perhubungan, bidang industri dan perdagangan dan penanaman modal, bidang lingkungan, bidang koperasi, bidang tenaga kerja, dan bidang penunjang.

Otonomi Daerah Jember berarti kewenangan yang diberikan oleh pusat kepada daerah Jember, yang mencakup 10 kewenangan wajib seperti

tersebut di atas untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan, pemberdayaan masyarakat serta pembangunan daerah Jember dengan prinsip demokratis, peran serta masyarakat, penernaan dan keadilan, dan dilaksanakan dengan memperhatikan potensi dan keberagaman masyarakat Jember. (Pemkab Jember, 2001:3)

Bidang pendidikan dan kebudayaan merupakan salah satu kewenangan daerah yang diberikan oleh pusat. Ini berarti lembaga pendidikan diberi ruang gerak yang luas, untuk dapat lebih kreatif dan inovatif dalam mengelola program pendidikan menjadi lebih efektif dan efisien. Sehingga tujuan lembaga pendidikan yang merupakan sub sistem dari tujuan pendidikan nasional, serta tujuan otonomi daerah itu sendiri dapat tercapai.

Jadi Pengelolaan Kurikulum di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Sukorambi Jember Dalam Perspektif Otonomi Daerah mempunyai arti, yakni proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kurikulum, khususnya proses belajar mengajar yang dilaksanakan di SMK Negeri 1 Sukorambi Jember, dilihat dari sudut pandang otonomi daerah. Yang mana prinsip otonomi daerah adalah kemandirian mengelola urusannya sendiri secara kreatif dan inovatif, untuk pencapaian efektifitas dan efisiensi.

D. Fokus Penelitian

1. Fokus Penelitian

Bagaimana Pengelolaan Kurikulum di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Sukorambi Jember Dalam Perspektif Otonomi Daerah Tahun Pelajaran 2003/2004

2. Sub Fokus Penelitian

- a. Bagaimana Perencanaan Proses Belajar Mengajar Muatan Lokal di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Sukorambi Jember Dalam Perspektif Otonomi Daerah Tahun Pelajaran 2003/2004.
- b. Bagaimana Pelaksanaan Proses Belajar Mengajar Muatan Lokal di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Sukorambi Jember Dalam Perspektif Otonomi Daerah Tahun Pelajaran 2003/2004.
- c. Bagaimana Evaluasi (penilaian) Proses Belajar Mengajar Muatan Lokal di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Sukorambi Jember Dalam Perspektif Otonomi Daerah Tahun Pelajaran 2003/2004.

E. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum Penelitian

Ingin mendeskripsikan pengelolaan kurikulum di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Sukorambi Jember dalam perspektif otonomi daerah tahun pelajaran 2003/2004.

2. Tujuan Khusus Penelitian

- a. Ingin mendeskripsikan perencanaan proses belajar mengajar muatan lokal di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Sukorambi Jember dalam perspektif otonomi daerah tahun pelajaran 2003/2004.
- b. Ingin menganalisis pelaksanaan proses belajar mengajar muatan lokal di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Sukorambi Jember dalam perspektif otonomi daerah tahun pelajaran 2003/2004.

- e. Ingin menguji evaluasi (penilaian) proses belajar mengajar muatan lokal di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Sukorambi Jember dalam perspektif otonomi daerah Tahun Pelajaran 2003/2004.

F. Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti

- a. Menambah wawasan pengetahuan dan pengalaman tentang penelitian dan penulisan karya ilmiah sebagai bekal untuk mengadakan penelitian atau perbaikan-perbaikan di masa mendatang.
- b. Menambah wawasan terhadap disiplin ilmu yang dimiliki dan yang berhubungan dengan masalah pengelolaan kurikulum yang dikaitkan dengan otonomi daerah.
- c. Memperkaya informasi pengetahuan yang jelas dan pengalaman yang menumbuhkembangkan wawasan logika tentang pengelolaan kurikulum dalam perspektif otonomi daerah.

2. Bagi Kepala Sekolah

- a. Dapat mengembangkan kualitas lembaga pendidikan dengan memberdayakan anggotanya agar kinerja anggota dapat dilaksanakan secara optimal.
- b. Dapat membawa visi dan misi sekolah sesuai dengan visi dan misi pendidikan nasional, serta sesuai dengan kehendak otonomi daerah.
- c. Dapat membaca perubahan sosial termasuk hal-hal yang berkaitan dengan pengembangan lembaga sekolah baik dari segi kurikulum maupun material.

3. Bagi Wala, Druan Kurikulum

- a. Mengunjungi kepekaan terhadap perubahan pasar dan masyarakat dalam mengembangkan kurikulum secara inovatif dan kreatif serta sesuai dengan standarisasi baik di tingkat lokal, nasional maupun internasional.
- b. Lebih dapat mengkoordinasikan segala kegiatan yang menyangkut pengembangan kurikulum.
- c. Dapat menganalisis secara tajam ketereapsian kurikulum sesuai dengan harapan dan tujuan lembaga dan daerah pada khususnya, serta bangsa dan negara pada umumnya.

4. Bagi Para Guru

- a. Dapat lebih meningkatkan kualitas proses belajar mengajar dengan inovasi dan kreatifitas dalam melaksanakan pembelajaran.
- b. Selalu berinisiatif dalam menambah dan mengembangkan ilmu pengetahuan untuk menunjang pelaksanaan pembelajaran yang efektif dan efisien sesuai dengan kemajuan jaman.

G. Metode dan Prosedur Penelitian

Dalam pelaksanaan penelitian ini, secara berturut-turut terbagi :

1. Pendekatan dan Rancangan Penelitian
2. Lokasi Penelitian
3. Subyek Penelitian
4. Data dan Sumber Data
5. Prosedur Pengumpulan Data

6. Analisa Data

Uraian dari langkah-langkah tersebut adalah :

1. Pendekatan dan Rancangan Penelitian

Penelitian ini berusaha untuk mendeskripsikan pengelolaan kurikulum khususnya dalam proses belajar mengajar muatan lokal di SMK Negeri 1 Sukorambi Jember dalam perspektif otonomi daerah tahun 2003 – 2004, oleh karena itu digunakan pendekatan kualitatif. Menurut Bogdan dan Biklen (dalam Khusnurridlo, 2001), penelitian kualitatif memiliki ciri-ciri : a) Penelitian kualitatif dilakukan pada latar alamiah (*the natural setting*) sehingga sumber data langsung dan peneliti merupakan instrumen kunci (*key instrument*), b) bersifat deskriptif yaitu menggambarkan situasi tertentu atau data yang dikumpulkan berbentuk kata-kata atau gambar dari angka, c) lebih memperhatikan proses ketimbang hasil atau produk semata, d) dalam menganalisa data cenderung secara induktif, dan e) makna merupakan soal esensial bagi penelitian kualitatif.

Melalui pendekatan kualitatif, peneliti dapat mengenai subyek secara mendalam karena adanya pelibatan langsung dengan subyek di lingkungan subyek. Pelibatan langsung ini dapat mengeksplorasi situasi, kondisi dan peristiwa mengenai pengelolaan proses belajar mengajar, baik mengenai perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi (penilaian) proses belajar mengajar muatan lokal di SMK Negeri 1 Sukorambi dalam perspektif Otonomi daerah tahun 2003-2004. Dengan demikian data yang terkumpul melalui percakapan dengan subyek tidak dapat dilakukan dengan metode kuantitatif.

Karena penelitian ini diarahkan untuk mengungkapkan peristiwa tentang pengelolaan kurikulum khususnya dalam proses belajar mengajar muatan lokal di SMK Negeri 1 Sukorambi dalam perspektif otonomi daerah tahun 2003-2004, maka dipandang tepat untuk digunakan rancangan studi kasus observasional dengan strategi studi kasus terpancang. Menurut Bogdan dan Biklen (dalam Khusnurridlo, 2001), rancangan penelitian berupa studi kasus (*case study*) berusaha mendeskripsikan suatu latar, obyek atau peristiwa tertentu secara rinci dan mendalam.

Proses penelitian ini dimulai dengan eksplorasi yang luas, kemudian dilanjutkan dengan pengumpulan data yang terseleksi dan terfokus dan akhirnya data tersebut dianalisis, sehingga dapat diperoleh kesimpulan yang komprehensif mengenai pengelolaan proses belajar mengajar dalam perspektif otonomi daerah.

2. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini kami mengambil lokasi penelitian di SMK Negeri 1 Sukorambi Jember. Pemilihan lokasi ini berdasarkan atas beberapa pertimbangan yang kami paparkan sebagai berikut :

Pertama, SMK Negeri 1 Sukorambi adalah salah satu dari enam Sekolah Menengah Kejuruan Negeri yang ada di Jember dan sesuai dengan kondisi masyarakat di Jember yang masih bersifat agraris. Ini bukan berarti SMK yang lain tidak sesuai dengan kondisi masyarakat, akan tetapi peneliti melihat dari segi geografis masyarakat Jember masih bersifat agraris. Untuk itu SMK pertanian menjadi pilihan peneliti.

Kebisa. Out put SMK Negeri 1 Sukramukti Jember telah banyak diketahui masyarakat lebih siap terjun di lapangan baik formal maupun informal sesuai dengan bidang yang ditekuni atau relevan dengan ilmu yang di dapat, dan pada out put sekolah umum.

Ketiga, kelebihan lokasi ini terdapat pada sistem pendidikan, yaitu menggunakan Pendidikan Sistem Ganda (PSG), yang merupakan kerjasama antara lembaga sekolah dengan dunia usaha dan industri dalam membentuk peserta didik menjadi tenaga kerja profesional tingkat menengah. Sekaligus mempunyai unit usaha bekerja sama dengan dunia usaha dan industri dengan hasil produksi yang dipasarkan di daerah Jember dan sekitarnya.

3. Subyek Penelitian

Penentuan sampel dalam hal ini menggunakan teknik yang lazim digunakan dalam penelitian kualitatif yaitu *purposive sampling* yang akan diimplementasikan melalui cara *tunnel*, dengan maksud untuk mengumpulkan data seluas-luasnya kemudian dipersempit dan dipertajam berdasarkan fokus penelitian. Informan kuncinya adalah wakil ketua urusan kurikulum, dan guru bidang studi.

Selain itu peneliti juga menggunakan *time sampling* yaitu penggunaan sampling waktu, ini dipandang penting karena akan mempengaruhi makna dan penafsiran berdasarkan konteks terhadap subyek dan kajian-kajian dilapangan. Pada saat peneliti menemui informan dan mengunjungi latar penelitian, maka penyesuaian waktu perlu dipertimbangkan guna memperoleh data yang diinginkan. Sebelum diadakan wawancara perlu

penentuan waktu yang tepat, sehingga tidak mengganggu pekerjaan informan yang diwawancarai.

4. Data dan Sumber Data

Data yang digali dalam penelitian ini adalah data tentang pengelolaan proses belajar mengajar muatan lokal dalam perspektif otonomi daerah, baik dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan evaluasi proses belajar mengajar.

Sumber data dalam penelitian ini berupa : a) sumber manusia, yaitu informan kunci: ketua urusan kurikulum dan guru bidang studi tertentu, b) sumber non manusia, terdiri dari dokumen dan catatan tentang fokus penelitian.

5. Prosedur Pengumpulan Data

Sejumlah teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 1) wawancara mendalam (indepth interview), 2) observasi partisipan, 3) studi dokumentasi.

Wawancara mendalam digunakan untuk memperoleh data tentang fokus penelitian, observasi partisipan dilaksanakan untuk mengamati peristiwa yang dilaksanakan oleh subyek penelitian. Studi dokumentasi, dilakukan untuk memperoleh data non manusia yang berkaitan dengan fokus penelitian.

6. Analisa Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif. Menurut Miles dan Huberman (dalam Khasanurridlo, 2001), tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk membuat gambaran secara sistematis

dan faktual, serta analisisnya dilakukan melalui tiga jalur yakni reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Dalam penelitian ini reduksi data dilakukan dengan cara memilah-milah data yang dibutuhkan atau sesuai dengan fokus penelitian dan data yang tidak diperlukan direduksi (dibuang).

Penyajian data dilakukan setelah data diperoleh selama penelitian kemudian dipaparkan. Penarikan kesimpulan atau verifikasi maksudnya adalah analisis data dilakukan secara terus menerus kemudian peneliti membuat kesimpulan.

Teknik analisis data menggunakan dua pendekatan yakni, analisis data di lapangan selama berlangsungnya pengumpulan data dan analisis setelah data terkumpul.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk memisahkan permasalahan yang lebih sempurna, maka perlu gambaran singkat tentang sistematika pembahasan. Dalam skripsi ini dibagi ke dalam empat bagian yaitu :

BAB I : Pendahuluan, memuat tentang latar belakang masalah, alasan pemilihan judul, penegasan judul, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode dan prosedur penelitian, sistematika pembahasan. Bab ini berfungsi untuk memperoleh gambaran umum tentang skripsi ini.

BAB II : Kerangka teoritik, memuat kajian tentang tinjauan teoritis yang meliputi kerangka teoritik tentang pengelolaan kurikulum, proses belajar mengajar dan otonomi daerah.

BAB III : Hasil-hasil penelitian, memuat secara rinci bukti-bukti, data, serta informasi hasil dari penelitian. Bab ini memuat tentang latar belakang obyek, paparan data, tema penelitian, temuan penelitian, pembahasan hasil, dan makna penelitian.

BAB IV : Kesimpulan dan saran-saran.

Pada bagian akhir skripsi ini disajikan daftar kepustakaan dan lampiran-lampiran.

BAB II

KERANGKA TEORITIK

A. Pengelolaan Kurikulum

1. Pengertian Pengelolaan Kurikulum

a. Pengertian Pengelolaan

Banyak pendapat tentang arti dari pengelolaan, salah satunya George R. Terry (dalam Tiasala, 2001: 1) mengatakan, "Manajemen atau Pengelolaan adalah suatu proses atau kerangka kerja yang melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang-orang ke arah tujuan-tujuan organisasional atau maksud-maksud yang nyata".

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa didalam manajemen terdapat fungsi-fungsi manajemen atau pengelolaan, menurut George R. Terry (dalam Sardjuli, 2001:32) adalah: *planning* (perencanaan), *organizing* (pengorganisasian), *actuating* (penggerakan), dan *controlling* (pengawasan).

Selain itu menurut *American Association Of School Administrators* (AASA) fungsi manajemen di antaranya meliputi *planning* (perencanaan), *organizing* (pengorganisasian), *motivating* (dorongan), *coordinating* (pengkoordinasian) dan *evaluating* (penilaian).

Dari kedua pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa fungsi manajemen meliputi tiga fungsi utama yaitu perencanaan (*planning*), pelaksanaan (*actuating*) dan evaluasi/penilaian (*evaluating*).

1) *Perencanaan (planning)*

Perencanaan adalah aktivitas atau kegiatan menyusun garis-garis besar yang luas tentang hal-hal yang akan dikerjakan dan cara-cara mengerjakannya untuk mencapai tujuan tertentu.

2) *Pelaksanaan (actuating)*

Pelaksanaan adalah proses melaksanakan hal-hal yang telah direncanakan sebelumnya dengan cara-cara tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

3) *Evaluasi /penilaian (evaluating)*

Evaluasi adalah proses pengukuran dan perbandingan dari pada hasil-hasil yang nyata dicapai dengan hasil-hasil yang seharusnya dicapai.

Dari pengertian di atas dapat diambil kesimpulan, bahwa pengelolaan adalah proses atau kegiatan merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi hal-hal tertentu untuk mencapai sesuatu yang menjadi tujuan.

b. *Pengertian Kurikulum*

Banyak pendapat dari para ahli pendidikan tentang pengertian kurikulum, seperti yang diungkapkan Hilda Tabo (dalam Nisution, 2003:2), yaitu sejumlah mata pelajaran atau mata kuliah di sekolah atau perguruan tinggi, yang harus ditempuh untuk mencapai suatu ijazah atau tingkat.

Pandangan di atas adalah pandangan yang sempit dan terbatas pada materi pendidikan saja. Sesuai dengan perkembangan jaman maka kurikulum juga mengalami perkembangan tidak hanya terfokus pada mata pelajaran saja akan tetapi memiliki makna yang lebih luas dan bermacam-macam. Sebagaimana dikatakan oleh salah satu pakar Harold B. Alpertus, (dalam Nasution, 2005:5), bahwa kurikulum tidak terbatas pada mata pelajaran saja, tetapi juga meliputi kegiatan-kegiatan lain, di dalam dan di luar kelas, yang berada di bawah tanggung jawab sekolah.

Dari pendapat di atas berarti kurikulum tidak hanya dipandang sebagai materi pelajaran di kelas saja akan tetapi lebih luas menyangkut kegiatan-kegiatan di luar kelas.

Berbeda dengan pendapat B. Othanel Smith yang memandang kurikulum sebagai sejumlah pengalaman yang secara potensial dapat diberikan anak agar mereka dapat berpikir dan berbuat sesuai dengan lingkungannya. (Nasution, 2003 : 5)

Penafsiran kurikulum di atas, kurikulum dapat kita tinjau dari berbagai segi :

Pertama, jika kurikulum dilihat sebagai produk, yakni sebagai hasil karya para pengembang kurikulum, biasanya dalam suatu panitia. Hasilnya dituangkan dalam bentuk buku atau pedoman kurikulum, yang misalnya berisi sejumlah pelajaran yang harus diajarkan.

Kedua, jika kurikulum dilihat sebagai program, yakni alat yang dilakukan oleh sekolah untuk mencapai tujuannya. Ini dapat berupa

mengajarkan berbagai mata pelajaran tetapi dapat juga mempengaruhi perkembangan siswa. Misalnya perkumpulan sekolah, pertandingan, pramuka, kopenasi dan lain-lain.

Ketiga, jika kurikulum dilihat sebagai hal-hal yang diharapkan akan dipelajari siswa, yakni pengetahuan, sikap dan ketrampilan tertentu. Apa yang diharapkan akan dipelajari tidak selalu sama dengan apa yang benar-benar dipelajari.

Keempat, kurikulum dapat dipandang sebagai pengalaman siswa, ketiga pandangan di atas berkenaan dengan perencanaan kurikulum sedangkan pandangan keempat ini mengenai apa yang secara aktual menjadi kenyataan pada tiap siswa. Ada kemungkinan, bahwa apa yang diwujudkan pada diri anak berbeda dengan apa yang diharapkan menurut rencana. (Nesution, 2003 : 9)

Dari pengertian kurikulum tersebut dapat disimpulkan bahwa kurikulum adalah serangkaian rencana pelajaran atau serangkaian tujuan yang dirumuskan dalam bentuk kemampuan dan pengetahuan yang harus dikuasai oleh siswa setelah mengikuti program pendidikan dalam suatu satuan jenjang pendidikan. Tujuan-tujuan ini dengan sendirinya akan merupakan kerangka bagi dipilihnya materi pelajaran yang harus dipelajari oleh siswa secara terencana dan sistematis untuk selanjutnya menjadi serangkaian kegiatan belajar mengajar yang perlu diikuti dan dialami oleh siswa.

Untuk itu dapat dinyatakan bahwa di dalam kurikulum harus terdapat hal-hal sebagai berikut:

- 1) Adanya materi pelajaran.
- 2) Adanya rumusan serangkaian tujuan yang harus diselesaikan dalam satu-satuan waktu tertentu.
- 3) Adanya proses kegiatan belajar mengajar.

Hal ini diperkuat oleh pendapat Alcanium Kaber (dalam Dimiyati, 1995 : 107), bahwa kurikulum merupakan sistem yang terdiri dari berbagai unsur yang saling berkaitan meliputi: tujuan, bahan pelajaran, proses belajar mengajar dan evaluasi atau penilaian. Dalam penelitian ini peneliti hanya memfokuskan pada proses belajar mengajar saja.

Dari uraian di atas dapat diambil sebuah pengertian dari pengelolaan kurikulum adalah suatu proses atau kegiatan merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi serangkaian rencana pelajaran atau serangkaian tujuan yang dirumuskan dalam bentuk kemampuan dan pengetahuan yang harus dikuasai oleh siswa setelah mengikuti program pendidikan dalam satu-satuan jenjang pendidikan untuk mencapai tujuan yang telah ditemukan oleh sekolah.

Sedangkan jenis kurikulum pendidikan di Indonesia secara garis besar terdiri dari :

1) Kurikulum Nasional

Kurikulum nasional adalah program pendidikan yang bersifat umum dan harus dipelajari oleh semua anak didik di tingkat nasional dan belum mengacu pada kebutuhan daerah tertentu, sehingga masih perlu penelaahan dan pengembangan lebih lanjut oleh sekolah.

2) Kurikulum Muatan Lokal

Kurikulum muatan lokal adalah program pendidikan yang isi dan media penyampaiannya dikaitkan dengan lingkungan alam, lingkungan sosial, dan lingkungan budaya serta kebutuhan pembangunan daerah yang perlu diajarkan kepada siswa. (Nurdin, 2002 : 62)

Jadi kurikulum muatan lokal di sini bertujuan untuk mempersiapkan murid agar memiliki wawasan yang mantap tentang lingkungannya serta sikap dan perilaku bernilai melestarikan dan mengembangkan sumber daya alam, kualitas sosial dan kebudayaan yang mendukung pembangunan nasional maupun daerah setempat.

2. Pengelolaan Proses Belajar Mengajar

Proses Belajar Mengajar adalah salah satu unsur atau komponen penting kurikulum yang menentukan hasil dari suatu bahan. Jadi proses merupakan pengolahan input menjadi out put. Out put yang berkualitas ditentukan oleh input yang diproses dengan cara yang profesional pula.

Sebelum membahas lebih lanjut peneliti akan menjelaskan arti dari proses belajar mengajar.

Menurut Moh. Lizer Usman (1990 : 1), proses belajar mengajar adalah : Suatu proses yang mengandung serangkaian perbuatan guru dan siswa atas dasar hubungan timbal balik yang berlangsung dalam situasi edukatif untuk mencapai tujuan tertentu. (Suryosubroto, 1997 : 19)

Selanjutnya dalam buku Pedoman Guru Pendidikan Agama Islam tahun Depdik RI (1999 : 1), "Belajar mengajar sebagai proses dapat mengandung dua pengertian yaitu rentetan atau fase dalam mempelajari sesuatu, dan dapat pula berarti sebagai rentetan kegiatan perencanaan oleh guru, pelaksanaan kegiatan sampai evaluasi dan program tindak lanjut".

Dari kedua pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa proses belajar mengajar meliputi kegiatan yang dilakukan guru mulai dari perencanaan, pelaksanaan kegiatan sampai dengan evaluasi dan program tindak lanjut yang berlangsung dalam situasi edukatif untuk mencapai tujuan tertentu yaitu pembelajaran.

Proses belajar mengajar merupakan inti dari proses pendidikan formal dengan guru sebagai pemegang peranan utama. Dalam proses belajar mengajar sebagian besar hasil belajar peserta didik ditentukan oleh peranan guru. Guru yang kompeten akan lebih mampu menciptakan lingkungan belajar efektif dan akan lebih mampu mengelola proses belajar mengajar, sehingga hasil belajar siswa berada pada tingkat yang optimal. Jadi

keberhasilan proses belajar mengajar sangat ditentukan oleh kemampuan guru dalam mengelola proses belajar mengajar.

Kemampuan guru dalam mengelola proses belajar mengajar meliputi kemampuan merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi proses pembelajaran.

a. Kemampuan Merencanakan Pembelajaran

Pada hakikatnya bila suatu kegiatan direncanakan terlebih dahulu, maka tujuan dan kegiatan tersebut akan lebih terarah dan lebih berhasil. Itulah sebabnya seorang guru harus memiliki kemampuan dalam merencanakan pembelajaran. Seorang guru sebelum mengajar hendaknya merencanakan program pembelajaran dan membuat persiapan pembelajaran yang hendak diberikan kepada peserta didik.

Perencanaan dapat bermanfaat bagi guru sebagai kontrol terhadap diri sendiri agar dapat memperbaiki cara pengajarannya sehingga dengan perencanaan maka pelaksanaan pembelajaran menjadi lebih baik dan efektif, sedangkan murid harus dijadikan pedoman setiap kali membuat persiapan mengajar. Kemampuan dalam perencanaan pembelajaran meliputi:

1) Menguasai GBPP

Program pembelajaran merupakan seperangkat rencana bahan pembelajaran yang digunakan sebagai pedoman pembelajaran. Program pembelajaran tersebut tertuang dalam GBPP yang di dalamnya memuat tujuan, bahan dan program.

Sebelum tampil di depan kelas, guru harus menguasai bahan atau materi pelajaran yang akan diajarkan kepada siswa dan bahan pelajaran yang mendukung jalannya proses belajar mengajar. Syamsuar Mochtar (dalam Suryoubroto, 1997 : 29) menjelaskan bahwa kegiatan belajar mengajar di sekolah pada hakikatnya merupakan perwujudan pelaksanaan program pengajaran yang telah digariskan dalam kurikulum, khususnya GBPP. Oleh karena itu sebelum melaksanakan kegiatan belajar mengajar, guru harus memahami benar isi dari GBPP tersebut, yang meliputi tujuan kurikuler, tujuan instruksional, serta materi/ bahan pelajaran yang diajarkan.

a) Tujuan Kurikuler

Tujuan kurikuler adalah tujuan bidang studi atau mata pelajaran yang mencerminkan hakikat keilmuan yang ada di dalam bidang studi itu. (Nurdin, 2002 : 53)

Jadi tujuan kurikuler merupakan rumusan kemampuan yang diharapkan dapat dimiliki anak didik setelah menyelesaikan atau mempelajari suatu bidang studi.

b) Tujuan Instruksional

Tujuan instruksional adalah perumusan tentang tingkah laku atau kemampuan-kemampuan yang kita harapkan dapat dimiliki oleh siswa setelah mengikuti pelajaran-pelajaran yang diberikan.

Tujuan instruksional menurut Nurdin (2002 : 54) dibagi menjadi :

(1) Tujuan Instruksional Umum

Tujuan instruksional umum juga di sebut tujuan pembelajaran umum, tujuan ini lebih menggambarkan kemampuan yang lebih umum dan luas sifatnya.

(2) Tujuan Instruksional Khusus

Tujuan Instruksional Khusus juga dapat disebut tujuan pembelajaran khusus yaitu tujuan yang lebih menggambarkan kemampuan yang operasional dan spesifik, terbatas dan dapat diukur, atau kemampuan, ketrampilan dan sikap yang harus dimiliki oleh siswa manakala ia selesai mengikuti suatu program pelajaran.

c) Materi/bahan pelajaran

Materi pelajaran adalah isi dari materi pelajaran yang diberikan kepada siswa sesuai dengan kurikulum yang digunakan.

2) Menyusun Analisis Materi Pelajaran

Analisis Materi Pelajaran adalah hasil dari kegiatan yang berlangsung sejak seorang guru mulai meneliti isi GBPP kemudian mengkaji materi dan menjabarkannya serta mempertimbangkan penyajiannya. Analisis materi pelajaran merupakan salah satu bagian dari rencana kegiatan belajar mengajar yang berhubungan erat dengan materi pelajaran dan strategi penyajiannya.

Adapun fungsi analisis materi pelajaran sebagai acuan untuk menyusun program pengajaran yaitu program tahunan, program semester, dan rencana pengajaran. (Usman, 1999 : 52)

3) Menyusun Program Tahunan

Program tahunan merupakan program umum setiap mata pelajaran untuk setiap kelas, yang dikembangkan oleh guru mata pelajaran yang bersangkutan. Program ini perlu dipersiapkan dan dikembangkan oleh guru sebelum tahun ajaran, karena merupakan pedoman bagi pengembangan program-program berikutnya, yakni program semester, program tahunan dan program harian atau program pembelajaran setiap pokok bahasan. (Usman, 1999 : 54)

4) Menyusun Program Semester

Program semester berisikan garis-garis besar mengenai hal-hal yang hendak dilaksanakan dan dicapai dalam semester tersebut. Program semester ini merupakan penjabaran dari program tahunan. Pada umumnya program semester ini berisikan tentang bulan, pokok bahasan yang hendak disampaikan, waktu yang direncanakan dan keterangan-keterangan. (Mulyasa, 2003 : 98)

5) Menyusun Program Modul

Program modul atau pokok bahasan pada umumnya dikembangkan dari setiap kompetensi dan pokok bahasan yang akan disampaikan. Program ini merupakan penjabaran dari program semester. Pada umumnya modul berisikan tentang lembar kegiatan peserta didik,

lembar kerja, kunci lembar kerja, lembar soal, lembar jawaban dan kunci jawaban. Dengan demikian, peserta didik bisa belajar mandiri, tidak harus selalu didampingi oleh guru. Kegiatan guru cukup menyiapkan modul, dan harus membantu peserta didik yang menghadapi kesulitan belajar.

(Mulyasa, 2003 : 98)

6) Program Mingguan dan Harian

Untuk membantu kemajuan belajar peserta didik, di samping modul perlu dikembangkan program mingguan dan harian. Program ini merupakan penjabaran dari program semester dan program modul. Melalui program ini dapat diketahui tujuan-tujuan yang telah dicapai dan yang perlu diulang, bagi setiap peserta didik. Melalui program ini juga diidentifikasi kemajuan belajar setiap peserta didik yang mendapat kesulitan dalam setiap modul yang dikerjakan, dan peserta didik yang memiliki kecepatan belajar di atas rata-rata kelas. Bagi peserta didik yang memiliki kecepatan dalam belajar bisa diberikan pengayaan, sedang bagi yang lambat dilakukan pengulangan modul untuk mencapai tujuan yang belum dicapai dengan menggunakan waktu cadangan. (Mulyasa, 2003 : 99)

7) Program pengayaan dan remedial

Program ini merupakan pelengkap dan penjabaran dari program mingguan dan harian. Berdasarkan hasil analisis terhadap kegiatan belajar, dan terhadap tugas-tugas modul, hasil tes, dan ulangan dapat diperoleh tingkat kemampuan belajar setiap peserta didik. Hasil analisis ini dipadukan dengan catatan-catatan yang ada pada program mingguan dan harian, untuk

digunakan sebagai bahan tindak lanjut proses pembelajaran yang telah dilaksanakan. Program ini juga mengidentifikasi modal yang perlu diulang, peserta didik yang wajib mengikuti remedial, dan yang mengikuti program pengayaan. (Mulyasa, 2003 : 99)

8) Menyusun Rencana Pembelajaran

Rencana pembelajaran merupakan salah satu bagian dari rencana kegiatan belajar mengajar untuk setiap tatap muka. Berfungsi sebagai acuan bagi guru dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar setiap pertemuan dan dapat digunakan untuk meningkatkan mutu kegiatan belajar mengajar. Rencana pembelajaran minimal memuat tujuan pembelajaran khusus, materi pelajaran yang esensial dan kegiatan pembelajaran. (Depdikbud, 1997 : 12)

9) Menyiapkan Lembar Kegiatan Siswa (LKS)

Lembar Kerja Siswa merupakan salah satu bagian dari proses belajar mengajar yang harus diisi oleh peserta didik. Ini berfungsi sebagai salah satu sarana belajar menunjang keberhasilan kegiatan belajar siswa baik di kelas, di laboratorium maupun di lapangan. Dengan LKS diharapkan siswa termotivasi untuk menemukan sendiri konsep, pengertian dan penerapannya. (Depdikbud, 1997 : 14)

b. Kemampuan Melaksanakan Pembelajaran

Yang dimaksud dengan melaksanakan pembelajaran atau proses belajar mengajar adalah proses berlangsungnya belajar mengajar di kelas yang merupakan inti dari kegiatan pendidikan di sekolah. Pendapat ini didukung oleh Winarno Surachmad (dalam Suryosubroto, 1997 : 36) bahwa pelaksanaan

pembelajaran adalah interaksi guru dan murid dalam rangka menyampaikan bahan pelajaran kepada siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran.

Pembelajaran pada hakikatnya adalah proses interaksi antara peserta didik dengan lingkungannya, sehingga terjadi perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Dalam interaksi tersebut banyak sekali yang mempengaruhinya, baik dari faktor internal yaitu datang dari diri sendiri, maupun faktor eksternal yang datang dari lingkungannya.

Dalam pembelajaran, tugas guru yang paling utama adalah mengkondisikan lingkungan agar dapat menunjang terjadinya perubahan perilaku pada peserta didik. Umumnya pelaksanaan pembelajaran mencakup tiga hal: menurut Nana Sudjana (1987 : 148) terdiri dari tahap pra-instruksional, tahap instruksional dan tahap evaluasi atau tindak lanjut. Hal ini didukung oleh pendapat Mulyasa (2003 : 100) yang pada intinya atau maksudnya adalah sama hanya istilah yang digunakan berbeda yaitu pelaksanaan pembelajaran meliputi pre tes, proses dan post tes. Ketiga hal tersebut dijelaskan sebagai berikut :

1) Pre Tes (Tes Awal)

Pre tes atau tahap pra-instruksional adalah tahap yang ditempuh pada saat memulai suatu proses belajar mengajar pre tes ini mempunyai banyak kegunaan dalam menajagi proses belajar mengajar yang akan dilaksanakan. Oleh karena itu pre tes memegang peranan penting dalam proses pembelajaran. Fungsi urgen tersebut antara lain :

- a) Untuk menyiapkan peserta didik dalam proses belajar mengajar, karena dengan pre tes maka pikiran mereka akan terfokus pada soal-soal yang harus mereka jawab/kerjakan.
- b) Untuk mengetahui tingkat kemajuan peserta didik sehubungan dengan proses pembelajaran yang dilakukan. Hal ini dapat dilakukan dengan membandingkan hasil pre tes dengan post tes.
- c) Untuk mengetahui kemampuan awal yang telah dimiliki peserta didik mengenai bahan ajaran yang akan dijadikan topik dalam proses pembelajaran.
- d) Untuk mengetahui dari mana seharusnya proses pembelajaran dimulai, tujuan-tujuan mana yang telah dikuasai peserta didik dan yang perlu mendapat perhatian dan perhatian khusus. (Mulyasa, 2003 : 100)

Sedangkan tahap-tahap operasional yang ditempuh pada saat memulai suatu proses belajar mengajar antara lain

- a) Guru menanyakan kehadiran siswa dan mencatat siswa yang tidak hadir.
- b) Bertanya kepada siswa sampai di mana pembaharuan sebelumnya.
- c) Memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya mengenai bahan pelajaran yang belum dikuasainya, dari pelajaran yang sudah disampaikan.
- d) Mengajukan pertanyaan kepada siswa berkaitan dengan bahan yang sudah diberikan.

- c) Mengalir dalam pelajaran yang lain secara singkat tetapi mencakup semua aspek bahan. (Suryanahroto, 1997: 36)

Jadi dapat disimpulkan bahwa pre tes ini merupakan tahap awal guru sebelum menyampaikan materi yang akan diberikan. Tahap ini merupakan tahap dalam membuka pelajaran. Dalam membuka pelajaran seorang guru harus berusaha menciptakan kondisi awal yang menyenangkan yaitu dengan menciptakan semangat dan kesiapan belajar serta menciptakan suasana demokrasi dalam belajar, agar minat dan perhatian siswa terpusat pada apa yang dipelajarinya, juga mendorong siswa untuk kreatif. Sehingga usaha yang dilakukan oleh guru tersebut memberikan efek positif terhadap perkembangan potensi peserta didik dalam kegiatan belajar mengajar.

2) Proses

Proses di sini dimaksudkan sebagai kegiatan inti pembelajaran atau tahap pemberian bahan pelajaran kepada anak didik, misalnya bagaimana tujuan-tujuan belajar direalisasikan melalui modul. Proses pembelajaran perlu dilakukan dengan tenang dan menyenangkan, hal tersebut menuntut aktifitas dan kreatifitas guru dalam menciptakan lingkungan kondusif. Proses pembelajaran dikatakan efektif apabila seluruh peserta didik terlibat secara aktif, baik mental, fisik maupun sosialnya.

Tahap-tahap atau kegiatan dalam proses pembelajaran adalah :

- a) Menjelaskan kepada siswa tujuan pembelajaran yang harus dicapai.
- b) Menjelaskan pokok materi yang akan dibahas.
- c) Membahas pokok materi yang sudah dituliskan.

- d) Pada setiap pokok materi yang dibahas sebaiknya diberikan contoh-contoh yang konkret, pertanyaan dan tugas.
- e) Penggunaan alat bantu pengajaran untuk memperjelas pembahasan pada setiap materi pelajaran.
- f) Menyimpulkan hasil pembahasan dari semua pokok materi.

(Suryosubroto, 1997 : 57)

Jadi dapat disimpulkan bahwa tahap ini merupakan tahap penyampaian materi pelajaran. Dalam menyampaikan materi pelajaran atau inti dalam pembelajaran, yang diperhatikan guru adalah tujuan pembelajaran, urgensi bahan, nilai kegunaan dan terbatasnya sumber bahan, sehingga murid dapat lebih mengerti maksud dari materi.

Guru juga harus dapat menggunakan metode mengajar yang merupakan salah satu cara dalam mengadakan hubungan dengan siswa pada saat berlangsungnya pembelajaran, sehingga interaksi antara guru dengan siswa lebih edukatif. Untuk itu guru harus dapat memilih metode pembelajaran yang sesuai dengan tujuan, selain dapat menumbuhkan kegiatan belajar siswa, juga harus dapat menggunakan metode itu secara variatif dan kombinatif.

Selain itu juga perlu menggunakan alat peraga yang merupakan alat bantu guru dalam menciptakan proses pembelajaran yang efektif, mempercepat proses belajar mengajar dan membantu siswa dalam menangkap pengertian yang diberikan guru. Setelah materi disampaikan,

maka guru dapat menyimpulkan pokok-pokok dari materi yang baru dibahas.

Di samping itu, guru harus dapat menggunakan media pembelajaran sebagai alat yang mampu mengkomunikasikan pesan sekaligus memberi motivasi kepada peserta didik. Media dapat berupa perangkat keras dan lunak atau kombinasi keduanya seperti: TV, Video cassettes, slide dan lain sebagainya. (Nurdin, 2002 : 97)

3) Post Tes

Pada umumnya pelaksanaan pembelajaran diakhiri dengan post tes. Sama dengan pre tes, post tes juga memiliki kegunaan, antara lain:

- a) Untuk mengetahui tingkat penguasaan peserta didik terhadap kompetensi yang telah di tentukan, baik secara individu maupun kelompok. Hal ini dapat diketahui dengan membandingkan antara hasil pre tes dengan post tes.
- b) Untuk mengetahui kompetensi dan tujuan-tujuan yang dapat dikuasai oleh peserta didik, serta kompetensi dan tujuan-tujuan yang belum dikuasainya. Sehubungan dengan kompetensi dan tujuan yang belum dikuasai, apabila terjadi pada sebagian besar maka perlu dilakukan pembelajaran kembali (*remedial teaching*)
- c) Untuk mengetahui peserta didik yang perlu mengikuti kegiatan remedial dan yang perlu mengikuti pengayaan, serta untuk mengetahui tingkat kesulitan dalam mengerjakan modul atau kesulitan belajar.

- d) Sebagai bahan acuan untuk melakukan perbaikan terhadap komponen-komponen modul dan proses pembelajaran yang dilaksanakan, baik terhadap perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi. (Mulyasa, 2003 : 102)

Secara umum kegiatan yang perlu dilakukan antara lain:

- a) Mengajukan pertanyaan kepada peserta didik mengenai semua aspek yang dibahas.
- b) Apabila pertanyaan yang diajukan belum dapat dijawab oleh siswa (kurang dari 70%) maka pengajaran diulang.
- c) Untuk memperkaya pengetahuan siswa guru dapat memberi tugas.
- d) Akhiri pelajaran dengan memberikan pokok materi yang akan dibahas berikutnya. (Suryosubroto, 1997 : 38)

Jadi dapat disimpulkan bahwa post tes adalah tahap penutup dalam pelaksanaan proses belajar mengajar. Kegiatan akhir pembelajaran biasanya diikuti dengan kegiatan sebagai tindak lanjut pembelajaran. Menurut Agib (2002 : 58) tindak lanjut pembelajaran yaitu "Dengan melaksanakan penilaian akhir dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan atau tugas dan latihan-latihan tentang apa yang dipelajari saat itu". Sehingga dapat diperoleh informasi tentang tingkat kefahaman siswa dari apa yang didapat pada pelajaran tersebut. Kemudian mengkaji hasil penilaian tersebut dan mengemukakan topik bahasan yang akan datang. Dan yang terakhir menutup pembelajaran.

Dan yang perlu diingat ketika pelaksanaan belajar mengajar berlangsung dilakukan dengan hubungan interaktif antara guru dan siswa. Interaksi guru dengan siswa ini mulai dari pre tes sampai post tes diharapkan efektif dan mampu mengkonduksikan kelas.

c. Kemampuan Mengevaluasi (Pelaksanaan Penilaian) Pembelajaran

Untuk dapat menentukan tercapai atau tidak tujuan pembelajaran, maka perlu usaha dan tindakan atau kegiatan untuk menilai hasil belajar. Penilaian hasil belajar bertujuan untuk mengetahui tercapai atau tidak tujuan instruksional, untuk melihat kemajuan belajar peserta didik dalam hal penguasaan materi pembelajaran yang telah dipelajari sesuai dengan tujuan yang ditetapkan, juga dapat digunakan sebagai umpan balik bagi perbaikan proses belajar mengajar.

Mengingat pentingnya penilaian dalam menentukan kualitas pembelajaran, maka perlu diperhatikan prinsip penilaian sebagai berikut :

- 1) Dalam menilai hasil belajar hendaknya dirancang sedemikian rupa sehingga jelas abilitas yang harus dinilai, materi penilaian, alat penilaian dan interpretasi hasil penilaian.
- 2) Penilaian hasil belajar hendaknya menjadi bagian integral dari proses belajar mengajar. Artinya penilaian senantiasa dilaksanakan pada setiap saat proses belajar mengajar sehingga pelaksanaannya berkesinambungan.
- 3) Agar diperoleh hasil belajar yang obyektif dalam pengertian menggambarkan prestasi dan kemampuan siswa sebagaimana adanya.

penilaian harus menggunakan berbagai alat penilaian yang sifatnya komprehensif yaitu mencakup aspek kognitif, afektif dan psikomotorik.

- 4) Penilaian hasil belajar hendaknya diikuti dengan tindak lanjut yaitu data hasil penilaian dijadikan catatan khusus bagi guru untuk mengetahui kemajuan siswa selanjutnya. (Sudjana, 2004 : 9)

Evaluasi dalam proses belajar mengajar meliputi :

1) Evaluasi Formatif

Evaluasi Formatif menurut Arkanio yang dikutip Suryonobroto (1997 : 53) adalah "penilaian yang dilakukan oleh guru setelah satu pokok bahasan selesai dipelajari". Tes formatif dilaksanakan selama pembelajaran berlangsung. Penilaian ini berguna sebagai umpan balik, jadi dengan penilaian formatif ini diharapkan guru dapat memperbaiki strategi pelaksanaan proses belajar mengajar.

2) Evaluasi Sumatif

Evaluasi Sumatif adalah penilaian yang dilaksanakan pada akhir unit program, yaitu akhir semester dan akhir tahun. Tujuannya untuk melihat hasil yang dicapai siswa. Evaluasi sumatif memberikan tanda kepada siswa bahwa telah mengikuti suatu program. Penilaian ini berorientasi pada produk, bukan kepada proses. (Daryanto, 1999 : 47)

3) Evaluasi Diagnostik

Evaluasi diagnostik adalah penilaian yang bertujuan untuk melihat tingkat kesulitan siswa serta faktor penyebabnya. Penilaian ini dapat dilaksanakan pada waktu pembelajaran ketika guru akan memberikan

bertujuan atau pada waktu membagi kelas. Penilaian ini juga dilaksanakan untuk keperluan remedial teaching. (Daryanto, 1999 : 47)

4) Pelaporan Hasil Evaluasi

Setelah memberi evaluasi formatif dan sumatif, setiap akhir semester guru harus mengolah nilai akhir dan memsukkan dalam buku rapor, yang merupakan laporan hasil kerja sekolah pada orang tua/wali siswa. (Suryosubroto, 1997 : 54)

5) Pelaksanaan Program Perbaikan dan Pengayaan

Jika hasil evaluasi yang telah dilakukan kurang memenuhi syarat maka harus dilakukan perbaikan, sedangkan bagi yang sudah memenuhi syarat diadakan pengayaan.

Tujuan ulangan perbaikan adalah agar siswa memperoleh penguasaan yang baik terhadap tujuan instruksional khusus (TIK) yang harus dicapai. Bagi siswa yang sudah menguasai TIK, sekurangnya 75%, dapat diberikan pengayaan, apabila ada waktu untuk satuan pelajaran tertentu, sebelum beralih pada materi lain.

Program perbaikan dan pengayaan perlu diberikan dalam rangka pelaksanaan belajar tuntas. Ketuntasan adalah pencapaian taraf penguasaan minimal yang ditetapkan bagi setiap unit bahan pelajaran baik secara perorangan maupun kelompok. (Suryosubroto, 1997 : 56)

6) Penilaian Akhir Satuan Pendidikan Dan Sertifikasi

Pada setiap akhir semester dan tahun pelajaran diselenggarakan kegiatan penilaian guna mendapatkan gambaran secara utuh dan

menyeluruh mengenai ketuntasan belajar peserta didik dalam satu satuan waktu tertentu. Untuk keperluan sertifikasi, kinerja, dan hasil belajar yang dicantumkan dalam Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), jadi STTB tidak semata-mata didasarkan atas hasil penilaian pada akhir jenjang sekolah. (Mulyana, 2003 : 104)

Jadi sertifikasi yang diberikan kepada anak didik yang telah menyelesaikan masa studi dalam suatu waktu tersebut dijadikan laporan atas penguasaan keahlian tertentu, sehingga dapat diketahui bahwa anak tersebut menguasai keahlian dalam bidang tersebut.

Penilaian yang dilakukan terhadap proses belajar mengajar menurut Nana Sudjana (1989 : 111), bertujuan antara lain:

- 1) Untuk mengetahui tercapai tidaknya tujuan pembelajaran.
- 2) Untuk mengetahui efektifitas proses belajar mengajar yang dilakukan oleh guru. (Suryosubroto, 1997 : 55)

Jadi dapat disimpulkan dengan kedua fungsi ini diketahui tingkat penguasaan bahan pelajaran yang seharusnya dikuasai oleh peserta didik. Guru juga dapat mengetahui berhasil tidaknya ia mengajar. Jadi rendahnya hasil belajar bukan disebabkan siswa semata tetapi juga kurang berhasilnya guru mengajar, sehingga guru dapat menilai diri sendiri dalam usaha memperbaiki tindakan pembelajaran.

Secara operasional bahwa evaluasi atau penilaian hasil belajar dalam proses belajar mengajar meliputi beberapa tahap

1) Persiapan

Seperti halnya setiap kegiatan atau tindakan kependidikan selalu diawali dengan perencanaan atau persiapan, maka kegiatan evaluasi hasil belajar peserta didik juga harus diawali dengan persiapan.

Pada tahapan persiapan evaluasi hasil belajar ini menurut Brink (1992 : 13) seorang evaluator harus melalui tahap-tahap sebagai berikut :

- a) Menetapkan pertimbangan dan keputusan yang dibutuhkan,
- b) Menggambarkan informasi yang dibutuhkan, dan
- c) Menetapkan informasi yang sudah tersedia. (Dimiyati, 2002 : 209)

Jadi dapat disimpulkan bahwa seorang evaluator sebelum melaksanakan evaluasi harus mempertimbangkan yang sekiranya akan dibuat dari hasil evaluasi. Yaitu dengan merumuskan tujuan evaluasi itu sendiri serta mengjabarkan sasaran evaluasi. Juga harus dapat menggambarkan informasi yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut. Setelah itu menetapkan informasi yang sudah tersedia pada sumber-sumber informasi yang digunakan.

2) Penyusunan instrumen evaluasi

Instrumen evaluasi merupakan alat yang akan digunakan untuk mengevaluasi hasil belajar. Menurut Dimiyati (2002 : 210) bahwa instrumen evaluasi dapat di sebut juga dengan alat penilaian,

alat penilaian dapat berupa tes maupun non tes. Alat penilaian yang berupa tes harus melalui prosedur sebagai berikut :

- a) Menentukan bentuk tes yang akan disusun misal: tes benar salah, tes pilihan ganda, tes melengkapi, esai dan lain-lain.
- b) Membuat kisi-kisi soal, yakni kegiatan evaluator untuk membuat suatu tabel yang memuat tentang perincian aspek isi, perilaku beserta proporsi yang dikehendaki.
- c) Menulis butir soal, yakni kegiatan evaluator untuk menulis soal sesuai dengan kisi-kisi yang sudah dibuat.

Jadi yang perlu dilakukan dalam penyusunan instrumen evaluasi untuk menjadi soal ujian sebelum soal diberikan kepada peserta didik, yaitu bentuk tes, kisi-kisi soal dan menulis butir soal.

3) Pelaksanaan

Pelaksanaan dalam penilaian baik tes maupun non tes hampir sama, dengan memperhatikan prosedur sebagai berikut:

- a) Persiapan tempat pelaksanaan penilaian,
- b) Melancarkan penilaian,
- c) Menata dan mengadministrasikan lembar soal dan lembar jawaban siswa untuk memudahkan penskoran. (Diriyati,

2002 : 117)

Jadi dalam pelaksanaan penilaian yang perlu diperhatikan oleh evaluator adalah tempat yang memenuhi syarat dilaksanakannya

penilaian tersebut, melancarkan proses penilaian dengan peraturan untuk berdisiplin baik bagi evaluator ataupun bagi siswa itu sendiri.

4) Pengolahan hasil

Setelah penilaian dilakukan maka dihasilkan sejumlah data atau informasi yang dibutuhkan dalam evaluasi hasil belajar. Data dan informasi tersebut siap untuk diolah, menurut Dimiyati (2002: 218) pengolahan hasil belajar melalui prosedur sebagai berikut:

- a) Menskor, yakni kegiatan memberikan skor pada hasil penilaian yang dicapai oleh siswa,
- b) Mengubah skor mentah menjadi skor standar, yakni evaluator menghitung untuk mengubah skor yang diperoleh siswa,
- c) Mengkonversikan skor standar ke dalam nilai, yakni kegiatan akhir dari pengolahan hasil penilaian yang berupa mengubah skor ke nilai, baik berupa huruf maupun kata-kata.

Jadi dapat disimpulkan bahwa data melalui tes maupun non tes merupakan data mentah yang perlu untuk diolah lebih lanjut. Penilaian dengan teknik tes dapat berupa data kuantitatif, sedangkan teknik non tes dapat berupa data kualitatif maupun kuantitatif sekaligus.

5) Penafsiran hasil

Pengolahan hasil penilaian memberikan sejumlah skor standar dan nilai bagi setiap siswa, maka evaluator harus mampu

menafsirkan. Penafsiran hasil penilaian menurut Nurkancana (dalam Dimiyati, 2002 : 119) terdiri dari:

- a) penafsiran tentang tingkat kesiapan siswa untuk mengikuti pelajaran selanjutnya,
- b) penafsiran tentang kelemahan-kelemahan individual baik pada sub tes tertentu maupun satu atau keseluruhan dari mata pelajaran,
- c) penafsiran tentang kemajuan belajar individual pada satu periode kelas maupun sekolah.

Jadi dari hasil pengolahan nilai tersebut dapat ditafsirkan tingkat kesiapan, kelemahan dan kemajuan siswa sekaligus, untuk akhirnya dapat dilakukan tindak lanjut.

6) Pelaporan

Setelah proses dari perencanaan sampai pada penafsiran hasil evaluasi maka langkah selanjutnya adalah penyusunan atau pembuatan laporan. Pelaporan ini dimaksudkan untuk memberikan umpan balik kepada semua pihak yang terlibat dalam pembelajaran secara langsung maupun tidak langsung.

Menurut Arikunto (dalam Dimiyati, 2002 : 221) pihak-pihak yang perlu untuk memperoleh laporan tentang hasil belajar siswa di samping siswa itu sendiri, guru yang mengajar, guru lain, petugas sekolah, orang tua/wali siswa maupun pemakai lulusan.

II. Otonomi Daerah

Sebenarnya pola hubungan antara pusat dan daerah telah diatur sejak berdirinya Negara Kesatuan RI yang diperkuat dengan dikeluarkannya UU No. 5 tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintah di daerah. UU tersebut menyebutkan bahwa negara-negara Kesatuan RI dibagi ke dalam daerah-daerah otonom dan dilaksanakan dalam tiga pelaksanaan, yaitu asas desentralisasi, asas dekonsentrasi dan asas pembantuan. (Jalal, 2001, 122)

Pasal 2 UU tersebut juga menetapkan bahwa titik berat OTODA diletakkan pada Dati II yang pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Pemerintah. Adapun tujuan Otonomi kepada daerah adalah untuk memungkinkan daerah yang bersangkutan bisa mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Pelaksanaan OTODA sebagaimana dituangkan dalam UU No. 5 Th. 1974 ternyata kurang efektif bahkan dalam pelaksanaannya menemui banyak kendala, salah satunya adalah Pemerintah pusat cenderung menerapkan uniformitas pada semua daerah.

Uniformitas yang diterapkan oleh pusat tersebut di atas jelas sangat merugikan daerah, karena potensi lokal tidak bisa seoptimal mungkin diberdayakan. Uniformitas ini hanya mengabaikan kondisi geografis dan keragaman budaya masyarakat Indonesia. Sehingga akan banyak menimbulkan masalah, yang salah satunya adalah disintegrasi daerah.

Untuk itulah pada pelita ke VI pemerintah menegaskan kembali komitmennya untuk melaksanakan otonomi daerah dengan titik berat pada Dati II. Tetapi setelah berjalan selama tiga tahun, ternyata belum banyak hasil yang

diharapkan dari percontohan otonomi Dati II. Banyak persoalan-persoalan muncul dan justru menghambat pelaksanaan otonomi.

Dari keterangan di atas jelas bahwa pelaksanaan Otonomi pada Dati II percontohan yang dituangkan dalam UU No. 5 Th. 1974 dan PP. No.8 Th. 1995 tidak efektif, bahkan menambah masalah-masalah baru yang hanya meruntuhkan pelaksanaan otonomi tersebut.

Hal ini dapat disimpulkan bahwa daerah tidak mempunyai banyak ruang gerak dalam mengurus rumah tangganya sendiri, walaupun daerah diberi otonomi itu hanya sebuah formalitas saja, karena pada kenyataannya pusat tidak sepenuhnya (rela) menyerahkan sebagian urusan yang seharusnya menjadi hak dan tanggung jawab daerah.

Untuk itulah berbagai upaya terus dilakukan untuk menerobos kendala-kendala pelaksanaan otonomi daerah tersebut, yang kemudian dibahas secara sungguh-sungguh pada Sidang Istimewa MPR 1998. Hal ini juga dimaksudkan untuk mengakomodasi tuntutan-tuntutan masyarakat. Sidang Istimewa tersebut menghasilkan Ketetapan MPR RI No. XV/MPR/1999. Kebijakan ini antara lain mengatur kembali pola hubungan pemerintah pusat dan daerah yang berkeadilan serta memberi otonomi yang luas kepada daerah untuk membangun daerahnya dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketetapan MPR ini masih perlu penjabaran lebih lanjut dalam bentuk UU No. 22/1999 dan UU No. 25/1999.

I. Otonomi Daerah (UU. No. 22/1999 dan UU. No. 25/1999)

Prinsip Otonomi Daerah

- a. Otonomi Daerah adalah pemberian kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah secara proporsional dan yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian, pemanfaatan sumber daya nasional yang berimbang dan berkeadilan serta perimbangan pusat dan daerah. Otonomi daerah diselenggarakan atas dasar prinsip demokratisasi, peran serta masyarakat, pemerataan, keadilan, dengan tetap memperhatikan keberagaman dan potensi daerah. (UU. Nomor 22 tahun 1999)
- b. Pengaturan dan pengelolaan keuangan daerah didasarkan pada perimbangan keuangan pusat dan daerah yang berwujud pada sumber pendapatan daerah dan dana perimbangan. (UU. Nomor 25 Th 1999)

Paradigma Otonomi Daerah

"Otonomi daerah adalah meningkatkan partisipasi masyarakat lokal dalam mengatur urusannya sendiri". (Tilar, 2002 : 77)

Kebijakan otonomi daerah yang termuat dalam UU No. 22/1999 dan UU. No. 25/1999 tidak hanya menyangkut ruang lingkup penyelenggaraan pemerintahan saja, namun harus bisa mendorong berlangsungnya proses otonomi masyarakat di daerah.

Masyarakat otonom adalah masyarakat mandiri, yang dapat secara bebas menentukan sendiri pilihannya berdasarkan kebutuhan yang diperlukan dan dimuskan, seperti memilih kepala desa, memutuskan

kebijakan pembangunan daerah dan keputusan lainnya sesuai dengan
 kehutuban daerah. Kepala Dispendik Jember berpendapat sebagai berikut:

Salah satu syarat untuk menjadikan daerah otonom adalah adanya perubahan dalam tata pemerintahan pusat ke daerah, pemerintah pusat sebagai fasilitator. Ini berarti berlaku pada daerah otonom yaitu salah satu prasyarat untuk menciptakan kemandirian daerah adalah adanya perubahan dalam tata pemerintahan di daerah sehingga fungsi pemerintah daerah sebagai fasilitator masyarakat bisa optimal. Pemerintah daerah dalam hal ini pemerintah kabupaten harus meminimalisir fungsi pemerintah untuk kemudian secara tegas dan jelas lebih mengedepankan fungsi melayani dan membenarkan fasilitas pada usaha-usaha pemberdayaan masyarakat. (Kepala Dispendik Jember, w : 05-09-2003)

Pemerintah kabupaten seharusnya konsisten untuk mengikuti perubahan paradigma baru pemerintahan dalam melaksanakan setiap kebijakan, hal ini dimaknakan dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Tekad ini seharusnya terwujud dalam segala bidang dan diupayakan seoptimal mungkin agar bersama-sama dengan seluruh komponen masyarakat daerah mau mewujudkan misi otonomisasi yaitu kerdilan dan Kesejahteraan masyarakat daerah.

Kendala-kendala Pelaksanaan Otonomi Daerah

Pelaksanaan otonomi daerah saat ini juga tidak terlepas dari berbagai kendala seperti halnya kendala-kendala yang menimpa pelaksanaan otonomi daerah dalam UU No. 5 Th. 1974. Pada hampir semua daerah kabupaten ada beberapa fenomena kultural-politis, yang harus dicermati karena berpotensi besar menjadi kendala pelaksanaan otonomi daerah. Sebagian kendala tersebut juga menimpa pelaksanaan otonomi daerah di Jember. Kendala-kendala tersebut antara lain :

a. Partisipasi Masyarakat Rendah

Sebagaimana diutarakan oleh Kepala Dispendik Jember bahwa sebagian besar masyarakat kabupaten mempunyai persepsi bahwa otonomi daerah merupakan persoalan pemerintah daerah. Kondisi seperti ini berakibat pada rendahnya partisipasi masyarakat dan pemerintah kabupaten. Salah satu akibatnya adalah, dalam perencanaan dan pelaksanaan lainnya pemerintah kabupaten akan sibuk sendiri dan kurang mendapat dukungan dan kontrol dari masyarakat. Mereka tidak peduli pemerintah siap atau tidak, cenderung menunggu dan melihat apa yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah untuk melaksanakan otonomi daerah.

Bagi masyarakat, yang penting ada perubahan pada kinerja pemerintah sehingga masyarakat akan memperoleh pelayanan yang baik dan murah. Sikap menunggu ini akan sangat mengganggu pelaksanaan otonomi daerah karena sesungguhnya pelaksanaan ini akan sangat diuntungkan dengan adanya partisipasi masyarakat. (Kepala Dispendik Jember, w : 05-09-2003)

b. Sikap dan Mentalitas Penyelenggara Pemerintah Daerah

Penyelenggaraan pemerintah di daerah merupakan salah satu kunci penting keberhasilan pelaksanaan kebijakan otonomi daerah, karena merekalah ujung tombak dan eksekutor program tersebut.

Ada gejala cukup menonjol pada hampir semua pemerintah kabupaten bahwa sikap dan mentalitas aparatur masih menyisakan pengaruh kebijakan pemerintah yang sentralistik, sehingga mereka lebih baik menunggu dan kurang berani mengambil inisiatif dan prakarsa untuk melaksanakan fungsi pemerintah. Kondisi ini tentu saja tidak menguntungkan bagi pelaksanaan otonomi justru saat ini pemerintah

daerah difuntut kepeloporannya untuk mencapai keberhasilan pelaksanaan otonomi.

c. Penyeragaman

Salah satu ciri kebijakan sentralisme kekuasaan adalah kebijakan penyeragaman pada semua bidang kehidupan masyarakat. Penyeragaman ini telah melumpuhkan semua sendi keberagaman daerah.

Kepala Dispendik Jember berpendapat:

Akibat sistem sentralistik, banyak potensi yang tertutup dan tidak bisa berkerubang dengan baik. Dengan konteks kultur uniformitas ini pelaksanaan otonomi daerah menghadapi tantangan-tantangan yang berat dalam upaya penggalan dan pertambahan keberagaman dan potensi daerah. (Kepala Dispendik Jember, w : 05-09-2003)

d. Ketergantungan

Sentralistik telah merenggut hampir semua kekuasaan pemerintah daerah. Daerah tinggal memiliki kewenangan yang sedikit dan sekedar menjadi pelaksana kebijakan pusat.

Sebagaimana dikatakan oleh Kepala Dispendik Jember:

Daerah memiliki ketergantungan yang amat kuat dengan pusat. Kebijakan otonomi mencoba membalik semua hal tersebut. Tentu saja karena sudah berlangsung sangat lama, maka upaya tersebut akan memerlukan waktu yang cukup panjang, tidak bisa serta merta. (Kepala Dispendik Jember, w : 05-09-2003)

e. Kecenderungan Dominasi Kekuatan Oleh Pusat Dan Daerah

Ada kecenderungan kuat bahwa di sebagian kalangan pemerintah pusat dan juga pemerintah propinsi untuk bersikap setengah hati dalam menyerahkan kewenangan kepada pemerintah kabupaten.

Sesuai dengan pendapat Kepala Dispendik Jember:

Sikap dan mentalitas aparatur pemerintah tersebut berdampak pada proses pengalihan dan penyerahan kewenangan terutama secara psikologis birokratis, sehingga proses penyerahan kewenangan akan berlarut-larut dan mengulur jadwal pelaksanaan otonomi daerah di kabupaten. (Kepala Dispendik Jember, w : 05-09-2003)

Hal ini juga terjadi pada pelaksanaan otonomi daerah tahun 1974, yang mana pemerintah pusat masih kurang rela dalam menyerahkan sebagian kewenangan kepada daerah kabupaten. Sehingga otonomi daerah yang menyuarakan kemandirian daerah belum dapat dilaksanakan secara maksimal.

E. Sumber Daya Daerah dan Sistem Data Daerah

Kesiapan pemerintah kabupaten untuk segera menyelenggarakan kewenangan pemerintah sering terhambat oleh dirinya sendiri. Banyak kabupaten yang kurang memiliki sumber daya, atau kurang memiliki data tentang sumber daya dan potensi daerah.

Sumber daya daerah ini perlu untuk diadministrasikan sebagai upaya dalam pengalihan potensi dan pembangunan daerah. Sehingga daerah dalam melaksanakan pembangunan dapat lebih realistis dan sesuai dengan harapan masyarakat di daerah.

Bapak Sugarto mengatakan sebagai berikut:

Masih sedikit kabupaten yang mempunyai sumber data yang lengkap dan aplikatif. Data yang tersedia selama ini kurang diolah dan disajikan dan bahkan jarang dipakai sebagai salah satu dasar pengambilan keputusan dalam perumusan kebijakan daerah, sehingga banyak yang tidak relevan dan realistis. (Sugarto, w : 05-09-2003)

Kelemahan ini semakin terasa pada era otonomi daerah, yang menyaratkan semua kebijakan pembangunan daerah harus realistis, obyektif, dan relevan dengan kebutuhan dan kemampuan daerah.

Ternyata pelaksanaan otonomi daerah tidak semudah apa yang direncanakan karena semua perlu usaha semua pihak untuk ikut aktif dalam proses pelaksanaan otonomi daerah tersebut.

Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Jember

Kabupaten Jember dalam dekade terakhir telah menungulkan dirinya sebagai daerah perdagangan dan pendidikan. Indikasi tersebut ditandai dengan banyaknya jumlah sarana dan prasarana pendidikan dari jenjang dasar sampai perguruan tinggi, baik lembaga pendidikan formal maupun nonformal dan banyaknya sentra-sentra perdagangan. Akan tetapi meningkatnya kualitas dan kuantitas masyarakat terdidik tersebut, ternyata masih banyak masyarakat Jember yang berpendidikan rendah dan tingkat buta huruf yang relatif tinggi.

Sedangkan krisis ekonomi yang melanda hampir pada semua daerah termasuk Jember, yang menimbulkan banyaknya pengangguran baik pengangguran non terdidik maupun terdidik, sebagai dampak ketidakmampuan perangkat dan infra struktur ekonomi dan bisnis dalam upaya menampung lulusan lembaga pendidikan di daerah.

Di pihak lain, adanya permasalahan pengelolaan di bidang pendidikan, pada tahap berikutnya cenderung menurunkan kualitas

Sumber Daya Manusia (SDM), sehingga pemberdayaan yang dilakukan di bidang lain menjadi terkendala. (Pemkab Jember, 2001 : 20)

Kondisi tersebut di atas menjadi agenda dalam merencanakan pola dasar pembangunan di daerah khususnya bidang pendidikan sesuai dengan prinsip otonomi daerah. Pola Dasar Pembangunan Daerah

Kabupaten Jember memiliki visi dan misi sebagai berikut :

Visi yang ingin diwujudkan dalam Pola Dasar Pembangunan

Daerah Kabupaten Jember secara umum adalah :

Terwujudnya masyarakat Kabupaten Jember yang sejahtera, demokratis, berdaya dan berakhlak mulia yang didukung oleh suatu pemerintahan daerah yang adil, efektif, efisien, bersih, berwibawa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat". (Pemkab Jember, 2001 : 21)

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka salah satu misi yang akan diemban dalam Pola Dasar Pembangunan Daerah Jember adalah yang berhubungan dengan dunia pendidikan. Adapun misi dalam pelaksanaan Pola Dasar Pembangunan Daerah Jember dalam dunia pendidikan di Jember adalah :

Mewujudkan pemerataan pendidikan yang terjangkau oleh masyarakat dan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan ke seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Jember menuju masyarakat yang maju, berpotensi dan memiliki posisi tawar kuat di pasar tenaga kerja". (Pemkab Jember, 2001 : 32)

Sedangkan untuk mengaplikasikan misi yang diemban dalam Pola Dasar Pembangunan Daerah Jember khususnya dalam bidang pendidikan tersebut, maka perlu direncanakan program pendidikan yang

salah satunya adalah peningkatan kemampuan profesional tenaga pendidikan dan pengembangan kurikulum muatan lokal yang berorientasi masa depan, budi pekerti luhur, berwawasan iman dan taqwa serta ilmu dan teknologi agar mampu memenuhi permintaan pasar tenaga kerja. (Pemkab Jember, 2001 : 60)

Perencanaan Strategi Pemerintah Kabupaten Jember

Perencanaan Strategi Pemerintah Kabupaten Jember merupakan jharan secara fungsional Pola Dasar Pembangunan Daerah, sesuai dengan fungsi dan wewenangnya sebagai badan eksekutif daerah. Rencana strategi hakikatnya dimaksudkan untuk merealisasikan maktud pemberian otonomi daerah seperti dalam visi Pola Dasar Pembangunan Daerah Jember, yaitu peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan dan pemerataan, pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penyelenggaraan otonomi daerah menekankan pada prinsip demokrasi serta peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.

Dalam rangka mewujudkan pemberian otonomi daerah, perlu dilakukan secara terencana, komprehensif dan terpadu yang tertuang dalam suatu Perencanaan Strategik (RENSTRA). Hal ini sesuai dengan Inpres No. 7 Tahun 1999 menyebutkan : "Perencanaan strategik

merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1-5 tahun, dengan mempertimbangkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul". Sedangkan ruang lingkup Renstra dalam PP. No. 108 Tahun 2000 memuat visi, misi, tujuan umum, arah kebijakan program dan kegiatan. Dengan demikian Renstra menjadi pedoman dan arah kebijakan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan fungsi pelayanan, pemberdayaan dan pembangunan masyarakat dalam kurun waktu lima tahun kedepan.

Pasal 11 ayat 2 UU No. 22 Tahun 1999 menyebutkan bahwa salah satu wewenang pemerintah yang harus dilaksanakan oleh kabupaten/kota adalah pendidikan dan kebudayaan. Oleh karena Kabupaten Jember dalam rangka menuju Otonomi Daerah harus mampu menyusun perencanaan strategik di bidang pendidikan tersebut.

Hasil-hasil pembangunan di bidang pendidikan Kabupaten Jember selama pembangunan jangka panjang satu relatif mengagumkan, namun sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia guna menopang pembangunan secara keseluruhan belum sepenuhnya mengembirakan. Karena itu, perencanaan strategik di bidang pembangunan pendidikan perlu dirumuskan lebih tajam terutama dalam rangka mengembangkan iklim belajar dan mengajar yang dapat menumbuhkan rasa percaya diri serta sikap dan perilaku yang inovatif dan kreatif. (Pemkab Jember, 2000 : 3)

Pendidikan merupakan salah satu sub sistem untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia. Untuk menghasilkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan, hal ini membutuhkan waktu yang relatif lama, untuk itulah memerlukan pendekatan-pendekatan, salah satunya pendekatan strategik yaitu pendekatan yang digunakan untuk memilih alternatif rancangan yang paling menguntungkan dan efisien dalam mencapai peran dan target yang telah ditetapkan. Sedangkan target yang ingin dicapai Kabupaten Jember secara umum adalah *Pembangunan Ekonomi*, dengan memperkokoh perekonomian masyarakat yang mengarah pada demokrasi ekonomi bagi terwujudnya kemakmuran rakyat.

Kebijakan strategik Kabupaten Jember dalam bidang pendidikan adalah memperluas kesempatan memperoleh pendidikan dan peningkatan mutu pendidikan yang makin merata melalui program kegiatan peningkatan mutu pendidikan di Jember. (Pemkab Jember, 2001 : 46)

2. Desentralisasi Pendidikan

Belajar dari perjalanan pengalaman selama ini, banyak masalah berat yang dihadapi oleh kesalahan sistem pemerintahan sentralistik. Salah satu bidang yang menjadi persoalan dari era sentralistik dan yang saat ini menjadi kewenangan wajib bagi otonomi daerah adalah masalah sistem pendidikan.

Pasal 11 ayat 2 UU No. 22 Tahun 1999 menyebutkan bahwa salah satu wewenang pemerintah yang harus dilaksanakan oleh kabupaten/kota

adalah pendidikan dan kebudayaan. Pendidikan merupakan faktor utama bagi kemajuan bangsa menuju masyarakat adil dan makmur. Tetapi dalam kenyataannya, di Indonesia masih banyak masalah yang dihadapi dalam sistem pendidikan sehingga dampak positifnya masih belum dapat terbukti secara meyakinkan bagi kehidupan bangsa, bahkan dapat dikatakan masih meragukan. Sistem pendidikan nasional sebagaimana dikatakan oleh Tiluar (2002 : 58) masih menghadapi berbagai masalah baik makro maupun mikro.

Berbagai masalah yang meragukan seperti permasalahan kurikulum dan tenaga kependidikan terutama guru masih belum terpecahkan. Berbagai masalah ini akan bermuara pada rendahnya mutu dan kinerja sistem pendidikan. Ini berarti merupakan agenda reformasi yang pada era otonomi daerah berusaha untuk dapat diwujudkan.

Perbedaan yang sangat urgen antara sistem sentralistis dan desentralistis tersebut di atas adalah pada pengambilan keputusan. Sistem sentralistis adalah serba terpusat dan memiliki ketergantungan tinggi terhadap kebijakan di tingkat pusat.

Konsekuensi logis dari sifat ketergantungan itu menurut Bastian (2002 : 103-104) akan menimbulkan dua akibat yaitu : (1) jika kebijakan itu baik dan bisa dijalankan dengan baik pula oleh lembaga-lembaga pendidikan maka kualitas layanan masing-masing lembaga akan sama sehingga akan menghasilkan out put yang kurang lebih sama pula. Dengan kata lain tidak ada perbedaan yang signifikan pada setiap lembaga. (2) sebaliknya apabila

kebijakan itu jelek atau keliru maka seluruh komponen lembaga pendidikan akan mengalami kekeliruan juga.

Padahal dalam kenyataannya, masing-masing lembaga mempunyai keunikan yang sangat signifikan, terutama pada segi kualitas sumber daya manusia, sumber daya alam, kondisi geografis budaya dan sebagainya.

Dari sini jelas bahwa sistem sentralisasi sudah harus diganti dengan sistem yang lebih memandirikan dan mengembangkan potensi yang dimiliki, sistem tersebut baru bisa digantikan di era otonomi daerah ini yaitu sistem desentralisasi pendidikan.

Sistem pendidikan yang desentralistis adalah sistem pendidikan demokratis yang memberikan ruang yang lebih besar kepada lembaga penyelenggara pendidikan dan masyarakat untuk berperan dengan lebih nyata. Demokratisasi pendidikan juga memungkinkan terbukanya peluang yang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan. Hal ini dikuatkan dengan pendapat Tilaar (2002 : 59) bahwa konsep demokratisasi pendidikan ini memberikan ruang publik yang cukup luas, sehingga masyarakat dapat mengambil peranan aktif dalam penyelenggaraan pendidikan.

Demokratisasi pendidikan menjadi kian relevan untuk menjawab tuntutan desentralisasi dan otonomi daerah. Seperti halnya desentralisasi dan otonomi di bidang administrasi pemerintahan, sebagian besar kewenangan penyelenggaraan pendidikan bergeser dari pusat ke daerah, bahkan ke institusi pelaksana pendidikan. Gagasan desentralisasi pendidikan ini sejalan

dengan kebijakan desentralisasi di bidang administrasi pemerintahan, yang memberikan kewenangan yang lebih besar (otonomi) kepada daerah kabupaten untuk mengurus rumah tangga daerah sendiri.

Desentralisasi pendidikan harus senantiasa diterapkan dalam kerangka sistem pendidikan nasional sebagai wahana untuk memelihara persatuan dan kesatuan bangsa serta untuk meningkatkan daya saing bangsa. Dengan demikian desentralisasi pendidikan tidak akan menguraikan pada disintegrasi. Dalam konteks demikian standar kompetensi pendidikan tetap dirumuskan secara nasional. Kompetensi lulusan daerah satu harus sama dengan daerah lain. Yang berbeda adalah implementasi prosesnya yang menyesuaikan diri dengan kondisi daerah setempat. (Tilau, 2002 : 59)

Demokratisasi pendidikan juga harus dapat menciptakan situasi belajar yang demokratis pula serta mampu menumbuh-kembangkan motivasi belajar, kreativitas, inovasi, disiplin, dan daya juang yang tinggi. Dalam hal ini lembaga pendidikan harus menjadi tempat yang menarik dan menyenangkan bagi siswa. Kenyataan yang ada sekarang banyak siswa yang merasa terpenjara jika berada di sekolah.

Suasana demokratis dan menyenangkan tersebut harus ditopang dengan lembaga pendidikan yang mandiri dan otonom. Dengan kemandiriannya tersebut lembaga pendidikan akan mampu mengembangkan program pendidikan yang sesuai dengan dinamika kebutuhan pembangunan dengan tetap mengacu pada standar nasional sehingga tujuan pendidikan dapat tercapai secara efektif dan efisien, karena menurut Tilau (2002 : 60)

bahwa proses belajar mengajar yang berkualitas di tingkat mikro (sekolah) tidak mungkin terwujud secara sempurna tanpa didukung oleh kelembagaan yang kondusif pada tingkat meso (daerah/masyarakat) dan makro (nasional).

Secara garis besar prioritas kebijakan pendidikan nasional adalah meningkatkan mutu sumber daya manusia. Sebanyak apapun sumber daya alam, financial maupun sumber daya material tanpa didukung oleh sumber daya manusia yang profesional dan berkualitas, maka mutakhir semua sumber yang ada tersebut dapat diberdayakan.

Sumber daya manusia yang diimpikan Indonesia tidak hanya diarahkan pada kualitas yang secara rasional-teknologis bersifat kompetitif akan tetapi secara integral terbentuk manusia demokratis dan bertanggung jawab, sesuai dengan Pancasila terutama sila pertama, maka kualitas sumber daya manusia tersebut di samping mempunyai kualitas intelektual, rasional dan teknologis juga kualitas manusia yang mempunyai keyakinan agama. (Tilaar, 2002 : 126)

Dalam era desentralisasi pendidikan pembentukan sumber daya manusia berkualitas yang merupakan prioritas bangsa itu juga merupakan prioritas setiap lembaga pendidikan. Hal ini berarti segala usaha yang dilakukan oleh lembaga pendidikan tidak lain hanyalah untuk kepentingan pemberdayaan sumber daya manusia berkualitas baik di tingkat lokal, nasional maupun internasional.

Salah satu bidang yang menjadi masalah pendidikan selama ini sebagaimana tersebut di atas adalah masalah kurikulum. Kurikulum dengan

sistem sentralistik yang menyeragamkan semua lembaga pendidikan sudah tidak dapat ditetapkan, muatan yang disajikan terlalu banyak sehingga guru hanya berfikir untuk menyelesaikan kurikulum tersebut tanpa memikirkan esensi yang harus dikuasai oleh siswa dari kurikulum ini sendiri. Karena kekomplekan masyarakat tersebut serta keterkaitannya dengan jaringan-jaringan global telah mengisyaratkan bahwa lembaga pendidikan harus tanggap dan mampu mengakomodasi tuntutan perkembangan tersebut. (Bastian, 2002 : 127)

Dengan demikian kurikulum pendidikan yang sesuai dengan kehendak otonomi adalah kurikulum yang mengarah pada pengujian potensi lokal dan sesuai dengan standar global. Juga kurikulum yang memandang segi kompetensi yang harus dikuasai siswa. Untuk itulah perlu adanya pengelolaan kurikulum yang sesuai dengan tujuan dan harapan otonomi daerah.

Pengelolaan kurikulum meliputi pengelolaan proses belajar mengajar, dan penilaian. Proses belajar mengajar merupakan pemberdayaan siswa yang dilakukan melalui interaksi perilaku pengajar dan perilaku siswa, baik di dalam maupun di luar kelas. Desentralisasi pendidikan menuntut kreativitas lembaga pendidikan untuk dapat mengoptimalkan proses belajar mengajar dalam rangka peningkatan mutu belajar siswa. (Hamalik, 2002 : 19)

Proses Belajar Mengajar yang efektif semestinya dapat menumbuhkan daya kreasi, daya nalar, rasa ingin tahu dan eksperimen-eksperimentasi untuk menemukan sesuatu yang baru. Karena proses belajar

mengajar bukan sekedar penguasaan pengetahuan tentang apa yang diajarkan sehingga tertanam dan berfungsi sebagai muatan nurani dan dihayati serta dipraktikkan oleh peserta didik. Maka kurikulum dalam proses belajar mengajar lebih didasarkan pada Kebutuhan Siswa. Dengan ini dibutuhkan strategi pembelajaran yang berpusat pada siswa pula.

Pembelajaran yang berpusat pada siswa adalah keseluruhan metode dan prosedur yang menitik beratkan pada kegiatan siswa dalam proses belajar mengajar untuk mencapai tujuan pembelajaran. Di sini guru tidak lagi berperan sebagai sentral melainkan hanya sebagai penunjang, fasilitator dan pembimbing saja. (Harnalik, 2002 : 20)

Jadi dapat disimpulkan bahwa otonomi daerah dan desentralisasi pendidikan mengharuskan proses belajar mengajar dilaksanakan secara efektif dan efisien. Dan kegiatan peserta didik dijadikan acuan dalam proses belajar mengajar. Agar dapat menumbuhkan daya kreasi, daya nalar, rasa ingin tahu yang dilanjutkan dengan eksperimentasi-eksperimentasi dalam menjawab keingintahuan tersebut. Jadi kreatifitas lembaga pendidikan dalam melaksanakan proses belajar mengajar berpengaruh terhadap pencapaian efektifitas dan efisiensi pembelajaran.

Sedangkan untuk penilaian proses belajar mengajar, dalam desentralisasi pendidikan diharapkan kurikulum relevan dengan kebutuhan anak didik, untuk mengetahui seberapa besar pencapaian kurikulum, maka diperlukan sistem evaluasi atau penilaian yang relevan dengan terlaksananya kurikulum pula. Kurikulum yang memenuhi persyaratan hanya dapat

dilaksanakan secara efektif dan efisien. Efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kurikulum tersebut harus didukung oleh sistem evaluasi yang bersifat antara lain :

- a. Komprehensif, yaitu meliputi keseluruhan dari dimensi tujuan pendidikan, baik pengetahuan, ketrampilan, kemampuan, perilaku dan sikap.
- b. Terus menerus, yaitu penilaian dilakukan baik selama berlangsungnya proses belajar mengajar (partisipasi, kesungguhan, ketelitian dan kemandirian), hasil belajar pada setiap program (harian, mingguan, bulanan atau semester), perilaku dan disiplin belajar.
- c. Obyektif, yaitu ukuran bagi setiap evaluasi harus jelas dan ajeg.
(Roisel, 2003: 141)

Jadi proses penilaian yang dilakukan oleh lembaga pendidikan harus sesuai dengan standar nasional yang mencakup berbagai aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Dan dilakukan secara terus-menerus, agar dapat diperoleh hasil yang maksimal. Serta dilakukan dengan proses yang obyektif, tanpa adanya rekayasa dari pihak manapun. Jelas di sini proses penilaian Melalui Ebtanas masih belum mampuni dalam menilai siswa dari berbagai aspeknya, maka perlu ditunjang dengan bentuk-bentuk penilaian lain, yang dapat menilai segala aktifitas peserta didik yang ditunjukkan dalam berbagai aspek tersebut, sehingga diperoleh hasil yang diharapkan sesuai tujuan.

Dari keseluruhan uraian di atas, tujuan dari pada pendidikan nasional Pendidikan Nasional yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan

mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan ketrampilan, dan kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri, serta tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.

Tujuan Pendidikan Nasional yang terjabarkan pada setiap tujuan lembaga pendidikan berarti menciptakan peserta didik menjadi masyarakat madani harapan bangsa dan negara. Masyarakat madani yang ingin dicapai tersebut menurut Tilzer (2002 : 51) mempunyai karakteristik sebagai berikut : masyarakat yang beriman dan bertakwa, demokratis, menghargai hak-hak manusia, tertib dan sadar hukum, masyarakat yang kreatif, mandiri dan percaya diri, memiliki semangat kompetitif dalam suasana kooperatif dan penuh persaudaraan.

BAB III

LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Latar Belakang Obyek

1. Sejarah Tujuan Berdirinya SMK Negeri 1 Sukorambi Jember

SMK Negeri 1 Sukorambi Jember pada awalnya bernama sekolah menengah teknologi pertanian adalah sekolah yang dikelola Departemen Pendidikan Nasional, dan berdiri sekitar 27 tahun yang lalu sebagai salah satu dari 8 proyek Instalasi Pendidikan Teknik (IPT). Kemudian tahun 1975 baru menerima siswa dan tanggal 14 Februari 1977 diresmikan oleh Mendikbud RI dengan status Sekolah Menengah Teknologi Pertanian dengan penekanannya pada Pasca Papan dan sekarang di sebut dengan Teknologi Hasil Pertanian dan Industri Pertanian. Kemudian pada perkembangan selanjutnya dibuka bidang keahlian Budi Daya Tanaman, Budi Daya Ternak dan mekanisasi Pertanian.

SMK Negeri 1 Sukorambi Jember di dirikan dengan maksud memenuhi kebutuhan daerah dalam mengembangkan muatan dan potensi lokal. Untuk itu Visi SMK Negeri 1 Sukorambi Jember adalah menjadi pusat pendidikan dan pelatihan bersinergi dengan pihak eksternal untuk menyiapkan tenaga kerja tingkat menengah yang memiliki intelektual, kompetensi, jiwa wirusaha, daya saing pada tingkat regional, nasional dan global. Sedangkan Misi SMK Negeri 1 Sukorambi Jember adalah :

- a. Menuju Sekolah Menengah Kejuruan Unggulan.

- b. Menyiapkan tamatan yang bertakwa, dan berbudi luhur, mempunyai etos kerja dan berjiwa wirausaha.
- c. Meningkatkan daya serap tamatan di Dunia Usaha atau Dunia Industri dan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
- d. Meningkatkan peran sekolah menengah kejuruan sebagai pusat pengembangan Agro Bisnis di tingkat regional.

Pada saat ini, yaitu sejak tahun 1999, maka kurikulum yang digunakan SMK Negeri 1 Sukorambi Jember adalah kurikulum SMK. Ditinjau dari substansinya kurikulum SMK disusun berdasarkan *Competency-Based Curriculum* melalui *Analisis Jabatan* terdiri dari tiga komponen, yaitu: Komponen *Normatif* (pembekalan watak), Komponen *adaptif* (kemampuan berkembang), dan Komponen produktif (olah ketampanan). Lama pendidikan tiga tahun yang terbagi menjadi enam semester.

Proses pendidikan menggunakan strategi yang memungkinkan siswa mampu mengembangkan dirinya secara optimal seperti, Belajar Sepanjang Hari, Belajar tuntas, Sistem Modul, dan Pelatihan di Unit Produksi serta Dunia Usaha/Dunia Industri (Du/Di) dengan implementasi Pendidikan Sistem Ganda yang terbukti mampu meningkatkan etos kerja dan kualitas ketampanan siswa, yang sekaligus sebagai wacana pemasaran tamatan.

Dari penjelasan di atas jelas bahwa lembaga pendidikan SMK Negeri 1 Sukorambi Jember adalah merupakan Sekolah Menengah Kejuruan yaitu perguruan yang didirikan oleh Departemen pendidikan dengan tujuan mencetak out put pendidikan dengan bekal skill, knowledge dan ability.

2. Bidang Keahlian dan Program Keahlian

Bidang keahlian atau Program Keahlian yang ada pada lembaga SMK Negeri 1 Sukorambi Jember meliputi :

a. Budidaya Tanaman

Lulusan Budidaya Tanaman memiliki profil :

- 1) Membudidayakan tanaman pertanian.
- 2) Memuliabiakkan dan mengembangkan tanaman pertanian.
- 3) Mengendalikan hama dan penyakit tanaman.
- 4) Mengoperasikan dan memodifikasi alat mesin pertanian.
- 5) Menangani hasil tanaman pertanian.
- 6) Memasarkan hasil tanaman pertanian.
- 7) Mengelola tanaman pertanian.

b. Teknologi Hasil Pertanian

Lulusan Teknologi Hasil Pertanian memiliki profil :

- 1) Penanganan pasca panen dan memasarkan hasil.
- 2) Mengendalikan mutu hasil pertanian.
- 3) Mengolah hasil pertanian dan limbahnya.
- 4) Menyimpan dan menggudangkan hasil pertanian.
- 5) Mengoperasikan alat mesin pengolahan hasil pertanian.
- 6) Sanitasi dan penerapan keselamatan bahan dan pekerja pada industri pengolahan hasil.
- 7) Mengemas dan mengangkut hasil pertanian.
- 8) Mengelola usaha pengolahan hasil pertanian.

e. Mekanisasi Pertanian

Lulusan Mekanisasi Pertanian memiliki profil :

- 1) Mengoperasikan jaringan irigasi terbuka/tertutup.
- 2) Melakukan pengukuran dan pemetaan wilayah.
- 3) Mengoperasikan, merawat alat mesin pengolahan tanah, alat mesin budidaya tanaman dan pengolahan hasil pertanian.
- 4) Usaha alat-alat mekanisasi pertanian.
- 5) Memodifikasi dan membuat alat-alat pertanian.

d. Budidaya Ternak

Lulusan Budidaya Ternak memiliki profil :

- 1) Menuliahkannya dan mengembangkan komoditi ternak unggas dan ternak besar.
- 2) Menangani kesehatan ternak.
- 3) Membuat dan menyunpan makanan penguat (konsentrat)
- 4) Memproduksi pakan hijauan ternak besar.
- 5) Merobuat silage.
- 6) Membuat dan memelihara pengembalaan ternak besar.
- 7) Memelihara ternak potong, perah, dan unggas.
- 8) Melaksanakan inseminasi buatan.
- 9) Menangani dan memasarkan hasil ternak.
- 10) Mengelola usaha peternakan.

Semua bidang keahlian diatas merupakan program diklat untuk

kelas reguler.

3. Perkembangan Program Keahlian SMK Negeri 1 Sukorambi Jember

Sesuai perkembangan jaman SMK Negeri 1 Sukorambi Jember juga melaksanakan program pendidikan dengan memakai kurikulum berbasis kompetensi yaitu dengan dibukanya program CBT atau *curriculum – based training* pada tahun 2001. Dengan adanya program spesialisasi tersebut maka Program Keahlian di SMK Negeri 1 Sukorambi Jember bertambah khususnya pada Bidang Keahlian Budidaya Tanaman dengan program CBT-Produksi atau Penangkaran Benih dan pada Bidang Keahlian Budidaya Ternak dengan program CBT-Produksi Ayam Pedaging (Broiler).

Program Spesialisasi Produksi/Penangkaran Benih memiliki profil dan lingkup pekerjaan program penangkaran benih.

- a. Produsen atau penangkaran benih tanaman pangan.
- b. Produsen atau penangkaran benih tanaman hortikultura.
- c. Teknisi laboratorium pengujian benih.
- d. Teknisi lapangan penangkaran benih tanaman pangan dan hortikultura.
- e. Perdagangan benih tanaman pangan dan hortikultura.

Sedangkan Program Spesialisasi Budidaya Ayam Pedaging (Broiler) tamatan nya berpeluang bekerja di bidang:

- a. Memuliabiakkan kesehatan ternak unggas.
- b. Menangani dan memasarkan hasil ternak unggas.
- c. Mengelola usaha peternakan unggas.

Kemudian pada tahun 2002 membuka Jurusan Teknik Informasi dan Komunikasi (Komputer dan Jaringan). Jurusan ini dibuka untuk

menjawab tantangan global dan kebutuhan pasar, karena perkembangan di dalam teknologi dan informasi telah menjadikan komunikasi antar negara semakin terbuka, untuk itulah tamatan dari jurusan ini diharapkan selain dapat menggunakan alat komunikasi juga dapat berkomunikasi, sehingga kurikulum untuk bahasa Inggris diperbanyak porsi nya. Tamatan Teknik Informasi dan Komunikasi (Komputer dan Jaringan) berpeluang besar sebagai wirasaha atau teknisi di dunia usaha dengan lingkup pekerjaan :

- a. Pengelolaan multi media yang berbasis komputer.
- b. Pengoperasian jaringan atau *network operating*.
- c. Perbaikan dan perawatan (*maintenance dan repair*)

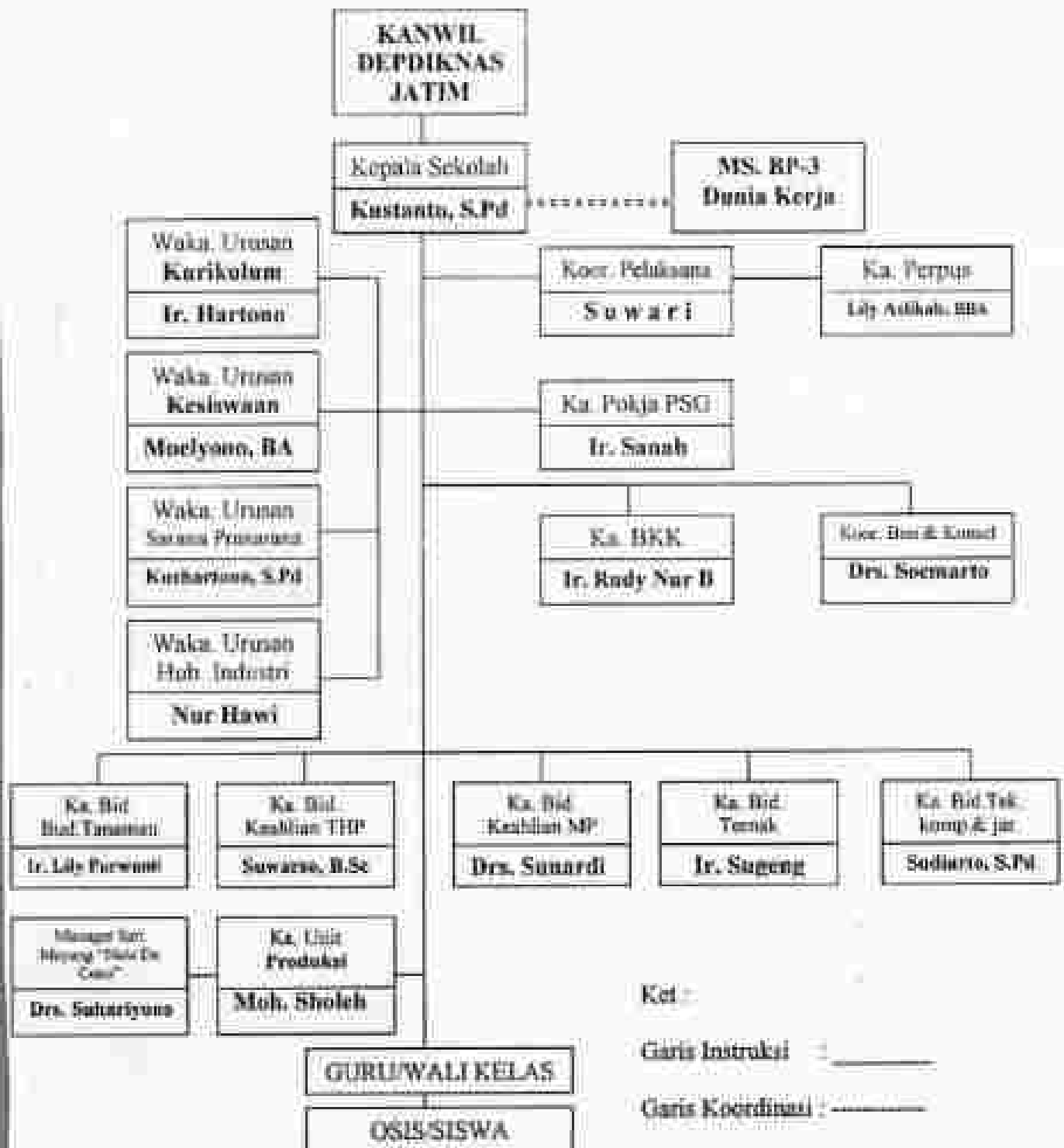
4. Struktur Organisasi

Layaknya lembaga-lembaga pemerintahan dan pendidikan lainnya, struktur organisasi SMK Negeri 1 Sukorambi Jember dikepalai oleh seorang Kepala Sekolah serta dibantu oleh tenaga-tenaga pengajar (guru) lainnya dalam menjalankan roda kelembagaan guna tercapainya misi dan visi sekolah.

Adapun struktur organisasi SMK Negeri 1 Sukorambi Jember adalah sebagai berikut :

BAGAN ORGANISASI

SMK NEGERI 1 SUKORAMBI JEMBER TAHUN PELAJARAN 2003/2004



Bagan 3.1 : Bagan Struktur Organisasi SMK Negeri 1 Sukorambi Jember

5. Sarana dan Prasarana Dilat SMK Negeri 1 Sukorambi Jember

TABEL 3.1

SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN

SMK NEGERI 1 SUKORAMBI JEMBER TAHUN PELAJARAN 2003/2004

NO	KETERANGAN	JUMLAH
	<u>Bangunan Gedung :</u>	
1.	Tata Laksana	1 Buah
2.	Ruang Pimpinan	1 Buah
3.	Ruang Staf/Waka	1 Buah
4.	Ruang Teori	19 Buah
5.	Ruang BP Konseling	1 Buah
6.	Ruang BKK	1 Buah
7.	Ruang Perpustakaan	1 Buah
8.	Ruang Logistik	1 Buah
9.	Sanggar Pratiada	1 Buah
10.	Garasi Traktor	1 Buah
11.	Parkir Sepeda	2 Buah
12.	Menara Air	1 Buah
13.	Sumur Pompa	1 Buah
14.	Ruang Guru	1 Buah
15.	Ruang POKJA PSG / MS	1 Buah
16.	Ruang Komputer	1 Buah
17.	Ruang Pengandaan	1 Buah

18.	Lapangan Hitam / Pengaspalan	1 Buah
19.	Taman Depan / Papan Nama	1 Buah
20.	Ruang Teori Benih (Green House)	1 Buah
21.	Ruang Laboratorium PHP (Produksi Roti)	3 Buah
22.	Laboratorium Fisika	1 Buah
23.	Laboratorium Peternakan	2 Buah
24.	Laboratorium Uji Benih (EWS)	1 Buah
25.	Laboratorium Kimia	1 Buah
26.	Laboratorium Pengawasan Mutu	1 Buah
27.	Laboratorium Biologi	1 Buah
28.	Laboratorium Agronomi	1 Buah
29.	Bengkel Mesin Pertanian	1 Buah
30.	Bengkel Kayu Pertanian	1 Buah
31.	Kandang Kambing & Ayam	2 Buah
32.	Ruang Nata De Coco	1 Buah
33.	Ruang Fermentasi	1 Buah
34.	Bak air + Air Steris	1 Buah
35.	Kantin	2 Buah
36.	Gudang PHP (pertanian)	2 Buah
37.	Teknisi Peternakan	1 Buah
38.	Ruang Penelitian	1 Buah
39.	Power Plant	1 Buah
40.	Ruang TTA	1 Buah

41.	Ruang Selep	1 Buah
42.	Koperasi MAW	1 Buah
43.	Auditorium	1 Buah
44.	Mushollah	1 Buah
45.	Perum. Dinas	13 Buah
46.	Koperasi Agretek	1 Buah
47.	Pos Lapot (Satpam)	1 Buah
48.	Lapangan Olahraga	1 Buah
49.	Kolam	1 Buah
50.	Azanna Putri/Putri	2 Buah
51.	Unit Produksi	1 Buah
	Alat-Alat :	
52.	Mini Traktor	1 Buah
53.	Ballas	1 Buah
54.	Disc Plough	1 Buah
55.	Water Pump/Engine	1 Buah
56.	Air Composer	1 Buah
57.	Chain Saws	1 Buah
58.	Agricultural Product	1 Buah
59.	Clean Water Supply	1 Buah
60.	Survey	1 Buah
61.	Boring Hole	1 Buah
62.	Deepwell Pump	1 Buah

63.	Automatik Water Level	1 Buah
64.	Swatch	1 Buah
65.	Pipe	1 Buah
66.	Ground Reservoir	1 Buah
67.	Diesel Generating	4 Buah
68.	Rice Miller	4 Buah
69.	Rice Polisher	4 Buah
70.	Farm Traktor	1 Buah
71.	Hand Traktor Lengkap	16 Buah

Sumber Data : Dokumentasi Tata Usaha SMK Negeri 1 Sukorambi Jember

**6. Jumlah dan Komposisi Peserta Diklat SMK Negeri 1 Sukorambi
Jember**

TABEL 3.2
JUMLAH DAN KOMPOSISI SISWA
SMK NEGERI 1 SUKORAMBI JEMBER
TAHUN PELAJARAN 2003 – 2004

No	Program Keahlian	Tingkat I			Tingkat II			Tingkat III		
		Pa	Pi	Jml	Pa	Pi	Jml	Pa	Pi	Jml
1.	Budidaya Tanaman	69	6	75	98	6	104	95	6	111
2.	CBT-Produksi/ Penangkaran Benih TPH	19	2	21	14	2	16	16	3	19
3.	Teknologi Hasil Pertanian	37	38	75	36	32	68	20	28	48

4.	Mekanisasi Pertanian	76	-	76	66	-	66	50	2	52
5.	Budidaya Ternak	69	8	77	62	6	68	59	10	69
6.	CBT-Produksi Ayam Pedagang (Broder)	18	3	21	17	2	19	-	-	-
7.	Teknik Informasi & Komunikasi (Komputer & Jaringan)	14	6	20	-	-	-	-	-	-
JUMLAH		302	67	369	309	48	341	254	67	289
TOTAL		995								

Sumber Data: Dokumentasi Waka. Kurikulum SMK Negeri 1 Sukorambi Jember.

7. Susunan Program Kurikulum SMK Negeri 1 Sukorambi Jember

Program Keahlian Budi Daya Tanaman

TABEL 3.3

KURIKULUM PROGRAM KEAHLIAN BUDIDAYA TANAMAN

SMK NEGERI 1 SUKORAMBI JEMBER TAHUNJ PELAJARAN 2003/2004

No	PROGRAM DIKLAT	BEBAN BELAJAR PER MINGGU					
		TINGKAT I SEMESTER		TINGKAT II SEMESTER		TINGKAT III SEMESTER	
		1	2	1	2	1	2
<u>NORMATIF :</u>							
1.	Pend. Agama	2	2	2	2	-	2

2.	Pancasila & Kewarganegaraan	2	2	2	2	-	2
3.	Bahasa & Sastra Indonesia	2	2	2	2	-	2
4.	Pend. Jasmani & Kesehatan	2	2	2	2	-	2
5.	Sejarah Nasional & Umum	2	2	2	2	-	2
<u>ADAPTIF :</u>							
1.	Matematika	4	4	4	4	-	4
2.	Bhs. Inggris	3	3	3	3	-	3
3.	Fisika	3	3	3	3	-	3
4.	Kimia	3	3	3	3	-	3
5.	Biologi	3	3	3	3	-	-
6.	Komputer	3	3	-	-	-	-
7.	Kewirausahaan	2	2	2	2	-	-
<u>PRODUKTIF :</u>							
1.	Agribisnis I	2	2	-	-	-	-
2.	Agribisnis II	-	-	-	-	-	-
3.	Pemanfaatan Iklim	2	2	3	3	-	4
4.	Peng. Sifat Tanah & Peman. Air	2	2	-	-	-	-
5.	Peranan & Peng. Mikroorganisme	3	3	-	-	-	-
6.	Peng. Karakteristik Hama	2	2	-	-	-	-
7.	Penerapan Dasar Teknik Alat Mesin Pertanian	3	3	-	-	-	-
8.	Dasar Budidaya Tanaman	6	6	-	-	-	-
9.	Budidaya Tanaman	-	-	6	6	-	-

10.	Perbibakan Tanaman	-	-	4	-	-	-
11.	Teknologi Pemupukan Tanaman	-	-	-	4	-	-
12.	Penangkaran Benih Tanaman	4	4	4	4	-	-
13.	Peng. Hama, Penyakit & Gulma	-	-	2	2	-	-
14.	Pengoperasian Alat Mesin Budidaya Tanaman	7	7	4	4	-	-
15.	Paket Keahlian Kompetensi Prod.	-	-	-	-	51 ^{a)}	22
JUMLAH JAM		51	51	51	51	51	51

^{a)} Praktek Kerja Industri (Prakerin)

Sumber Data: Dokumentasi Waka. Kurikulum SMK Negeri 1 Sukorambi Jember

8. Daftar Nama Perusahaan (Dunia Usaha/Industri) Pengguna Tamatan SMK Negeri 1 Sukorambi Jember

Pada umumnya lulusan SMK Negeri 1 Sukorambi Jember sudah dapat dikategorikan sumber daya yang siap pakai di dunia usaha kerja, hal ini juga dikemukakan SMK Negeri 1 Sukorambi Jember dalam pelaksanaannya sudah memiliki jaringan kerja dengan perusahaan-perusahaan yang sesuai dengan program keahlian yang dikembangkan.

Adapun daftar perusahaan yang selama ini menggunakan tamatan SMK Negeri 1 Sukorambi Jember yaitu :

TABEL 3.4

DAFTAR NAMA PERUSAHAAN (DU-DE) PENGGUNA TAMATAN
SMK NEGERI 1 SUKORAMBI JEMBER TAHUN PELAJARAN 2003/2004

NO	PERUSAHAAN	TEMPAT
1.	Vega Farm	Rogojampi
2.	Maesri Farm	Maesan – Bondowoso
3.	PT. Salswa Miramaraya (Kemitraan)	Jember
4.	Ajuna Farm	Kediri
5.	Jaya Mulya Farm	Pare – Kediri
6.	PT. Cargill (Kemitraan)	Wates – Kediri
7.	PT. Propek Karya Tama	Denpasar – Bali
8.	Hartono Farm	Bogor
9.	Cikampek Farm	Cikampek
10.	Atung Farm	Tangerang
11.	PT. Charoen Pokphand Indonesia (Kemitraan)	Surabaya
12.	Ajung Farm	Ajung – Jember
13.	Atiyasa Farm	Bangli – Bali
14.	Bapak Adi (Peternak Mandiri)	Kalisat
15.	Pt. Charoen Polcphand Indonesia (Kemitraan)	Denpasar – Bali
16.	Tegal Putri Farm Pare	Kediri
17.	PT. Bandung Agri Iestari	Sukabumi
18.	PT. Frans Ritirta	Jakarta

19	Arjasa Farm	Bangli – Bali
20	PT. Indagro Culture	Mojokerto
21	PT. Aventa	Jakarta
22	PT. Nusagrini	Jember
23	PT. Alam Segar	Gresik
24	PT. Garuda Food	Gresik
25	PT. Sentraboga Intaselem	Panuruan
26	PT. Indagro Culture	Mojokerto
27	PT. Philip Seafood	Panuruan
28	PT. Franza Ritirta	Sukabumi

Sumber Data: Dokumentasi Ka. BKK SMK Negeri 1 Sukorambi Jember

B. Paparan Data

1. Pengelolaan Proses Belajar Mengajar Muatan Lokal di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Sukorambi Jember Tahun Pelajaran 2003/2004

Berdasarkan serangkaian wawancara dengan informan penelitian, beberapa dokumentasi dan observasi yang dilakukan oleh peneliti, dipaparkan data-data tentang pengelolaan proses belajar mengajar muatan lokal di SMK Negeri 1 Sukorambi Jember dalam perspektif otonomi daerah Tahun Pelajaran 2003/2004.

Sebelum peneliti menaparkan tentang pengelolaan proses belajar mengajar lebih lanjut maka yang perlu diketahui adalah kurikulum SMK.

Kurikulum SMK dilihat dari segi isi program diklat terdiri dari tiga komponen yaitu :

a. Komponen Normatif

Komponen normatif adalah komponen yang mengandung pembekalan watak, komponen ini terdiri dari: pendidikan agama, pendidikan pancasila dan kewarganegaraan, bahasa dan sastra Indonesia, pendidikan jasmani dan kesehatan, sejarah nasional dan sejarah umum.

b. Komponen Adaptif

Sedangkan komponen adaptif merupakan komponen yang menumbuh kemampuan berkembang pada anak didik. Komponen ini terdiri dari matematika, bahasa Inggris, fisika, kimia, biologi, komputer dan kewirausahaan.

c. Komponen Produktif

Komponen produktif adalah komponen pengolah ketrampilan anak didik, yang mana komponen ini antara bidang keahlian atau jurusan yang satu dengan yang lain berbeda sesuai dengan kompetensi masing-masing jurusan dan terdiri dari sub-sub kompetensi yang berkaitan dan berkesinambungan.

Komponen terakhir inilah yang tergolong sebagai komponen kurikulum muatan lokal, tetapi peneliti hanya mengambil muatan lokal dari salah satu bidang keahlian atau jurusan yaitu Budidaya Tanaman, yang mata hal ini akan menjadi topik pembahasan peneliti.

Program pembelajaran dalam lembaga pendidikan kejuruan lebih dikenal dengan program DIKLAT atau program pendidikan dan pelatihan. Hal ini sejalan dengan ungkapan Waka. Urusan kurikulum SMK Negeri 1 Sukorambi Jember Bapak Hartono, "Proses belajar mengajar yang diterapkan di lembaga sekolah ini lebih tepat disebut dengan proses pendidikan dan pelatihan atau program DIKLAT". Karena pembelajaran yang ada di SMK Negeri 1 ini terdiri dari pendidikan yang di dalamnya pendalaman teori-teori juga pelatihan, yang mana pelatihan ini adalah upaya untuk mengimplementasikan dan mempraktekkan teori-teori yang didapat dengan kenyataan di lapangan.

Secara garis besar pengelolaan program pendidikan dan pelatihan (Diklat) ini meliputi tiga tahap. Menurut Waka. Urusan kurikulum SMK Negeri 1 Sukorambi Jember Bapak Hartono "tiga tahap pada pengelolaan Diklat tersebut meliputi tahap perencanaan, tahap pelaksanaan dan tahap evaluasi". Untuk lebih jelasnya peneliti terangkan satu-persatu di bawah ini :

a. Tahap Perencanaan Proses Belajar Mengajar kurikulum Muatan Lokal di SMK Negeri 1 Sukorambi Jember

Sebelum program diklat dilaksanakan oleh guru bidang studi maka perlu adanya penyamaan persepsi, pengarahan tentang bagaimana alur penyelenggaraan diklat. Pengarahan ini dilakukan oleh Waka. Kurikulum kepada semua guru. Alur penyelenggaraan diklat adalah sebagai berikut:

1) Kebutuhan Tenaga Kerja Tingkat Menengah

Jadi seberapa besar peserta didik yang nantinya menjadi calon tenaga kerja tingkat menengah ini dibutuhkan oleh pasar kerja dan sesuai dengan keahlian yang dibutuhkan. Misalnya, perusahaan di Jember ini membutuhkan tenaga kerja tingkat menengah berupa proses dengan keahlian tertentu dari keseluruhan tenaga kerja yang akan diserup.

2) Penentuan Program

Setelah kebutuhan akan tenaga kerja tingkat menengah ini dianalisis, maka tahap selanjutnya adalah penentuan program. Tahap ini dimaksudkan ketika sekolah sudah mengetahui kebutuhan pasar terhadap tenaga kerja, maka program atau bidang keahlian harus ditentukan. Sekolah SMK Negeri 1 adalah sekolah kejuruan bidang pertanian, sehingga program atau bidang yang harus ada adalah yang menyangkut bidang itu sendiri yaitu pertanian, misalnya program keahlian Budidaya Tanaman, Teknologi Hasil Pertanian dan sebagainya.

3) Studi Kelayakan

Setelah program dan bidang keahlian ditentukan, maka diadakan studi kelayakan. Misalnya, program keahlian budidaya tanaman pertanian, apakah program ini layak untuk dikonsumsi siswa atau apakah program ini layak untuk dipasarkan pada dunia kerja.

4) Membuka atau Mempertahankan Program

Ketika kelayakan sudah dipertimbangkan, yang harus dilakukan jika layak maka perlu dibuka program tersebut, atau kalau program tersebut sudah ada, maka perlu dipertahankan. Sebaliknya jika tidak layak maka program tersebut tidak perlu dibuka dan jika sudah ada, maka perlu dibeat atau ditutup jika dianggap perlu.

5) Daftar Kompetensi Yang Dibutuhkan Dunia Kerja

Setelah program diklat benar-benar dibuka atau ditetapkan, maka langkah selanjutnya adalah menyusun daftar kompetensi yang dibutuhkan oleh dunia kerja. Misal, program keahlian budidaya tanaman menghasilkan out put yang mempunyai keahlian salah satunya adalah kompetensi dalam membudidayakan tanaman pertanian. Kompetensi-kompetensi ini disusun pada setiap program keahlian.

6) Penyesuaian GBPP

Setelah program dibuka dan kompetensi ditentukan, maka langkah selanjutnya adalah menyesuaikan dengan GBPP.

Sebagaimana dikatakan oleh Bapak Hartono sebagai berikut:

Penyesuaian GBPP melalui beberapa prosedur antara lain : (a) pengkajian kurikulum SMK. Kurikulum SMK harus dikaji secara intensif, serta harus terkait dan sepadan (link and match) dengan kebutuhan dunia kerja yang ada. Kurikulum yang telah disusun menjadi program bersama antara sekolah dan dunia industri. (b) Setelah pengkajian kurikulum langkah selanjutnya adalah identifikasi kompetensi pekerja, identifikasi ini didasarkan atas SKN atau Standar Kompetensi Nasional, serta data tenaga kerja. langkah ini berupaya untuk mengelompokkan kompetensi-kompetensi yang harus dikuasai oleh peserta didik sebagai calon tenaga kerja. (c) Selanjutnya sinkronisasi kompetensi apakah kompetensi ini sinkron antara GBPP SMK dengan bidang-bidang

pelajaran yang tersedia di institusi penerapan tersebut. Jika sudah sesuai, maka GBPP tersebut siap untuk diimplementasikan dan jika belum, maka harus dilakukan penyesuaian kembali antara kompetensi dengan GBPP SMK. (Hartono, w: 21-10-2003)

Adapun alur penyesuaian GBPP SMK Negeri 1 Sukorambi

Jember adalah sebagai berikut :

**PROSEDUR PENYESUAIAN GBPP
SMK NEGERI 1 SUKORAMBI JEMBER
TAHUN PELAJARAN 2003/2004**



Bagian 3.2 : Prosedur Penyesuaian GBPP SMK Negeri 1 Sukorambi
Jember

Sumber Data: Dokumentasi Waka. Kurikulum SMK Negeri 1
Sukorambi Jember

Alur penyelenggaraan program diklat ini sudah termasuk di dalamnya penguasaan GBPP oleh guru sebagai prasyarat untuk melaksanakan pembelajaran, juga termasuk menganalisis materi pelajaran, karena analisis ini merupakan hasil kegiatan guru mulai dari meneliti GBPP, mengkaji dan menjabarkan serta mempertimbangkan penyajiannya.

Dari uraian di atas alur penyelenggaraan program Diklat yang perlu diketahui oleh guru sebelum ia merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi proses belajar mengajar adalah sebagai berikut:

ALUR PENYELENGGARAAN DIKLAT

SMK NEGERI 1 SUKORAMBI JEMBER

TAHUN PELAJARAN 2003/2004



Diagram 2.3 : Alur Penyelenggaraan Diklat SMK Negeri 1 Sukorambi Jember

Sumber Data: Dokumentasi Wida, Kurikulum SMK Negeri 1 Sukorambi Jember

Dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa perencanaan kurikulum terutama pada proses belajar mengajar di SMK Negeri 1 Sukorambi Jember disusun secara intensif dan sistematis, dengan memperhatikan aspek internal yaitu sekolah dan aspek eksternal yaitu pihak luar atau pasar. Ini berarti di SMK Negeri 1 Sukorambi Jember dalam perencanaan pembelajarannya telah memiliki analisis SWOT. Analisis SWOT adalah analisis kondisi internal maupun eksternal organisasi yang selanjutnya akan digunakan sebagai dasar untuk merancang strategi atau program kerja.

Analisis internal meliputi penilaian terhadap faktor kekuatan (*strength*) dan kelemahan (*weakness*). Sedangkan analisis eksternal mencakup faktor peluang (*opportunity*) dan faktor tantangan (*threats*).

Dalam pembelajaran terdapat tiga komponen yaitu input, proses dan out put. Untuk menghasilkan *out put* (keluaran) yang baik maka *input* (masukan) harus diproses secara efektif. *Input* yang baik akan memudahkan usaha menghasilkan *out put* yang baik pula, untuk itu sebelum pelaksanaan proses belajar mengajar di SMK maka *input* harus diseleksi terlebih dahulu. *Input* tersebut meliputi :

- 1) Masukan kasar yang berupa siswa. Siswa yang masuk harus diseleksi melalui penelusuran buku dan minat selain dengan tes tertulis. Penyeleksian ini dimaksudkan untuk mengetahui kompetensi dasar yang dimiliki oleh calon siswa. Dan jika siswa yang mendaftar

lebih besar dari daya tampung, maka tidak semua calon siswa tersebut diterima tetapi disesuaikan dengan daya tampung dan harus diseleksi.

- 2) Masalah keasr berupa : (a) guru yang berkualitas, yang jelas guru di SMK Negeri 1 ini harus mempunyai kompetensi standar dengan standar kompetensi kejuruan, juga harus mempunyai pengalaman industri yang kuat dan luas, (b) kurikulum yang tertuang dalam GMP harus dimiliki, difahami dan dikembangkan oleh semua guru, (c) staf tata usaha yang mengelola sarana dan prasarana, (d) juga sarana dan prasarana yang memadai.
- 3) Masalah lingkungan. Yaitu lingkungan belajar yang baik, segar, nyaman dan aman, baik lingkungan sekolah itu sendiri maupun lingkungan sosial. (Hartono, w : 22-10-2003)

Sedangkan menurut guru bidang studi program budidaya tanaman Ibu Lilik pengelolaan proses belajar mengajar baik untuk program diklat reguler maupun CBT khususnya pada komponen produktif secara umum pasti mengandung tiga tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Dalam tahap perencanaan maka seorang guru harus mempersiapkan antara lain :

1) Program Tahunan

Program Tahunan merupakan program umum setiap mata pelajaran dan untuk setiap kelas. Program ini sudah harus disiapkan dan dikembangkan oleh guru sebelum tahun ajaran baru :

2) Program Semester

Seorang guru minimal sudah memiliki program semester jika belum memiliki program tahunan. Program semester berisi tentang garis-garis besar dari hal-hal yang akan dilaksanakan dan yang akan dicapai oleh guru dalam semester tersebut.

3) Program Satuan Pelajaran

Program Satuan Pelajaran merupakan salah satu bagian dari program pelajaran yang memuat satuan bahan untuk setiap tatap muka, program ini dapat digunakan guru untuk acuan dalam melaksanakan proses belajar mengajar atau program diklat agar lebih terarah, efisien dan efektif. Di dalam satuan pelajaran ini juga menyangkut absensi, jadwal atau program.

4) Program Modul

Program Modul ini dikembangkan pada setiap bidang keahlian atau kompetensi, dengan program modul ini juga terangkum tentang materi, alur pembelajaran sekaligus evaluasi pembelajaran. Sebelum draft modul disusun maka yang harus dilakukan adalah (a) menganalisis kebutuhan modul, apakah materi yang disajikan dalam modul sudah sesuai dengan tuntutan kebutuhan dunia usaha dan industri serta IPTEK yang berkembang? Jika sudah sesuai, maka draft harus dibuat dengan mengacu pada GBPP dan standar kompetensi. (b) validasi, yaitu berkenaan dengan ketetapan sites penilaian terhadap konsep yang dinilai sehingga betul-betul menilai apa yang seharusnya dinilai. (c) jika modul sudah dinyatakan valid/tepat, maka modul harus diuji coba dahulu, jika

belum valid harus diundurkan revisi modul dan lakukan validasi. (d)

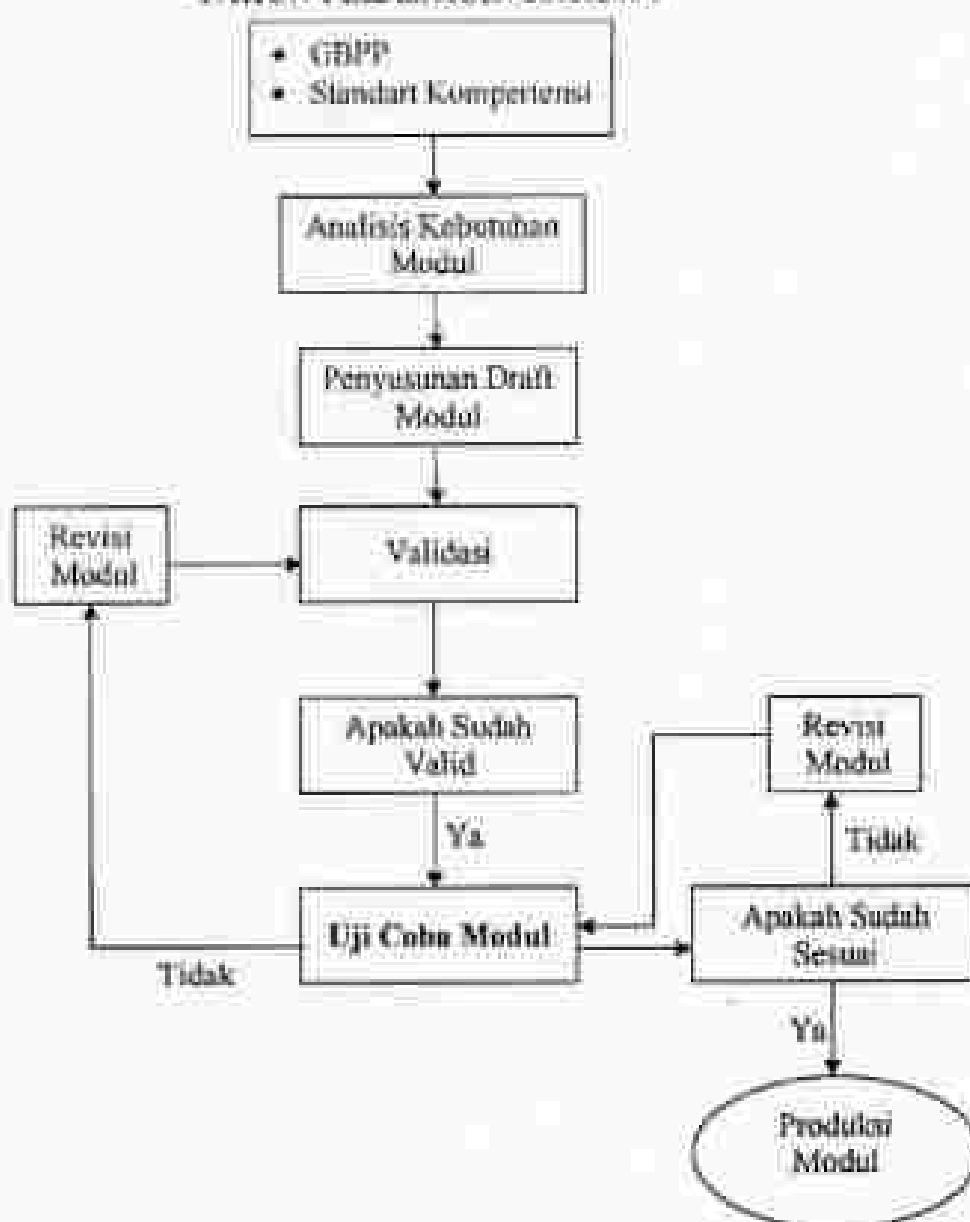
produksi, yaitu jika uji coba sudah sesuai dengan modul, maka modul

tersebut siap untuk diproduksi. (Hariyanto, w :21-10-2003)

PROSEDUR PENGEMBANGAN MODUL

SMK NEGERI 1 SUKORAMBI JEMBER

TAHUN PELAJARAN 2003/2004



Bagan 3.4 : Prosedur Pengembangan Modul SMK Negeri 1 Sukorambi Jember

Sumber Data: Dokumentasi Waka. Kurikulum SMK Negeri 1 Sukorambi Jember

5) Merencanakan Program Pengayaan dan Remedial

Program ini dilakukan setelah mendapatkan hasil evaluasi awal, jika hasil evaluasi ternyata belum memenuhi standar maka perlu dilakukan pengulangan dan yang sudah mencapai standar dilakukan pengayaan sehingga materi benar-benar dapat diserap oleh siswa.

Semua perencanaan tersebut di atas dibuat, tidak lain hanyalah untuk pencapaian proses belajar mengajar yang efektif. Jika hal ini dilihat dari sudut pandang otonomi daerah jelas sesuai dengan harapan otonomi yang menginginkan lembaga sekolah lebih dapat bergerak bebas dalam menentukan arah pendidikan sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Ruang gerak yang luas era desentralisasi ini diberikan kepada sekolah dalam rangka menggali potensi dan kreatifitas sekolah dalam merencanakan dan melaksanakan proses belajar mengajar.

b. Tahap Pelaksanaan Proses Belajar Mengajar Kurikulum Muatan Lokal di SMK Negeri 1 Sukorambi Jember

Pelaksanaan proses belajar mengajar di sekolah tentunya disesuaikan dengan perencanaan proses belajar mengajar yang telah ditentukan sebelumnya, hal ini bertujuan agar target dan tujuan yang sudah ditentukan oleh sekolah tercapai dengan maksimal sebagaimana yang telah direncanakan sebelumnya.

Seperti yang dikatakan Waka. Kurikulum Bapak Hartono bahwa :

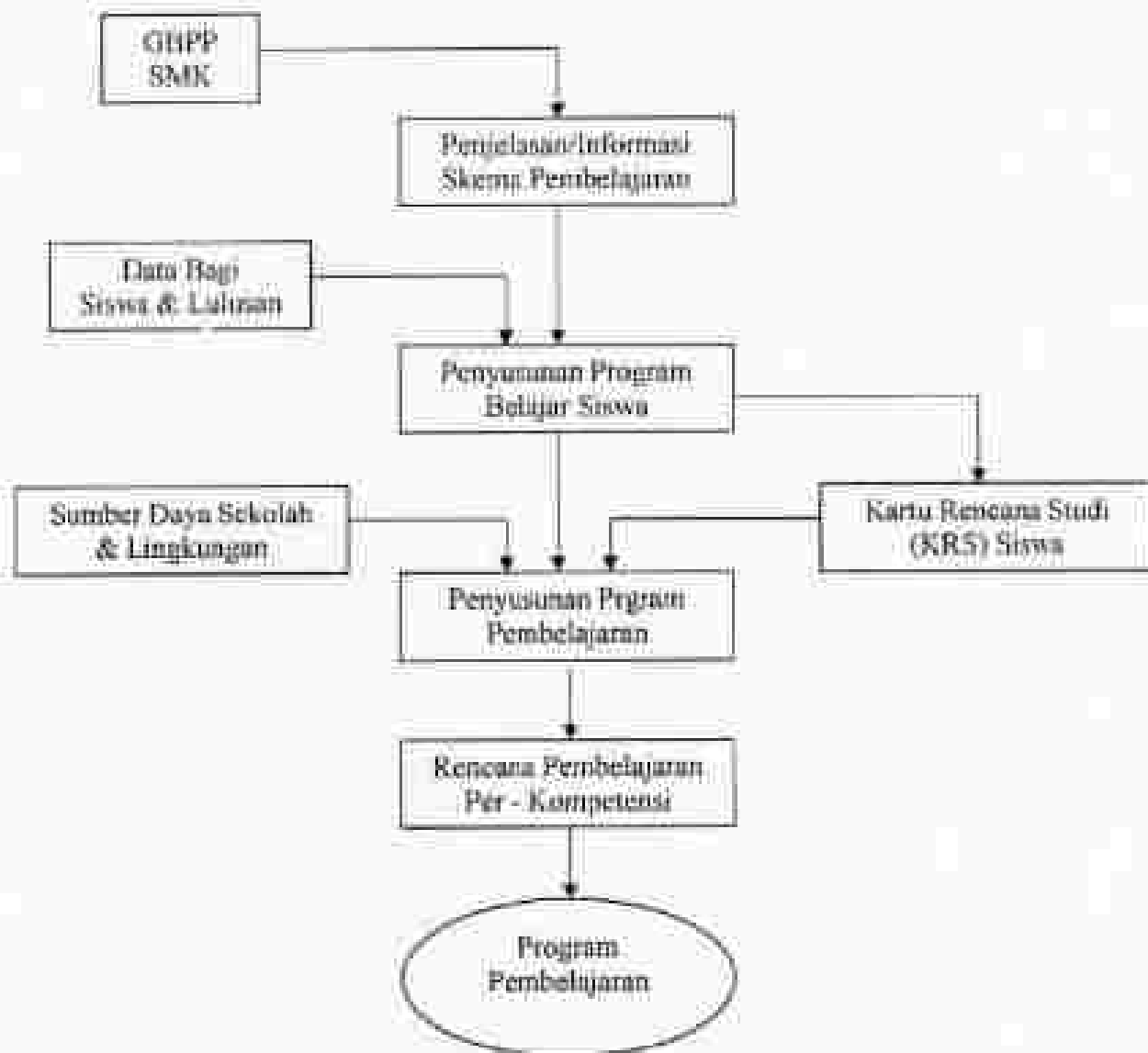
Sebelum pelaksanaan program pembelajaran atau diklat dilakukan maka guru harus mengetahui prosedur-prosedur tertentu antara lain, inventarisasi tempat pembelajaran, penilaian tempat pembelajaran dan pelaksanaan pembelajaran berbasis kompetensi. (Hartono, w. 21-10-2003)

1) Inventarisasi Tempat Pembelajaran

Inventarisasi ini dilakukan setelah program pembelajaran disusun baik oleh pihak sekolah maupun oleh institusi pasangan (dunia usaha dan industri), karena apa yang menjadi program sekolah berarti menjadi program Dunia usaha/ industri juga. Penyusunan program pembelajaran tersebut juga melalui prosedur antara lain: (a) skema pembelajaran harus sudah jelas dimengerti baik dari pihak sekolah maupun institusi pasangan, skema pembelajaran harus sesuai dengan GBPP SMK, (b) penyusunan program belajar siswa, penyusunan program ini diperoleh dari data bagi siswa dan lulusan. Program belajar siswa tersebut berbentuk kartu rencana studi (KRS) siswa. Selain KRS yang perlu diperhatikan adalah sumber daya sekolah dan lingkungan, sebagai bahan untuk menyusun program pembelajaran. (c) setelah program pembelajaran tersusun maka pembelajaran perkompetensi mulai direncanakan, setelah itu program pembelajaran dapat dilaksanakan.

Prosedur penyusunan program pembelajaran SMK Negeri 1 Sukarambi Jember dapat digambarkan sebagaimana pada bagan berikut ini :

**PROSEDUR PENYUSUNAN PROGRAM PEMBELAJARAN
SMK NEGERI 1 SUKORAMBI JEMBER TAHUN PELAJARAN 2003/2004**



Bagan 3.5 : Prosedur Penyusunan Program Pembelajaran SMK Negeri 1 Sukorambi Jember

Sumber Data : Dokumentasi Waka. Kurikulum SMK Negeri 1 Sukorambi Jember

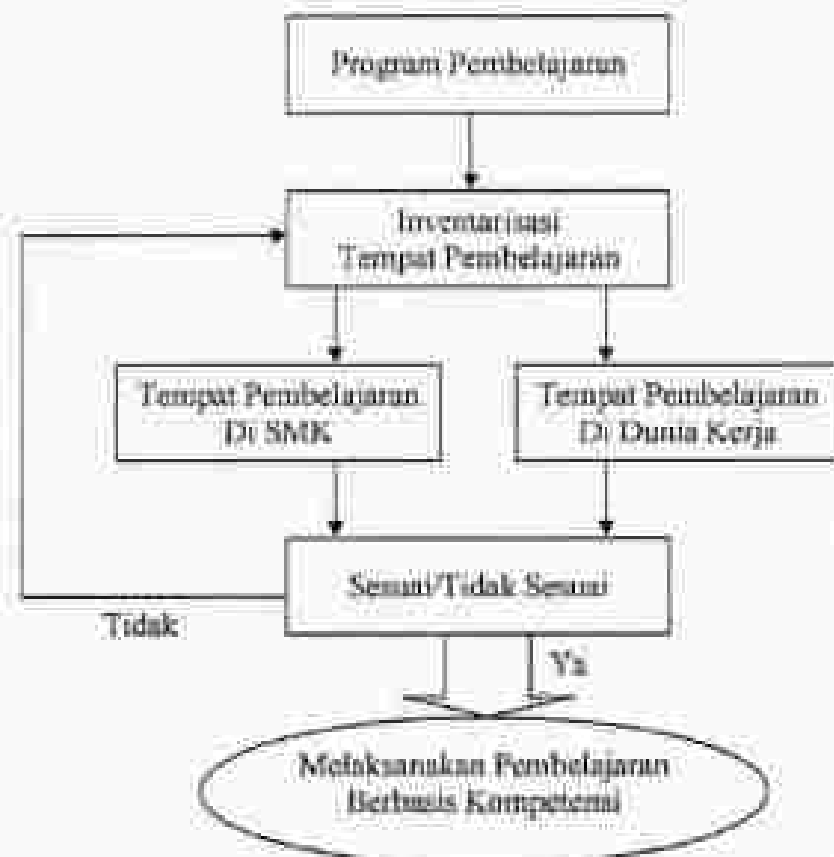
Inventarisasi tempat pembelajaran dilakukan oleh pihak sekolah dan institusi pasangan, jadi diperoleh tempat pembelajaran di SMK itu sendiri dan tempat pembelajaran di dunia kerja.

2) Penilaian Tempat Pembelajaran

Setelah ditentukan tempat pembelajaran maka selanjutnya adalah menilai tempat tersebut apakah tempat tersebut sudah memenuhi syarat dari segi kelengkapan siap untuk ditempati, bagaimana dengan sarana dan prasarananya. Jika belum sesuai maka ditinjau ulang pada tahap inventarisasi tempat pembelajaran.

3) Pelaksanaan Pembelajaran Berbasis Kompetensi

PROSES PELAKSANAAN PEMBELAJARAN SMK NEGERI 1 SUKORAMBI JEMBER TAHUN PEMBELAJARAN 2003/2004



Bagian 3.6 : Proses Pelaksanaan Pembelajaran SMK Negeri 1 Sukorambi Jember

Sumber Data : Dokumentasi Waka. Kurikulum SMK Negeri 1 Sukorambi Jember

Menurut Bapak Hartono, untuk itulah pelaksanaan pembelajaran di dua tempat tersebut harus mempunyai pola atau model pengaturan penyelenggaraan program, khususnya yang menyangkut tentang kapan dilaksanakan di SMK dan kapan dilaksanakan di institusi pasangan. Secara garis besar model atau pola penyelenggaraan itu dapat berbentuk "day release" atau "block release" atau merupakan kombinasi. Dalam bentuk penyelenggaraan "day release" disepakati bernama dari 6 hari belajar dalam satu minggu, berapa hari di institusi pasangan dan berapa hari di sekolah. Sementara dalam penyelenggaraan "block release" disepakati bernama bulan atau enam bulan atau semester yang mana harus berada di institusi pasangan. (Hartono, w:24-10-2003)

Sedangkan secara operasional pelaksanaan pembelajaran di sekolah sebagaimana yang dikatakan Ibu Liliik mencakup tiga tahap yaitu:

a) Tahap Membuka Pembelajaran

Tahap membuka ini seorang guru harus dapat mengelola sumber daya sekolah beserta lingkungannya dengan peserta didik agar situasi belajar bisa kondusif. Guru bisa memperhatikan bagaimana keadaan siswa, apakah siswa lagi bermasalah atau tidak. Di sini guru harus dapat memotivasi agar siswa bisa bergairah dan bersemangat untuk segera menerima materi. Guru juga memperhatikan lingkungan seperti keadaan cuaca agar anak bisa terpusat pikirannya pada apa yang akan disampaikan.

→
Liliik

b) Menyampaikan Materi Pembelajaran

Dalam menyampaikan materi pelajaran maka bahasa guru harus lugas, terang dan tidak berbelit-belit. Guru harus menjelaskan tujuan dan materi yang dibahas. Metode yang digunakan guru jangan monoton, agar siswa tidak bosan. Jika diperlukan guru harus menggunakan alat bantu (peraga) dalam menciptakan proses pembelajaran yang efektif, misalnya penggunaan gambar dan sebagainya. Penggunaan alat peraga tersebut dalam rangka mempercepat proses belajar mengajar dan membantu siswa dalam menangkap pengertian yang diberikan guru. Dan sebelum materi ditamp guru dapat memberikan pertanyaan-pertanyaan seputar materi untuk mengetahui daya serap anak.

c) Menutup Pembelajaran

Seorang guru harus memberikan kesimpulan tentang apa yang ada dalam materi, sehingga anak didik mengerti apa yang mereka dapat dari materi hari itu.

Sebagaimana dikatakan oleh Ibu Lily:

Konsekuensi dari sistem pendidikan dan pelatihan di SMK yang berbasis kompetensi, belajar tuntas dan pelatihan di unit produksi serta dunia usaha dan industri, maka dilaksanakan dengan memakai modul. Program modul yang sudah direncanakan dilaksanakan dengan mengacu pada petunjuk pelaksanaan dalam modul tersebut. (Lily, w : 22-10-2003)

Seuai dengan tempat pembelajaran program diklat di SMK Negeri 1 Sukocandi Jember yang terdiri dari lembaga sekolah

(itu sendiri) juga lembaga pasangan atau DuDi, maka pelaksanaan pembelajaran di perusahaan ditekankan pada kerja praktik sebagai implementasi teori yang peserta didik dapat dari sekolah, akan tetapi di sini perusahaan juga memberikan gambaran dan keterangan serta petunjuk penggunaan perangkat teknologi perusahaan yang harus diketahui oleh peserta diklat.

Dalam wawancara peneliti dengan Bapak Hartono berpendapat sebagai berikut:

Pembekalan kemampuan produktif, selain dengan pemberian teori dan melaksanakan praktik, pada mata pelajaran produktif juga dilaksanakan Praktik Kerja Industri (prakerin) yang bekerja sama dengan instansi/perusahaan/industri yang relevan dengan profil kemampuan masing-masing program keahlian. (Hartono, w: 23-10-2005)

Hal ini disebabkan, pada lembaga SMK ini mengaitur Pendidikan Sistem Ganda. Pelaksanaan prakerin dimulai dari tingkat I dengan melakukan Kunjungan Industri, dan tingkat II melaksanakan Prakerin selama 1 bulan, sedangkan tingkat III juga melaksanakan Prakerin selama 3 bulan. Setelah pulang dari prakerin peserta diklat mengikuti tes Uji Kompetensi di bidang produktif yang dilaksanakan bekerjasama dengan instansi/perusahaan/industri yang relevan.

Dari uraian hasil wawancara peneliti di atas dapat disimpulkan bahwa dalam melaksanakan program pembelajaran atau program diklat tenaga pengajar SMK Negeri 1 Sukramahi Jember

telah berusaha secara maksimal dan dengan segala kreatifitas mengelola proses belajar mengajar yang di dalamnya segala sumber daya baik sumber daya manusia, maupun sumber daya lingkungan-sekolah yaitu sarana dan prasarana menjadikan proses belajar mengajar lebih efektif dan efisien yang memunculkan daya kreasi, daya nalar, eksperimen-eksperimen pula peserta didik. Jika dilihat dari sudut pandang otonomi daerah atau desentralisasi pendidikan, jelas sesuai dengan kehendak Otonomi Daerah yang menuntut kreatifitas sekolah dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan di daerah (Jember) yang berarti meningkatkan mutu pendidikan Nasional. Serta meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia di daerah yang berarti meningkatkan pula Sumber Daya Manusia di Indonesia. Karena otonomi daerah menuntut out put lembaga pendidikan relevan dengan dunia usaha. Dari situ lah dapat dikatakan bahwa lembaga pendidikan mempunyai kontribusi besar dalam pelaksanaan otonomi daerah tersebut.

c. Tahap perencanaan Proses Belajar Mengajar kurikulum Muatan Lokal di SMK Negeri 1 Sukorambi Jember

Evaluasi hasil belajar dilaksanakan setelah proses belajar mengajar selesai dilaksanakan. Fungsinya untuk mengetahui tercapai atau tidak tujuan pembelajaran (instruksional). Selain itu juga berguna sebagai umpan balik bagi perbaikan proses belajar mengajar, dan dasar dalam menyusun laporan hasil belajar siswa. Sedangkan tujuannya selain untuk

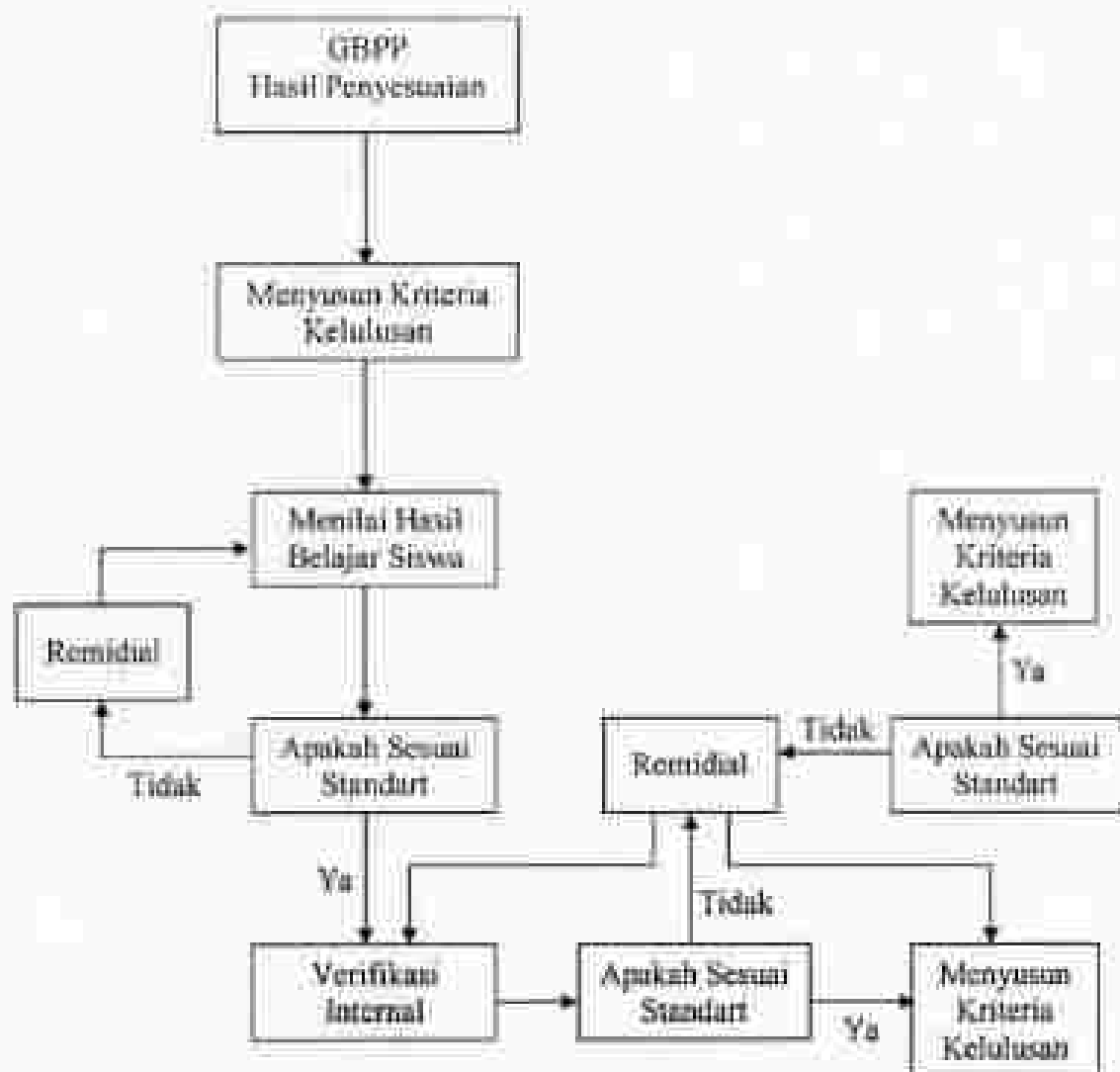
mendapatkan deskripsi kecakapan siswa, juga untuk mengetahui
kebutuhan proses belajar mengajar.

Dalam evaluasi hasil belajar terdapat dua komponen kegiatan
yaitu: 1) *Pengukuran* hasil belajar, yang merupakan proses
membandingkan antara pencapaian hasil belajar peserta diklat dengan
kriteria yang dipersyaratkan sebagai acuan dalam suatu kemampuan
tertentu. Hasil pengukuran tersebut berupa skor untuk kemampuan yang
bersangkutan. 2) *Penilaian*, merupakan proses membandingkan skor hasil
pengukuran pencapaian hasil belajar peserta diklat dengan standar
kualifikasi batas minimal yang dipersyaratkan. (Lilik, w : 22-10-2003)

Penilaian hasil belajar harus sesuai dengan prosedur antara lain;
(a) sebelum menilai hasil belajar siswa maka kriteria kelulusan harus sudah
ditentukan, kriteria ini mengacu pada GHPP hasil penyusunan; (b) setelah
melakukan penilaian, maka dilakukan penyesuaian hasil tersebut dengan
standar; (c) jika sudah sesuai standar maka diadakan verifikasi internal, dan
jika tidak sesuai standar, maka dilakukan remedial; (d) setelah dilakukan
verifikasi internal, maka dilaksanakan penyesuaian standar kembali, jika
sesuai baru menyusun kriteria kelulusan, dan jika tidak sesuai, maka perlu
dilakukan remedial.

PROSEDUR PENILAIAN BELAJAR

SMK NEGERI 1 SUKORAMBI JEMBER TAHUN PELAJARAN 2003/2004



Bagan 3.7 : Prosedur Penilaian Belajar SMK Negeri 1 Sukorambi Jember

Sumber Data: Dokumentasi Waka. Kurikulum SMK Negeri 1 Sukorambi Jember

Ruang lingkup penilaian atau evaluasi pembelajaran ini meliputi:

Evaluasi Formatif, Evaluasi Sub Sumatif, Sumatif, Diagnostik dan

Sertifikasi Kompetensi dan sertifikasi profesi. Sedangkan prinsip evaluasi

adalah: (a) evaluasi hasil belajar dilaksanakan secara tuntas, (b) evaluasi

hasil belajar merupakan bagian integral proses belajar mengajar, (c) evaluasi sebagai alat harus sesuai dengan aspek yang diukur yaitu aspek kognitif, afektif dan psikomotorik, (d) data hasil evaluasi harus dicatat dan diadministrasikan sebagai laporan. (Hariono, w : 23-10-2003)

Sesuai dengan wawancara peneliti dengan Waka. Kurikulum Bapak Hariono, bahwa karakteristik kurikulum berdasarkan pendekatan kurikulum berbasis kompetensi, maka evaluasi hasil belajar siswa dilakukan dengan 1) pendekatan sistem Penilaian Acuan Norma (PAN), di mana penilaian keberhasilan peserta diklat dibandingkan dengan keberhasilan kelompok yang ada, sehingga patokan kelulusan tidak ditentukan lebih dahulu. 2) Penilaian Acuan Patokan (PAP) *Criterion Referenced Assessment*, yaitu pendekatan evaluasi hasil belajar peserta diklat di mana penilaian keberhasilan peserta diklat dibandingkan dengan standar buku yang telah ditetapkan sebagai standar kemampuan minimal tertentu. (Hariono, w : 23-10-2003)

Jaminan mutu terhadap hasil evaluasi menjadi tanggung jawab internal sekolah sebagai *Quality Assurance (QA)* yang terdiri dari: Guru, Ketua bidang keahlian/program, dan wakil kepala sekolah, sebagai *Quality Control* terdiri dari: Majelis sekolah, MPKP dan Du/Di serta lembaga terkait.

Dalam proses mengevaluasi hasil belajar maka yang harus diperhatikan adalah:

1) Perencanaan

a) Perumusan Kriteria Unjuk Kerja (KUK)

Kriteria Unjuk Kerja (KUK) adalah pernyataan-pernyataan yang menggambarkan hasil akhir yang perlu dinilai bila sub kompetensi telah dicapai. Perumusan KUK dilakukan oleh guru, tim guru dan institusi pasangan.

Sedangkan sebelum pelaksanaan perumusan KUK harus diperhatikan antara lain:

- (1) Menunjukkan lingkup di mana pekerjaan tersebut akan dilakukan.
- (2) Mengkaitkan unit kompetensi dengan pengetahuan untuk mendukung unit tersebut dan kebutuhan industri.
- (3) Memvolucikan kepada apa yang dinilai.

b) Portfolio

Portfolio adalah kumpulan bukti fisik belajar peserta didik sesuai dengan persyaratan yang dituntut oleh suatu kompetensi yang didokumentasikan sebagai salah satu dasar untuk pengambilan keputusan bagi penilai (Assessor dan Verifier) apakah kompetensi atau sub kompetensi telah dicapai.

Komponen yang tercantum dalam portfolio antara lain :

- (1) Identitas peserta didik dan sekolah
- (2) Riwayat belajar sebelumnya yang relevan
- (3) Jenis kompetensi/sub kompetensi yang dipelajari

- (4) KUK dari setiap kompetensi dan sub kompetensi
- (5) Bukti fisik dari sub kompetensi yang telah dipelajari sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan.

Bukti fisik portfolio dapat berupa: gambar atau foto hasil pekerjaan peserta diklat, karya tulis, clipping jurnal, laporan praktik, benda hasil praktek dan lainnya sesuai dengan kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan.

Strategi evaluasi portfolio dapat dilakukan melalui tes lisan, praktek, simulasi dan tes tertulis oleh tim guru, tim Quality Assurance dan dan tim Quality Control. (Hartono, w. 23-10-2003)

- e) Membuat kisi-kisi soal, menyusun butir soal dan menelaah butir soal.

Hal ini sesuai dengan pendapat Ibu Lily :

Sebelum evaluasi hasil belajar siswa dilaksanakan, maka guru harus: (a) membuat kisi-kisi soal, kisi-kisi ini memuat kriteria tentang soal-soal yang akan disusun. (b) menyusun butir soal, butir soal disusun berdasarkan kisi-kisi dan harus sesuai dengan indikator, dan (c) menelaah butir soal, sebelum soal diberikan kepada peserta didik. (Lily, w. 23-10-2003)

d) Strategi Evaluasi

Penentuan nilai hasil belajar siswa peserta diklat dilaksanakan melalui evaluasi Sub Sumatif, Sumatif, UAS dan UAN. Untuk menjamin kebenaran dan obyektifitas maka evaluasi dilakukan oleh tim QA dan QC. Sedangkan evaluasi setiap

kompetensi dilakukan oleh guru atau tim guru pada setiap akhir sub kompetensi yang telah selesai dipelajari.

Verifikasi hasil penilaian oleh tim QA dilakukan oleh pihak sekolah yang terdiri dari guru Kejuruan, ketua bidang/program keahlian, dan wakil kepala sekolah. Verifikasi ini dilakukan pada setiap akhir kompetensi dengan mengambil beberapa peserta diklat secara random dengan maksud untuk menjamin mutu (*Quality Assurance*)

Verifikasi hasil penilaian oleh pihak eksternal dilakukan setelah verifikasi internal sekolah dengan mengambil sampel 10% dari kandidat dengan maksud untuk mengontrol hasil belajar peserta diklat pada setiap akhir kompetensi.

Sebagaimana dikatakan oleh Bapak Hartono:

Pelaksanaan verifikasi baik oleh tim QA maupun tim QC waktunya diatur oleh sekolah sesuai dengan kegiatan sekolah. Adapun yang diverifikasi dapat dipilih dari setiap sub kompetensi esensial saja yang dapat mencerminkan jaminan dan pengendalian mutu sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan industri daerah yang bersangkutan. (Hartono, w-23-10-2003)

2) Kelembagaan

a) Evaluator

Evaluator adalah tim yang menilai ketercapaian tujuan pembelajaran peserta Diklat. Berdasarkan tugasnya evaluator terdiri dari :

(1) Penilai (*Assessor*) adalah guru atau instruktur guru yang mengajar pada program diklat baik disekolah maupun di DU/DTL, tugasnya :

- (a) Memahami tujuan pembelajaran dan KUK.
- (b) Menyusun bahan, materi dan instrument evaluasi.
- (c) Melaksanakan evaluasi pada peserta didik.
- (d) Mengajukan hasil evaluasi kepada *Internal Verifier*.

(2) Pemeriksa hasil penilaian (*Verifier*) adalah tim yang berfungsi melaksanakan verifikasi terhadap nilai hasil evaluasi oleh assesor untuk menjamin kebenaran dan obyektivitas hasil penilaian, verifier terdiri dari :

Internal verifier, yaitu: Kepala Sekolah, Waka. Sekolah, Ketua bidang/program keahlian tugasnya:

- (a) Memahami tujuan pembelajaran dan KUK yang harus dikuasai peserta diklat.
- (b) Memantau pelaksanaan evaluasi yang dilakukan oleh guru *assessor*.
- (c) Melakukan verifikasi hasil penilaian oleh guru *assessor*.
- (d) Menguji peserta diklat secara sampling.
- (e) Menyusun umpan balik.
- (f) Mengkonfirmasi hasil verifikasi penilaian kepada guru.
- (g) Mengajukan hasil penilaian kepada *eksternal verifier*.

Eksternal verifier, yaitu sebagai pengendali mutu dilaksanakan oleh MS, MPKP, Asosiasi profesi, PPPG terkait dan perguruan tinggi yang relevan, dengan tugas:

- (1) Memahami tujuan pembelajaran dan KIK yang harus dikuasai peserta diklat.
- (2) Memantau pelaksanaan evaluasi yang dilakukan oleh guru /Asesor.
- (3) Melakukan verifikasi hasil penilaian oleh guru.
- (4) Menguji peserta diklat secara sampling.
- (5) Mengkonfirmasi hasil verifikasi penilaian kepada sekolah.
- (6) Menerbitkan sertifikasi kompetensi.

b) Pembimbing

Pembimbing adalah guru program diklat yang bertugas membimbing dan mengarahkan peserta diklat dalam menyusun dan melengkapi bukti fisik portfolio, meliputi:

- (1) Memeriksa bukti fisik setiap kompetensi/sub kompetensi yang dipelajari.
- (2) Memeriksa kesesuaian bukti fisik terhadap kriteria keberhasilan belajar yang dipelajari.
- (3) Membimbing dalam melengkapi bukti fisik yang sesuai. (Lilik, w. 23-10-2003)

Dari uraian tersebut jelas bahwa evaluasi di SMK Negeri 1 Sukorambi Jember direncanakan secara matang. Baik dari apa saja yang perlu dievaluasi (kognitif, afektif dan psikomotorik), dengan apa mengevaluasi (tes tulis maupun praktek dalam ujian formatif, sub samatif, samatif dan lain-lain), apa saja yang diperlukan dalam mengikuti evaluasi (portfolio atau bukti fisik yang lainnya), siapa yang mengevaluasi (evaluator) apa tugas dan wewenangnya dalam evaluasi. perencanaan tersebut dibuat sedemikian rupa oleh lembaga untuk efektifitas dan efisiensi pelaksanaan evaluasi. Sehingga nantinya diperoleh hasil obyektif dan memuaskan.

Hal ini jika dilihat dari sudut pandang otonomi daerah jelas sesuai dengan kebijakan otonomi daerah atau desentralisasi pendidikan, yang mengharapkan lembaga pendidikan untuk dapat melaksanakan evaluasi, dengan sistem evaluasi yang *komprehensif* yaitu meliputi seluruh dimensi baik pengetahuan, ketrampilan, kemampuan dan sikap. *Tersu Menoris* baik selama proses belajar mengajar berlangsung maupun pada waktu tertentu, dan *obyektif* karena tidak hanya pihak internal atau sekolah saja yang menilai tetapi juga pihak eksternal.

3) Mekanisme Penilaian

a) Kegiatan Belajar Mengajar

Proses belajar mengajar dilakukan melalui pembelajaran klasikal, studi pustaka, praktek di sekolah /industri/masyarakat,

observasi sesuai dengan KJK. Setiap peserta diklat berkewajiban untuk menghimpun bukti-bukti fisik hasil belajar yang diorganisasikan dalam bentuk portfolio.

b) Evaluasi

Evaluasi untuk sub kompetensi dilakukan evaluasi sub sumatif yang materinya terdiri dari pengetahuan, ketrampilan dan sikap. Pada akhir semester atau tingkat setiap peserta diklat dapat mengikuti evaluasi sumatif. Sedangkan pada akhir tingkat peserta diklat dapat mengikuti UAS/UAN yang hasilnya digunakan untuk rekomendasi penerimaan sertifikat kompetensi.

c) Verifikasi

Pada prinsipnya verifikasi yang dilakukan oleh pihak internal adalah untuk Quality Assurance (QA) dan Verifikasi pihak eksternal untuk Quality Control (QC).

Verifikasi oleh tim internal untuk menjamin kebenaran obyektivitas hasil penilaian sub sumatif (sub kompetensi), ini dilakukan secara random atau keseluruhan peserta diklat dengan memeriksa kembali bukti-bukti fisik portfolio, wawancara dan apabila perlu dengan mendemonstrasikan ketrampilannya. Sedangkan proses verifikasi oleh tim eksternal dilakukan dengan prosedur yang sama dengan proses verifikasi tim internal. (Hartono, w. 23-10-2003).

4) Pengolahan Hasil Evaluasi

Pengolahan hasil evaluasi di SMK Negeri 1 adalah sebagai berikut:

TABEL 3.5
CARA PENILAIAN KOMPONEN PRODUKTIF
SMK NEGERI 1 SUKORAMBI JEMBER
TAHUN PELAJARAN 2003/2004

NO	KOMPONEN	BOBOT (%)
1	Mengelola Usaha	20
2	Melaksanakan Proses Produksi & Pemasaran	70 *)
3	Mencatat & mengadministrasikan portfolio	10

*) Proses Produksi & Pemasaran (70 %), terdiri dari penilaian sbb:

NO	KOMPONEN	BOBOT (%)
1	Pengetahuan / Kognitif (NK)	20 %
2	Keterampilan / Psikomotorik (NP)	60 %
3	Sikap / Afektif (NAF)	20 %

$$\text{Nilai Proses Produksi} = \frac{(NK \times 20\%) + (NP \times 60\%) + (NAF \times 20\%)}{100}$$

Contoh Menghitung Nilai Sikap

$$\text{Rumus} = \frac{\text{Skor Perolehan}}{\text{Skor Tertinggi}} \times \text{Nilai Tertinggi} (100)$$

No	Attribute	SKOR PEROLEHAN										
		Believe					Evaluation					
		(Preferensi Oleh Siswa)					(Oleh Guru & DU/DI)					
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	
1	Diaptin					X			X			
2	Tekun					X					X	
3	Tanggung jawab					X					X	
4	Kreatifitas					X					X	
5	Teliti					X			X			
6	Taat Ataz					X			X			
7	Kerjasama					X						X
8	Kemandirian					X					X	

$$\text{- Attitude} = \sum H \times E$$

$$= (5 \times 3) + (5 \times 4) + (5 \times 4) + (5 \times 4) + (5 \times 5) + (5 \times 3) + (5 \times 5) \\ + (5 \times 4)$$

$$= 15 + 20 + 20 + 20 + 25 + 15 + 25 + 20$$

$$= 170$$

$$\text{- Skor Tertinggi dari 8 attribute} = 25 \times 8 = 200$$

$$\text{- Nilai Sikap Peserta} = \frac{170}{200} \times 100 = 85$$

MEMASUKKAN DALAM NILAI PRODUKTIF

NO	KOMPONEN	SKOR	BOBOT (%)
1	Pengetahuan / Kognitif (NK)	80	20 %
2	Keterampilan / Psikomotorik (NP)	90	60 %
3	Sikap / Afektif (NAF)	75	20 %

$$\text{Nilai Proses Produktif} = \frac{(NK \times 20) + (NP \times 60) + (NAF \times 20)}{100}$$

Nilai Proses Produktif =

$$\frac{(80 \times 20) + (90 \times 60) + (75 \times 20)}{100} = \frac{1600 + 5400 + 1500}{100} = 85$$

Nilai Kinerja / Kompetensi

Misalkan setelah diuji seorang peserta sbh :

NO	KOMPONEN	SKOR	BOBOT
1	Mengelola Usaha	60	20 %
2	Melaksanakan Proses Produksi & Pemasaran	85	70 %
3	Mencatat & mengadministrasikan portfolio	70	10 %

Maka nilai kinerja kompetensi peserta

$$= \frac{\sum (\text{Nilai Komponen} \times \text{Bobot Komponen})}{\sum \text{Bobot Komponen}}$$

$$= \frac{(60 \times 20) + (85 \times 70) + (70 \times 10)}{20 + 70 + 10}$$

$$= \frac{1200 + 5950 + 700}{100} = \frac{7850}{100} = 78,50$$

Sedangkan dalam proses evaluasi terdapat berbagai etika evaluasi yaitu norma yang harus ditaati dan diikuti dalam pelaksanaan penilaian atau evaluasi tersebut. Komponen etika evaluasi menyangkut hak dan kewajiban peserta diklat dan evaluator, agar hasil evaluasi dapat mencerminkan kondisi kemampuan peserta diklat yang sebenarnya. Etika tersebut antara lain:

- a) Terbuka, pelaksanaan evaluasi harus diberitahukan kepada peserta diklat terlebih dahulu, meliputi materi, kriteria keberhasilan, waktu dan metodenya.
- b) Jujur, penyelenggaraan evaluasi harus dilaksanakan secara jujur tanpa ada rekayasa dari pihak manapun.
- c) Sahih lingkungan, suasana evaluasi tidak merugikan peserta diklat yaitu tidak tegang, tidak menakutkan dan lain-lain.
- d) Pengumuman, hasil evaluasi diumumkan kepada peserta diklat. (Hartono, w: 23-10-2003)

Dari uraian dan hasil wawancara peneliti di atas, secara jelas dapat disimpulkan bahwa penilaian atau evaluasi di SMK NEGERI 1 Sukorambi Jember dilaksanakan sesuai dengan harapan dan tujuan pendidikan nasional yang tidak hanya menilai dari segi pengetahuan (kognitif), ketrampilan dan kemampuan (psikomotorik) tetapi juga dari segi sikap (afektif).

Dari segi kognitif dengan melaksanakan evaluasi bentuk tes, baik tes lisan maupun tulisan, sedangkan dari segi psikomotorik dapat

berupa tes untuk mendemonstrasikan atau mempraktekkan, dan yang terakhir dari segi afektif atau sikap. Dari segi afektif penilaian dapat dilaksanakan selain oleh guru juga peserta didik itu sendiri, yaitu dengan menilai diri sendiri setelah itu dikaji ulang oleh guru dengan menilai kembali apakah hasil menilai diri sendiri itu sesuai dengan apa yang nyata diperbuat. Menilai diri ini juga dapat dijadikan acuan dalam menilai peserta didik khususnya bidang afektif sebagai salah satu bahan penilaian dari keseluruhan yang harus dinilai dari diri peserta didik

C. Tema Penelitian

Boylan dan Bollen (dalam Khusnurridlo, 2001) mengartikan tema dalam penelitian sebagai konsep atau teori yang ditampilkan oleh data-data yang ditemukan dalam penelitian.

Untuk menggali fokus penelitian pengelolaan proses belajar mengajar di SMK Negeri 1 Sukorambi Jember Tahun Pelajaran 2003/2004 selain pokok-pokok temuan di atas berdasarkan paparan yang telah disajikan, penulis juga menampilkan tema-tema penelitian sebagai berikut :

1. Perencanaan Proses Belajar Mengajar Muatan Lokal di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Sukorambi Jember Dalam Perspektif Otonomi Daerah Tahun Pelajaran 2003/2004.

Pernyataan tema di atas juga didukung dengan data-data empirik yang ditemukan dalam kondisi lapangan yang telah diteliti. Ini juga didukung oleh ungkapan-ungkapan dari interview yang telah dilakukan oleh peneliti.

Menurut Bapak Hartono perencanaan proses pembelajaran program diklat di SMK Negeri 1 Sukorambi Jember harus dilaksanakan dengan melihat segi efektifitas dan efisiensi. Hal ini dimaksudkan selain mempertahankan mutu out put SMK Negeri 1 Sukorambi Jember juga ingin mengoptimalkan hasil dari proses belajar mengajar, sehingga potensi out put dapat berkembang lebih optimal.

Program pembelajaran harus memperhatikan aspek-aspek eksternal atau dunia kerja (pasar). Ini dimaksudkan untuk menggali informasi pasar beserta dinamikanya, sebagai bahan perencanaan dalam mengelola program diklat selanjutnya, sehingga dapat disesuaikan dengan program diklat yang akan dilaksanakan tersebut. Dalam hal ini sekolah tidak menutup diri atau eksklusif dari berbagai isu-isu yang berkembang di dunia luar. (Hartono, w. 23-10-2003)

Efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program diklat di dua tempat yaitu sekolah dan institusi pasangan menuntut perencanaan. Salah satunya dari segi waktu pelaksanaan, yaitu dengan melaksanakan *day release* dan *block release*.

Sedangkan menurut Ibu Lily mengatakan:

Dalam merencanakan proses belajar mengajar atau program diklat di SMK Negeri 1 Sukorambi Jember harus disediakan segala keperluan mengajar seperti program tahunan, semester, satpel, modul dan program untuk perbaikan dan pengayaan. Hal ini dimaksudkan selain mempermudah guru dalam melaksanakan proses belajar mengajar, juga akan bermanfaat dalam pencapaian efektifitas dan efisiensi pelaksanaan proses belajar mengajar tersebut. (Lily, w. 23-10-2003)

Selain apa yang tersebut di atas, yang perlu disiapkan guru sebelum melaksanakan proses belajar mengajar adalah metode serta penggunaan alat bantu mengajar. Ini dimaksudkan untuk mendukung usaha guru dalam menciptakan proses belajar mengajar yang efektif dan efisien juga

berjalan dalam interaksi yang dinamis. Sehingga peserta didik tidak bosan dengan metode yang monoton dan dapat secara aktif mengikuti program pembelajaran tersebut. Karena semua yang dilakukan guru dalam program pembelajaran harus mengacu pada kegiatan peserta didik.

Dari uraian ini jelas bahwa perencanaan proses belajar mengajar di SMK Negeri 1 Sukorambi Jember sesuai dengan jiwa otonomi daerah yang berusaha memberikan ruang gerak yang luas kepada lembaga pendidikan. Khususnya guru dalam melaksanakan proses belajar mengajar secara inovatif dan kreatif, agar lebih efektif dan efisien. Untuk itu perlu perencanaan yang dibuat secara matang oleh guru atau sekolah.

2. Pelaksanaan Proses Belajar Mengajar Muatan Lokal di Sekolah

Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Sukorambi Jember Dalam Perspektif Otonomi Daerah Tahun Pelajaran 2003/2004.

Pernyataan tema di atas didukung oleh data-data empirik di lapangan dan ditambah dengan interview yang dilakukan oleh peneliti, antara lain :

Dalam pelaksanaan proses belajar mengajar yang harus diperhatikan dan direncanakan lebih dahulu adalah tempat. Untuk melaksanakan program diklat tersebut. Sesuai dengan bentuk program pembelajaran di SMK Negeri 1 Sukorambi Jember yaitu program pendidikan dan pelatihan dengan Pendidikan Sistem Ganda, maka tempat pembelajaran selain di sekolah juga dilaksanakan di institusi pasangan sebagai mitra sekolah dalam melaksanakan program diklat.

Sebagaimana dikamkan oleh Bapak Hartono:

Hal ini dimaksudkan bahwa apa yang didapat dari sekolah tidak sepenuhnya dapat dipraktikkan di sekolah, karena terbatas dari sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh peserta didik. Untuk itu wawasan pengantar atau Du/Di dapat dijadikan tempat praktek. Selain alasan di atas bahwa yang paling esensial dalam hal ini bahwa out put pendidikan ini tidak hanya diserap oleh lembaga pendidikan tinggi saja, tetapi juga akan diserap di dunia kerja atau perusahaan yang terkait dan sesuai dengan keahlian. Untuk itu pelaksanaan di dua tempat adalah untuk mengefektifkan proses pembelajaran dalam menggabungkan antara teori dan praktik. (Hartono, w : 23-10-2003)

Pelaksanaan proses belajar mengajar atau Diklat menuntut kreatifitas guru dalam usaha pencapaian efektifitas dan efisiensi. Guru diharapkan dapat menyampaikan materi dengan jelas dan bahasa yang lugas. Guru juga harus dapat menumbuhkan daya nalar, daya kreasi dan rasa ingin tahu yang besar pada peserta didik.

Selain itu menurut Ibu Lily:

Metode yang digunakan oleh guru tidak hanya mengacu pada satu metode saja, tetapi lebih menggunakan metode yang variatif dan kombinasif disertai dengan eksperimen-eksperimen untuk menemukan sesuatu yang baru. Serta dengan mengondisikan lingkungan yang ada sehingga terjadi interaksi yang baik antara guru dan peserta didik. Selain itu peserta didik juga lebih termotivasi untuk terus mengikuti secara aktif proses belajar mengajar tersebut. (Lily, w : 23-10-2003)

Pelaksanaan proses belajar mengajar di SMK Negeri 1

Sukosmiti Jember, dilaksanakan berdasarkan prinsip efisiensi dan efektifitas pembelajaran yang menitik beratkan pada kegiatan peserta didik. Sehingga di sini guru tidak hanya sebagai sentral saja, tetapi lebih pada tugas membimbing dan memfasilitasi kegiatan belajar yang dilakukan oleh peserta didik.

3. Evaluasi Proses Belajar Mengajar Muatan Lokal di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Sukorambi Jember Dalam Perspektif Otonomi Daerah Tahun Pelajaran 2003/2004

Tema di atas didukung dengan data-data empirik dan ditambah dengan berbagai interview yang dilakukan oleh peneliti yang antara lain :

Pengukuran dan penilaian keberhasilan peserta didik dalam mencapai kemampuan harus didasarkan pada efektifitas dan efisiensi pencapaian tujuan lembaga yaitu menaekak sumber daya manusia berkualitas, dan sesuai dengan standar profesi (standar keahlian tamatan) yang telah ditetapkan, yang dilakukan melalui proses sistem penilaian dan sertifikasi yang disepakati bersama yaitu antara sekolah dan institusi paaangan. (Hartono, w : 24-10-2003)

Sesuai dengan tempat pembelajaran di SMK Negeri 1 Sukorambi Jember yang terdiri dari lembaga internal dan eksternal maka pelaksanaan evaluasi juga dilakukan oleh pihak internal yaitu sekolah sebagai tim QA dan pihak eksternal yaitu institusi pasangan sebagai tim QC. Hal ini dimaksudkan agar pelaksanaan penilaian di SMK Negeri 1 Sukorambi Jember lebih obyektif karena dievaluasi dan diverifikasi selain dari guru dan pihak sekolah yang lain juga pihak eksternal untuk menjaga obyektifitas pelaksanaan penilaian.

Ruang lingkup Evaluasi meliputi evaluasi formatif, sumatif, sub sumatif, dan diagnostik. Dilakukan secara terus-menerus baik selama proses belajar mengajar berlangsung maupun pada penilaian formatif, sumatif, sub sumatif dan diagnostik pada waktu tertentu. Evaluasi harus dilaksanakan secara tuntas atau dengan prinsip komprehensif yang meliputi penilaian aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. (Hartono, w : 24-10-2003)

Sebelum hasil evaluasi diolah maka yang perlu dipersiapkan sebagai bahan yang dievaluasi antara lain: Kriteria Urjuk Kerja (KUK) dan portfolio

sebagai bukti baik belajar siswa yang sesuai dengan persyaratan yang dituntut oleh suatu kompetensi. Pengumpulan portfolio ini dibimbing oleh guru yang memeriksa kesesuaian bukti baik tersebut terhadap kriteria keberhasilan.

Pengolahan hasil evaluasi khususnya pada proses produksi dan pemasaran merupakan hasil penilaian dari aspek pengetahuan (kognitif) sebanyak 20%, kemampuan (psikomotorik) sebanyak 60% dan aspek sikap (afektif) sebanyak 20%.

Penilaian sikap dapat dilakukan dengan menilai diri sendiri yaitu oleh peserta didik dan penilaian yang dilakukan oleh guru. Penilaian oleh guru digunakan untuk mengetahui sejauhmana sikap peserta didik dapat dinilai. (Hartono, w : 24-10-2003)

Jadi penilaian hasil belajar di SMK Negeri 1 Sukamiti Jember sesuai dengan harapan otonomi daerah dan desentralisasi pendidikan yang ingin melaksanakan penilaian dengan prinsip *komprehensif* yaitu mencakup penilaian kognitif, afektif dan psikomotorik. Secara *trial-meneraj* baik formatif, sumatif, sub sumatif maupun diagnostik. *Objektif* yaitu dilakukan oleh pihak internal dan eksternal.

D. Temuan Penelitian

Setelah mengadakan penelitian, dari hasil observasi, interview dan beberapa dokumen-dokumen, maka peneliti menemukan bebempa temuan-temuan penelitian yang akan dipaparkan dalam bab ini antara lain :

1. Pendidikan Sistem Ganda

Menurut Harok Hartono mengatakan sebagai berikut:

Pendidikan Sistem Ganda (PSG) adalah suatu bentuk penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan keahlian keturuan yang memadukan secara sistematis dan sinkron antara program pendidikan di sekolah dan program penguasaan keahlian yang diperoleh melalui praktik langsung di dunia kerja. (Hartono, W : 24-10-2003)

Dengan konsep Pendidikan Sistem Ganda, para lulusan SMK

Negeri 1 tidak saja dibekali dengan pengetahuan-pengetahuan dasar tentang dunia industri, melainkan langsung dengan dunia kerja nyata. Dengan begitu, PSG menjadikan para lulusan SMK tidak saja mempunyai kesempatan untuk melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi, melainkan juga mempunyai kualifikasi yang match dengan dunia usaha dan industri.

Penyelenggaraan Pendidikan Sistem Ganda secara umum bertujuan untuk menjawab tantangan industri. Namun secara rinci PSG bertujuan, pertama, menghasilkan tenaga kerja yang memiliki keahlian profesional, yaitu tenaga kerja yang memiliki tingkat kemampuan, kompetensi, dan etos kerja yang sesuai dengan tuntutan lapangan kerja. Kedua, meningkatkan dan memperkokoh keterkaitan dan kesepadanan antara lembaga pendidikan-pelatihan kejuruan dan dunia kerja. Ketiga, meningkatkan efisiensi proses pendidikan dan pelatihan tenaga kerja berkualitas profesional. Keempat, memberi pengakuan dan penghargaan terhadap pengalaman kerja sebagai bagian dari proses pendidikan.

Jadi Pendidikan Sistem Ganda (PSG) ini menurut Bapak Rudy :

Merupakan kerja sama yang win-win antara sekolah dan industri untuk memenuhi tugas masing-masing. Sekolah melakukan seragam

out sourcing yang dikerjakan di industri dalam bentuk alat, instruktur dan pengalamannya. Sedangkan industri melihat sekolah sebagai bagian dari HRD (Human Resource Department) mereka dalam mencetak tenaga ahli yang handal. Sehingga sumber-sumber (resource) yang dipergunakan bagi keduanya menjadi efektif dan efisien. Efektifitas dan efisiensi tersebut akhirnya dapat meningkatkan mutu produk industri dengan harga yang bersaing, sekaligus meningkatkan mutu pendidikan. (Rudy, w : 24-10-2003)

2. Curriculum Based-Training (CBT)

Curriculum Based-Training (CBT) adalah kurikulum berbasis kompetensi yang baru digulirkan SMK Negeri 1 Sakonambi Jember pada tahun pelajaran 2000/2001, dengan membuka program CBT Program Produksi Perairan Bersih Timbunan Pangan dan Hortikultura pada program keahlian Budidaya Tanaman dan Program Membudidayakan Ayam Pedaging/Broiler pada program keahlian Budidaya Ternak. Hal ini dirasa perlu karena tuntutan perusahaan akan spesialisasi program. Peserta diklat yang masuk dalam program CBT ini disesuaikan dengan permintaan perusahaan, selain itu peserta diklat yang masuk harus diseleksi terlebih dahulu dengan prioritas nilai dari beberapa bidang studi (IPA) yang tinggi.

3. Penilaian Aspek Afektif

Penilaian aspek afektif selalu dilakukan oleh peserta diklat sendiri juga dilakukan oleh guru. penilaian yang dilakukan oleh peserta diklat terhadap diri mereka sendiri dimaksudkan untuk menilai sejauhmana tingkat percaya diri, kejujuran, tanggung jawab peserta diklat tersebut dengan apa yang dimilainya dan apa yang nyata mereka lakukan. Hal ini dilakukan agar peserta diklat dapat introspeksi diri, yang kemudian menyadari dan memperbaiki sikap mereka. Setelah penilaian yang dilakukan oleh peserta

diklat selesai baru dilakukan penilaian oleh guru, sehingga guru dapat mengetahui bagaimana sikap anak didik, dan untuk selanjutnya dilakukan pembimbingan sebagai tindak lanjut.

4. Training Production Units (TPU)

Untuk menindak lanjut pelaksanaan pendidikan dan latihan di sekolah, maka sekolah bekerjasama dengan pihak luar membentuk Training Production Units (TPU) yaitu tempat belajar produksi. Peserta diklat dapat belajar memproduksi sekaligus memasarkan hasil produksi. di SMK Negeri 1 Sukorambi Jember terdapat hasil produksi Nita De Coca, Keti dan sebagainya.

Tujuan dibentuknya Training Production Units (TPU) ini, yaitu untuk melatih peserta diklat dalam memproduksi dan memasarkan hasil produksi. Training Production Units (TPU) ini, dikelola dengan skala bisnis yang sesuai dengan standar ketentuan perusahaan, jadi harus ada kontrak dengan perusahaan dan keuntungannya dapat menjadi pemasukan atau kas sekolah. (Hartono, w : 16-06-2004)

5. Proyek Usaha Mandiri Alumni (PUMA)

Proyek Usaha Mandiri Alumni (PUMA) adalah proyek yang dibayai oleh sekolah untuk modal usaha alumni. Alumni atau lulusan SMK tidak semua bekerja pada jalur formal tetapi juga non formal dengan membuka usaha sendiri. Jenis-jenis produksi disesuaikan dengan kondisi daerah alumni masing-masing. Misalnya daerah penghasil tempe, maka sekolah memberi bantuan modal bagi alumni untuk pembuatan tempe atau nata de coco dan sebagainya. Modal dari sekolah tersebut dapat dikembalikan setelah mendapatkan hasil dari usaha tersebut. Dari situlah maka terbentuk

organisasi yang dikenal dengan SP3 yaitu Siswa Penggerak Pembangunan

Pedesaan: (Hartono, w : 16-08-2004)

6. Dampak Otonomi Daerah Bagi SMK Negeri 1 Sukorambi Jember

Menurut Dampak Hartono sebagai berikut

Otonomi daerah membawa dampak negatif sekaligus menjadi dampak positif, bahwa semua anggaran untuk sekolah SMK dimasukkan dengan sekolah umum yang jelas-jelas berbeda kebutuhannya, jika masa sentralisasi pemenuhan sarana pembelajaran seperti alat peraga lebih cepat, maka pada masa desentralisasi harus lebih cepat memenuhi kekurangan kebutuhan tersebut. Untuk itu lembaga pendidikan SMK bekerjasama dengan institusi pasangan berusaha untuk memenuhi segala kebutuhan yang diperlukan peserta didik. Jadi adanya otonomi daerah menjadikan lembaga pendidikan lebih kreatif dalam mengatur rumah tangganya sendiri. (Hartono, w : 22-10-2003)

Menang idialnya, otonomi daerah ini diharapkan mempunyai dampak positif yaitu dengan memberi keleluasaan lembaga pendidikan untuk mengelola rumah tangganya sendiri. Begitu juga sebaliknya lembaga pendidikan memberi kontribusi benar dalam pelaksanaan otonomi daerah itu sendiri, yaitu mendukung pelaksanaan otonomi daerah dengan menjadikan out put pendidikan menuju masyarakat otonom yang mandiri dan bertanggung jawab, serta mempunyai jiwa wirausaha. Akan tetapi idialisme tersebut di SMK Negeri 1 belum sepenuhnya dapat dirasakan, jadi masih perlu waktu untuk dapat merasakan hasil dari kebijakan otonomi tersebut.

E. Pembahasan Hasil

Berdasarkan dari paparan data, tema, dan juga temuan-temuan penelitian maka peneliti akan mengadakan pembahasan hasil penelitian, antara lain :

1. Perencanaan Proses Belajar Mengajar Muatan Lokal di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Sukorambi Jember Dalam Perspektif Otonomi Daerah Tahun Pelajaran 2003/2004

Data lapangan menunjukkan bahwa perencanaan proses belajar mengajar muatan lokal di SMK Negeri 1 Sukorambi Jember Tahun Pelajaran 2003/2004 jika dilihat dari sudut pandang otonomi daerah sudah sesuai dengan harapan dan tujuan otonomi daerah. Karena sebelum proses belajar mengajar dilaksanakan perlu perencanaan yang matang untuk mencapai efektifitas dan efisiensi pada pelaksanaan proses belajar mengajar yang akan dilakukan selanjutnya.

Sebelum melaksanakan proses belajar mengajar, maka lembaga SMK Negeri 1 Sukorambi Jember mengadakan analisis SWOT untuk mengetahui kondisi pasar dan dinamikanya serta menggali peluang-peluang pasar untuk selanjutnya mengisi peluang-peluang tersebut dengan potensi-potensi lembaga. Ini berarti lembaga SMK tidak bersikap eksklusif dengan menutup diri dari berbagai informasi luar.

Perencanaan yang harus disiapkan oleh guru dalam proses belajar mengajar di SMK Negeri 1 Sukorambi Jember meliputi; program tahunan, Program semester, satuan pelajaran modul, program perbaikan dan pengayaan. (Lily, w : 22-10-2003)

Penggunaan metode yang variatif dan kombinatif serta penggunaan alat bantu merupakan usaha yang dilakukan oleh guru dalam mencapai efektifitas dan efisiensi proses belajar mengajar, sehingga peserta didik dapat memahami materi secara cepat dan tepat, serta dapat secara aktif mengikuti proses belajar mengajar tersebut. (Lily, w : 22-10-2003)

Karena program diklat dilaksanakan di dua tempat maka SMK Negeri 1 harus membuat perencanaan yang disepakati oleh kedua belah pihak yaitu sekolah dan dunia usaha/industri, karena apa yang menjadi program SMK berarti juga menjadi program institusi pasangannya. Untuk itulah program diklat direncanakan dengan sistem ganda (PSC), dengan maksud untuk mencapai efektifitas dan efisiensi proses belajar mengajar di SMK Negeri 1 Sukorambi Jember. Pendidikan Sistem Ganda bertujuan untuk mempraktekkan teori yang didapat di sekolah dengan bukti nyata di lapangan. Untuk itu direncanakan bentuk pelaksanaan *day release* dan *block release*. (Hartono, w : 24-10-2003)

2. Pelaksanaan Proses Belajar Mengajar Muatan Lokal di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Sukorambi Jember Dalam Perspektif Otonomi Daerah Tahun Pelajaran 2003/2004

Pelaksanaan proses belajar mengajar muatan lokal di SMK Negeri 1 Sukorambi Jember Tahun Pelajaran 2003/2004 jika dilihat dari perspektif otonomi daerah jelas sesuai dengan tujuan otonomi daerah, yaitu pada desentralisasi pendidikan ingin mewujudkan *out put* pendidikan berkualitas yang relevan dengan dunia kerja. Untuk mencapai itu maka berbagai usaha dilaksanakan demi ketercapaian efektifitas dan efisiensi demi mewujudkan cita-cita otonomi daerah.

Pelaksanaan proses belajar mengajar di SMK Negeri 1 Sukorambi Jember mengacu pada prinsip efektifitas dan efisiensi, untuk itu pelaksanaan proses belajar mengajar pada dua tempat (sekolah dan perusahaan) harus dapat dilaksanakan dengan tujuan yang seharusnya dicapai. Bentuk pelaksanaan

proses belajar mengajar tersebut berupa pemberian teori dan praktek di sekolah, juga praktek kerja industri di dunia usaha atau industri. Sehingga lembaga pendidikan relevan dengan dunia kerja. (Hartono, w.23-10-2003)

Secara operasional pelaksanaan proses belajar mengajar di SMK Negeri 1 Sukorambi Jember oleh guru adalah bahwa guru menyampaikan materi dengan jelas dan bahasa lugas, serta dapat menggunakan metode yang tepat dan alat bantu yang sesuai sehingga dalam interaksi antara guru dan peserta didik tersebut dapat memunculkan daya nalar, kreasi, rasa ingin tahu dan eksperimen-ekaperimen. Ini berarti memumbuhkembangkan potensi-potensi yang dimiliki oleh peserta didik.

Sebagaimana dikatakan oleh Bapak Hartono :

Dalam pelaksanaan proses belajar mengajar di SMK Negeri 1 Sukorambi Jember juga mengacu pada kegiatan siswa. Di sini siswa dituntut untuk aktif dalam proses belajar mengajar, sedangkan guru tidak lagi menjadi sentral, melainkan hanya sebagai pembimbing dan fasilitator peserta didik. (Hartono, w.23-10-2003)

3. Evaluasi (penilaian) Proses Belajar Mengajar Muatan Lokal di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Sukorambi Jember Dalam Perspektif Otonomi Daerah Tahun Pelajaran 2003/2004

Evaluasi atau penilaian yang dilakukan di SMK Negeri 1 Sukorambi Jember Tahun Pelajaran 2003/2004 jika dilihat dari sudut pandang otonomi dan desentralisasi pendidikan sudah memenuhi persyaratan, yaitu penilaian dilakukan secara komprehensif, teras-menieras dan obyektif. Hal ini sesuai dengan data yang diperoleh peneliti baik dari hasil wawancara maupun hasil observasi, antara lain :

Evaluasi dilaksanakan secara komprehensif, meliputi evaluasi pada aspek kognitif (pengetahuan), evaluasi pada aspek efektif (sikap) dan evaluasi pada aspek psikomotorik (ketrampilan) dari ketiga aspek tersebut akan diperoleh sumber daya manusia yang tidak hanya berkualitas dari segi pengetahuan saja akan tetapi juga mempunyai sikap jujur, bertanggung jawab serta mempunyai kepribadian yang tangguh dan mandiri, sehingga dapat membawa perubahan-perubahan besar pada masyarakat lingkungan dimana mereka tinggal dan menjadikan kehidupan masyarakat menjadi lebih sejahtera. (Hartono, w : 24-10-2003)

Sedangkan Menurut Ibu Lily mengatakan

Pelaksanaan evaluasi di SMK Negeri 1 Sukorambi Jember seperti yang dikemukakan Ibu Lily juga dilakukan secara terus menerus, baik pada masa berlangsungnya proses belajar mengajar, maupun pada waktu tertentu yang tertuang dalam bentuk evaluasi formatif, sumatif, sub sumatif, diagnostik dan sebagainya. Hal ini dimaksudkan untuk selalu mengevaluasi peserta didik dari segala aspeknya agar dapat diperoleh hasil optimal. (Lily, w : 22-10-2003)

Evaluasi juga dilaksanakan selain oleh pihak internal dalam hal ini sekolah juga oleh pihak eksternal yaitu institusi pasangan. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin obyektivitas hasil penilaian, sehingga hasil penilaian tersebut benar benar mencerminkan kondisi peserta didik atau benar-benar sesuai dengan obyek yang dievaluasi. (Hartono, w : 24-10-2003)

F. Maksud Penelitian

Berdasarkan kajian-kajian di atas, dan sejalan dengan penelitian yang telah dikemukakan, maka yang dapat diungkapkan dalam skripsi ini adalah :

1. Perencanaan Proses Belajar Mengajar Muatan Lokal di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Sukorambi Jember Dalam Perspektif Otonomi Daerah Tahun Pelajaran 2003/2004

Jika dilihat dari sudut pandang otonomi daerah, maka Perencanaan proses belajar mengajar muatan lokal di SMK Negeri 1 Sukorambi Jember Tahun Pelajaran 2003/2004 sudah sesuai dengan harapan otonomi daerah khususnya pada pelaksanaan desentralisasi pendidikan yang menuntut lembaga pendidikan untuk lebih kreatif dalam mencapai efektifitas dan efisiensi pembelajaran. Perencanaan pembelajaran yang efektifitas dan efisiensi tersebut meliputi:

- a. SMK Negeri 1 Sukorambi Jember sebelum melaksanakan pembelajaran melakukan perencanaan dengan mengadakan analisis SWOT untuk mengetahui perkembangan dunia luar, sehingga pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan pasar.
- b. Guru-guru di SMK Negeri 1 Sukorambi Jember selalu membuat perencanaan untuk mempersiapkan pelaksanaan proses belajar mengajar, agar efektif dan efisien, yaitu dengan perencanaan program tahunan, program semester, program satpel, program modul dan program perbaikan dan pengayaan.
- c. Karena pendidikan di SMK Negeri 1 Sukorambi Jember menggunakan Pendidikan Sistem Ganda (PSG), maka pelaksanaan proses belajar mengajar diadakan pada dua tempat yaitu sekolah dan institusi pasangan atau dunia usaha dan industri. Yang harus direncanakan sebelum proses

belajar mengajar dilaksanakan di dua tempat tersebut adalah waktu pelaksanaan yang terdiri dari day release dan block release.

2. Pelaksanaan Proses Belajar Mengajar Muatan Lokal Di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Sukorambi Jember Dalam Perspektif Otonomi Daerah Tahun Pelajaran 2003/2004

Jika dilihat dari sudut pandang otonomi daerah, maka Pelaksanaan proses belajar mengajar muatan lokal di SMK Negeri 1 Sukorambi Jember Tahun Pelajaran 2003/2004 dilaksanakan sesuai dengan harapan otonomi daerah khususnya pada pelaksanaan desentralisasi pendidikan yang menuntut pembelajaran di lembaga sekolah relevan dengan dunia usaha, dan diharapkan pelaksanaan tersebut efektif dan efisien dengan cara sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan proses belajar mengajar di SMK Negeri 1 Sukorambi Jember diadakan di dua tempat (sekolah dan institusi pasangan/perusahaan) dan disesuaikan dengan tujuan yang seharusnya dicapai. Bentuk pelaksanaan proses belajar mengajar tersebut berupa pemberian teori dan praktik di sekolah, juga praktik di dunia usaha atau industri. Sehingga lembaga pendidikan relevan dengan dunia kerja. Praktik di lembaga SMK Negeri 1 ini tersebut dikenal dengan istilah prakern atau Praktek Kerja Industri. Pelaksanaan prakern dimulai dari tingkat I dengan melakukan kunjungan industri sedangkan tingkat II melaksanakan prakern selama 1 bulan dan tingkat tiga dilaksanakan selama 3 bulan. Sedangkan waktunya sesuai ketentuan lembaga dengan sistem day release dan block release.

- b. *Secara operasional* proses belajar mengajar di SMK Negeri 1 Sukorambi Jember Tahun Pelajaran 2003/2004 dilaksanakan melalui tiga tahap yaitu tahap membuka pembelajaran, tahap melaksanakan pembelajaran dan tahap menutup pembelajaran. Pada tahap membuka guru harus dapat memahami kondisi kelas yang meliputi lingkungan dan peserta didik itu sendiri, sedangkan dalam melaksanakan pembelajaran guru menyampaikan materi dengan jelas dan bahasa lugas, serta menggunakan metode-metode yang sesuai dengan kondisi saat itu. Guru juga menggunakan alat bantu berupa gambar ataupun benda-benda lain yang lebih bersifat edukatif untuk memudahkan peserta didik dalam memahami materi, sehingga pada diri peserta didik dapat tumbuh daya kreasi, daya nalar, serta dapat menumbuhkan rasa ingin tahu yang selanjutnya ingin bereksperimen. Untuk menutup pembelajaran guru dapat menyimpulkan materi hari itu, agar peserta didik mengetahui apa yang mereka dapatkan pada hari itu.
- c. *Pelaksanaan proses belajar mengajar* Di SMK Negeri 1 Sukorambi Jember, dilaksanakan berdasarkan prinsip efisiensi dan efektifitas pembelajaran yang lebih beratkan pada kegiatan peserta didik. Sehingga di sini guru tidak hanya sebagai sentral saja, tetapi lebih pada tugas membimbing dan memfasilitasi kegiatan belajar yang dilakukan oleh peserta didik.

3. Evaluasi (penilaian) Proses Belajar Mengajar Muatan Lokal Di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Sukorambi Jember Dalam Perspektif Otonomi Daerah Tahun Pelajaran 2003/2004

Jika dilihat dari sudut pandang otonomi daerah, maka pelaksanaan evaluasi di SMK Negeri 1 Sukorambi Jember Tahun Pelajaran 2003/2004 sudah sesuai dengan harapan otonomi daerah khususnya desentralisasi pendidikan bahwa lembaga pendidikan dapat melaksanakan evaluasi secara komprehensif, terus menerus dan obyektif, untuk mencetak *out put* pendidikan menjadi sumber daya manusia berkualitas sesuai dengan tujuan pendidikan baik lokal maupun nasional. Evaluasi di SMK Negeri 1 Sukorambi Jember Tahun Pelajaran 2003/2004 adalah sebagai berikut:

- a. Dilaksanakan secara komprehensif, yang meliputi seluruh dimensi tujuan pendidikan dan menigena pada seluruh aspek potensi peserta didik, baik aspek kognitif, afektif dan psikomotorik.
- b. Evaluasi di SMK Negeri 1 Sukorambi Jember dilaksanakan secara terus-menerus, baik selama proses belajar mengajar tersebut berlangsung maupun pada waktu tertentu seperti formatif, sub sumatif, sumatif maupun diagnostik.
- c. Evaluasi di SMK Negeri 1 Sukorambi Jember juga dilaksanakan dengan obyektif, yang melibatkan pihak eksternal/pihak luar di samping pihak internal/lembaga sekolah, sebagai evaluator dan verifier.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari paparan data, temua penelitian, temuan-temuan penelitian, pembahasan hasil penelitian dan makna penelitian tentang pengelolaan proses belajar mengajar muatan lokal di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Sukorambi Jember Dalam Perspektif Otonomi Daerah Tahun Pelajaran 2003/2004 maka dapat disimpulkan:

1. Perencanaan proses belajar mengajar di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Sukorambi Jember Tahun Pelajaran 2003/2004 sesuai dengan kehendak otonomi daerah.
2. Pelaksanaan proses belajar mengajar di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Sukorambi Jember Tahun Pelajaran 2003/2004 sesuai dengan kehendak otonomi daerah.
3. Evaluasi proses belajar mengajar di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Sukorambi Jember Tahun Pelajaran 2003/2004 sesuai dengan kehendak otonomi daerah.

B. Saran-Saran

Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa pengelolaan kurikulum khususnya pada proses belajar mengajar di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)

Negeri 1 Sukorambi Jember Tahun Pelajaran 2003/2004 dilihat dari sudut pandang otonomi daerah telah sesuai dengan kehendak otonomi daerah.

Agar kesesuaian tersebut dapat dipertahankan dan ditingkatkan oleh lembaga SMK Negeri 1 Sukorambi Jember, maka peneliti menyarankan

1. Kepada Kepala Dispendik Kabupaten Jember

- a. Agar senantiasa memberikan evaluasi dan motivasi terhadap kinerja setiap lembaga pendidikan khususnya SMK Negeri 1 Sukorambi Jember.
- b. Untuk lebih memasyarakatkan kebijakan otonomi daerah kepada masyarakat luas termasuk lembaga pendidikan, khususnya SMK Negeri 1 Sukorambi Jember, agar persepsi masyarakat tentang otonomi dapat dipadukan. Sehingga masyarakat akan berpartisipasi untuk selalu mendukung dan mengontrol pelaksanaan otonomi di daerah.
- c. Agar lebih dapat meningkatkan sikap dan mentalitas berani dalam mengambil inisiatif dan prakarsa untuk melaksanakan fungsinya. Sehingga pelaksanaan desentralisasi pendidikan dapat lebih cepat diimplementasikan.

2. Kepada Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Sukorambi Jember

- a. Agar senantiasa memberikan evaluasi dan motivasi terhadap kinerja guru-guru dan staf di lembaga SMK Negeri 1 Sukorambi Jember, agar mereka dapat melaksanakan tugas masing-masing seoptimal mungkin.

- b. Selalu membina semua civitas akademika untuk selalu mengembangkan keistimewaan mereka sehingga dapat meningkatkan kualitas kinerja masing-masing.
- c. Bersama-sama dengan segenap civitas akademika untuk meningkatkan kualitas *our pro* pendidikan dengan meningkatkan kualitas program dan proses pembelajaran.

3. Kepada Wakil Kurikulum SMK Negeri 1 Sukorambi Jember

- a. Selalu menjaga, meningkatkan dan mengembangkan relevansi kurikulum dengan dunia usaha.
- b. Untuk lebih kreatif dalam memberdayakan potensi-potensi sekolah.
- c. Untuk dapat melakukan analisis *SMART* bagi peningkatan mutu *our pro* yang berarti meningkatkan mutu pendidikan pula.

4. Kepada Para Guru SMK Negeri 1 Sukorambi Jember

- a. Untuk dapat meningkatkan kualitas proses belajar mengajar sesuai dengan kemajuan teknologi.
- b. Agar dapat lebih memperhatikan segala potensi peserta didik, yang akhirnya dapat ditumbuh-kembangkan secara optimal.
- c. Untuk selalu berusaha memberikan yang terbaik bagi peserta didik, untuk cita-cita bersama bagi kehidupan peserta didik itu sendiri, juga bagi masyarakat pada umumnya yang berarti meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Aqih, Zainal, 2002, *Profesionalisme Guru Dalam Pembelajaran*, Sambaya, Inan Cendekia.
- Bastian, Auliya Reza, 2002, *Reformasi Pendidikan (Langkah-Langkah Pembaharuan Dan Pemberdayaan Pendidikan Dalam Rangka Desentralisasi Sistem Pendidikan Indonesia)*, Yogyakarta, Lappera Pustaka Utama.
- Daryanto, H., 1999, *Evaluasi Pendidikan*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Depug RI, 1992, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Semarang, PT. Tanjung Mas Inti Semarang.
- Dimiyati, 1995, *Cakrawala Pendidikan (Majalah Ilmiah Pendidikan)*, Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat IKIP Yogyakarta.
- Dimiyati, 2002, *Belajar Dan Pembelajaran*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Dirjen Pndasmen, 1997, *Perangkat Pengelolaan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama*, Jakarta, Depdiknas.
- Hamalik, Oemar, 2002, *Perencanaan Pengajaran Berdasarkan Pendekatan Sistem*, Jakarta, Bumi Aksara.
- Irianto, Junaf, 2001, *Ins-Din Strategis Pengembangan Sumber Daya Manusia*, Jatin, Inan Cendekia.
- Jahid, Fasih, 2001, *Reformasi Pendidikan Dalam Konteks Gerakan Daerah*, Yogyakarta, Adicita Karya Nusa.
- Khasanah, 2001
- Mulyana, E., 2003, *Kurikulum Berbasis Kompetensi (konsep, karakteristik, dan implementasi)*, Bandung, PT. Remaja Rosdakarya.
- Neuwiton, S., 2003, *Asas-Asas Kurikulum*, Jakarta, PT. Bumi Aksara.
- Nurdin, Syafruddin, 2002, *Guru Profesional Dan Implementasi Kurikulum*, Jakarta, Ciputat Pers.
- Pemkab Jember, 2001, *Perencanaan Strategik (RENSTRA) Pemerintah Kabupaten Jember Tahun 2002-2006*.
- Pemkab Jember, 2001, *Pola Dasar Pembangunan Kabupaten Jember Tahun 2002-2006*.

- Pemkab Jember, 2000, *Fusi, Misi dan Strategi Pembangunan Pendidikan Dalam Rangka Menuju Era Otonomi Daerah*.
- Romael, Sjahidit, 2003, *Mengurai Benang Kusut Pendidikan (penyusunan para pakar pendidikan)*, Jakarta, Pustaka Pelajar.
- Sidi, Indra dju, 2001, *Mengaji Masyarakat Belajar (Masyarakat Paradigma Baru Pendidikan)*, Jakarta, Pustaka Pelajar.
- Sudjana, Nana, 2004, *Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar*, Bandung, Rosdakarya.
- Suryosubroto, B., 1997, *Proses Belajar Mengajar Di Sekolah*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Syukuran, HR, 2002, *Titik Temu Dalam Dunia Pendidikan*, Jakarta, Nuansa Madani.
- Tilau, H.A.R., 2002, *Pendidikan Untuk Masyarakat Indonesia Baru*, Jakarta, Grafindo.
- Usman, Uzer, 1999, *Mengjadi Guru Profesional*, Bandung, Rosdakarya.
- UU RI No. 20 Tahun 2003 "Tentang Sistem Pendidikan Nasional" Bandung, Cim Uebaca.

MATERIS PENELITIAN

JUDUL	VARIABEL	SUB VARIABEL	INDIKATOR	SUMBER DATA	METODE PENELITIAN	FOKUS MASALAH
Penyelesaian Kurikulum di Sekolah Menengah Ketumuan (SMK) Negeri 1 Sukorambi Jember Dalam Perspektif Oronomi	1. Oronomi Dierah	1. Oronomi Dierah	UU No. 22 TH. 1999 UU No. 25 TH. 1999	1. Dokumen a. Waka Kurikulum b. Guru Mata Pelajaran 2. Keputusahan	1. Pendekatan Penelitian Kualitatif 2. Penentuan Sampel Purposive Sampling 3. Metode Pengumpulan Data: a. Interview b. Observasi c. Dokumenter d. Keputusahan 4. Analisis Data Deskriptif	1. Bagaimana Perencanaan Proses Belajar Mengajar (PBM) di SMK Negeri 1 Sukorambi Jember Dalam Perspektif Oronomi Dierah Tahun Pelajaran 2003/2004
Penyelesaian Kurikulum di Sekolah Menengah Ketumuan (SMK) Negeri 1 Sukorambi Jember Dalam Perspektif Oronomi Dierah Tahun Pelajaran 2003/2004	2. Oronomi Dierah	2. Desentralisasi Pendidikan	Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 Undang-Undang No. 25 Tahun 1999			2. Bagaimana Pelaksanaan Proses Belajar Mengajar (PBM) di SMK Negeri 1 Sukorambi Jember Dalam Perspektif Oronomi Dierah Tahun Pelajaran 2003/2004
						3. Bagaimana Evaluasi (Penilaian) Proses Belajar Mengajar (PBM) di SMK Negeri 1 Sukorambi Jember Dalam Perspektif Oronomi Dierah Tahun Pelajaran 2003/2004

JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

No	Hari/Tanggal	Jenis Kegiatan	Paraf
1.	21-10-2003	Menyerahkan Surat Pengantar Penelitian dari STAIN Jember serta observasi awal Wawancara dengan Bpk. Hartono tentang alur program diklat, perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi Proses Belajar Mengajar di SMKN 1 Sukorambi Jember Wawancara dengan Ka. TU tentang sejarah dan perkembangan SMKN 1 Sukorambi Jember.	
2.	22-10-2003	Wawancara dengan Bpk Hartono tentang proses penerimaan input dan dampak Otonomi Daerah pada lembaga SMKN 1 Sukorambi Jember	
3.	23-10-2003	Wawancara dan observasi dengan Ibu Lilik tentang perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi proses belajar mengajar di kelas SMKN 1 Sukorambi Jember	
4.	24-10-2003	Wawancara dengan Bpk. Rusli tentang Pendidikan Sistem Ganda (PSG) dan dampak Ooda pada SMKN 1 Sukorambi Jember Wawancara dengan Bpk Hartono tentang pelaksanaan dan mekanisme evaluasi hasil belajar peserta diklat SMKN 1 Sukorambi Jember	
5.	16-06-2004	Wawancara dengan Bpk. Hartono tentang training Production Units dan Proyek Usaha Mandiri Alumni SMKN 1 Sukorambi Jember.	
6.	08-07-2004	Meminta Surat Keterangan selesai penelitian dari SMKN 1 Sukorambi Jember	



Mengetahui,
Kepala Sekolah SMKN 1 Sukorambi Jember

KESTANTO, S. Pi
NIP. 130 933 240



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PENDIDIKAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI 1 SUKORAMBI
(KELOMPOK PERTANIAN DAN KEHUTANAN)
Jl. Brajajaya No. 55 Kotak Pos 134 Telp. (0331) 487535 Fax. (0331) 422686 Jember 68101
E-mail: smkn1sukorambi@yahoo.com

SURAT KETERANGAN:
Nomor : 0313/104.32/SMK.05/PP/2004

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Sukorambi Kabupaten Jember, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : EI - Fitriyani
NIM : 084 993 175
Jurusan : Tarbiyah / Kependidikan Islam

Telah melaksanakan penelitian dengan judul : Pengelolaan Kurikulum di SMK Negeri 1 Sukorambi Jember Dalam Perspektif Otonomi Daerah Tahun 2003/2004.

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 9 Juli 2004
Kepala Sekolah


KUSANTO, S.Pd.
NIP. 30933240



DEPARTEMEN AGAMA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI

Jl. Sumat. No. 94 Margil, Telp. : (0337) 487650, 427025 Fax. (0337) 427005, Kota Pas. 60136
Website : <http://stain-jember.go.id> - e-mail : stainjember@hotmail.com

J E M B E R

Nomor : ST.08/11.00/634/2003

Jember, 12 Oktober 2003

Lampiran :

Kejada Yll.

Tujuan :

Penelitian Tatak
Penyusunan Skripsi

Dr. Keryta Anandita

St. T. Pendidikan Jember

di J E M B E R

Assalamu'alaikum Murchamanulohi Wabarrokatoh.

Dengan ini kami mohon dengan hormat agar mahasiswa berikut ini

Nama

KI. Fitriyanti

NIM

004 203 175

Semester/taun

3 / 2003

dalam rangka penyelesaian-penyusunan Skripsi, agar diizinkan untuk pengabdian
riase/penelitian selama _____ hari di lingkungan daerah _____ dan
menghubung:

1. Suplex Kurikulum

2. Fath Qur'a

3. Rizka / Rizki

4. _____

Penelitian yang akan dilakukan adalah tentang:

Penyelaksanaan Kurikulum di UIC Pertanian Jember Selaj

Perspektif Otonomi Daerah Tahun 2003-2003

Atas perhatian dan perhatian saudara, disampaikan terima kasih.

Wassalam

Ketua



Dr. Keryta Anandita
No. 150 265 744

